Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser

Wiratno, lahir di Tulungagung 28 Maret 1962. Menempuh sarjana kehutanan di UGM (1988), S2 di ITC Belanda (1993). Menulis beberapa buku tentang konservasi alam, antara lain: Berkaca di Cermin Retak; Refleksi Konservasi dan Implikasinya Bagi Pengelolaan Taman Nasional (2002), diterbitkan Yayasan Gibbon; Nakhoda-Leadership Dalam Organisasi Konservasi (2005)-diterbitkan Conservation International , dicetak ulang untuk WWF Program Heart of Borneo (2009); Solusi Jalan Tengah-Esai-esai Konservasi Alam-Dit Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen PHKA (2012); Bersama dengan Nurman Hakim menjadi editor Buku Sang Pelopor (Peranan Dr.S.H.Kooders dalam Perlindungan Alam, karangan Pandji Yudistira), dan Kumpulan tulisan staf UPT Ditjen PHKA, dengan judul "Nanti Kalau Tidak Turun Dimarahi Pak Kadus", Dit.KKBHL, Ditjen PHKA (2012); Tersesat di Jalan Yang Benar-Seribu Hari Mengelola Leuser (2013) diterbitkan oleh UNESCO Jakarta Office. Aktif menulis beragam artikel di Blog : www.konservasiwiratno.blospot.com Email : inung_w2000@yahoo.com.

Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser
Tangkahan dan Pengembangan Ekowisata Leuser

Penulis : Wiratno
Editor : Panut Hadisiswoyo
Ari Suhendi
Mustaqim
Fransiska Ariantiningsih
Taufik Ramadhan
Disain/Grafis : Mhd. Jamil

Disclaimer

Penggunaan istilah dan penyajian materi dalam keseluruhan publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dan pendapat UNESCO mengenai status hukum suatu negara, wilayah, kota atau daerah kekuasaan negara tersebut, atau penentuan batas-batas negara tersebut. Penulis bertanggungjawab atas pemilihan dan penyajian fakta-fakta yang ada di dalam buku ini dan atas segala pendapat yang dinyatakan di dalamnya, dan tidak mencerminkan posisi atau kebijakan UNESCO dan tidak mengikat kepada UNESCO.

ISBN No: 978-602-95312-3-7

Buku ini diterbitkan atas kerjasama YOSL-OIC dan UNESCO Jakarta dengan dukungan dana dari UNEP-GRASP, Spain-UNEP life web

Medan, Indonesia

© 2013 by YOSL-OIC dan UNESCO
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

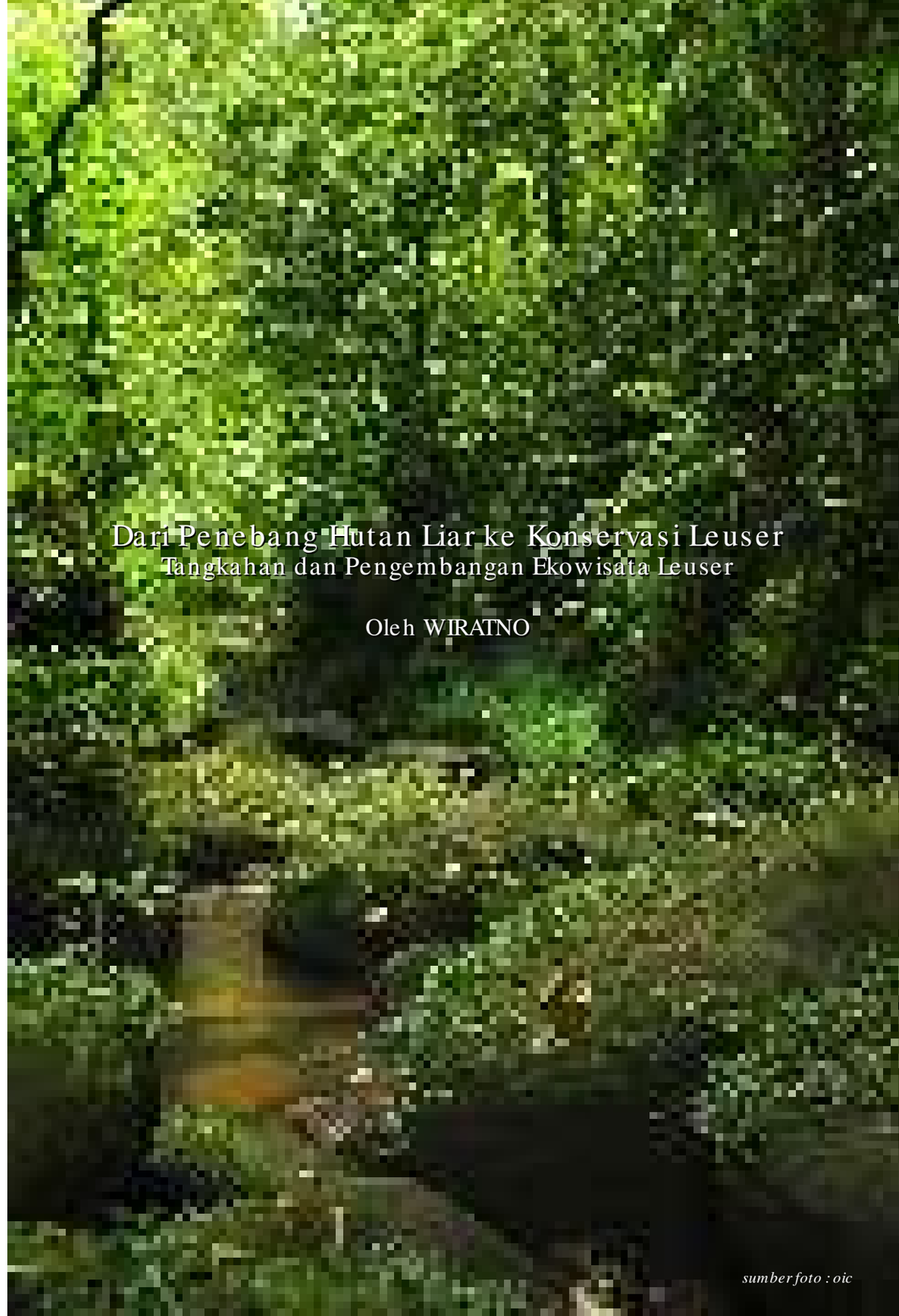

FOREWORD

I would like to congratulate the author, Mr Wiratno, who in partnership with Orangutan Information Center (OIC), has published this work on Tangkahan community based ecotourism with support from UNESCO-GRASP-UNEP project titled “Protecting critical orangutan habitat through strengthening protected areas in northern Sumatra.”

Through this book, Mr Wiratno shared his experience in developing Tangkahan from an encroachment area to one of the most wanted tourist destinations in Sumatra, a hidden paradise. As the former head of Gunung Leuser National Park, he put the community as the main actor, who can create and develop ecotourism in Tangkahan as alternative livelihood, while at the same time, conserving Leuser ecosystem.

I believed the book will make great contribution to ecotourism, conservation and sustainable economy not only in the Sumatra but also other parts of Indonesia.

Dr. Shahbaz Khan
Deputy Director and Senior Program Specialist
Environmental Science Program
UNESCO Jakarta Office

Tentang Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre (YOSL-OIC)

YOSL-OIC merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki misi untuk konservasi Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) dan hutan hujan tropis sebagai sumber keanekaragaman hayati yang dibutuhkan untuk kelangsungan ekosistem dan kehidupan umat manusia. YOSL-OIC bekerjasama dengan masyarakat lokal di sekitar habitat Orangutan Sumatera melalui beragam kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat desa, restorasi ekosistem hutan, penanggulangan konflik manusia dan orangutan, pengembangan mata pencaharian alternatif seperti agroforestri dan pengembangan ekowisata serta berbagai macam program pelatihan dan penyadartahuan bagi masyarakat luas di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di propinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Email : info@orangutancentre.org
Website : www.orangutancentre.org
Facebook : www.facebook.com/pages/Orangutan-Information-Centre/249175758613943

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung penulisan sampai penerbitan buku ini.

Pertama, kepada Bapak Wiratno yang telah menulis buku ini. Panut Hadisiwoyo, Ari Suhendi, Mustaqim dan Taufik Ramadhan yang berpatisipasi sebagai editor.

Rekan-rekan Wahdi Azmi, Genman Hasibuan, Ujang Wishnu Barata (PEH pada BB TN Gunung Leuser), Saiful Bahri, Nurdin Razak (Akademisi dan Praktisi Ekowisata Universitas Airlangga) yang telah membagi pengalaman dan ide-idenya untuk memperkaya informasi dalam buku ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan photo-photo yang bagus dan menarik untuk buku ini.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada UNESCO, United Nations Environment Programme (UNEP), Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) yang telah mendukung terbitnya buku ini.

Kata Pengantar

Dengan rasa syukur dan bangga buku “Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser, Tangkahan dan Pengembangan Ekowisata Leuser” dapat terbit dengan paparan lugas tapi komprehensif tentang sejarah Tangkahan sebagai ikon ekowisata dan konservasi di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ditulis oleh Bapak Wiratno M.Sc yang juga sebagai salah satu pelaku sejarah penting terbangunnya ekowisata Tangkahan. Kini Tangkahan telah menjadi lambang harapan masa depan Leuser yang lestari.

Buku ini ditulis dengan harapan bahwa salah satu “obat mujarab” untuk mengobati persoalan konservasi di Leuser dapat didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran bagi semua pihak. Walau sebagian pihak memandang ekowisata belum lah menjadi jawaban semua persoalan dan kerumitan pengelolaan sebuah kawasan konservasi, namun realitanya, ekowisata telah mendorong sebuah perubahan dan gerakan sosial kemasyarakatan untuk memakmurkan kawasan hutan dan masyarakat lokal. Terlebih ekowisata, bila dikelola secara baik dan profesional, akan menjadi sebuah ‘manajement tool’ dan ‘katalisator’ untuk membawa pengelolaan kawasan konservasi yang lebih bernuansa pada “pelibatan masyarakat setempat”. Sebuah kata kunci yang saat ini belum bisa diimplementasikan secara optimal oleh pengelola kawasan konservasi, sehingga sulit menerapkan apa yang disebut dengan management kolaboratif. Ekowisata ternyata terbukti menjadi sebuah pintu gerbang untuk menuju pengelolaan yang kolaboratif bagi Leuser.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wiratno, seorang sahabat bagi kami sekaligus sebagai mentor kami dalam berkontribusi untuk konservasi Leuser. Kesetiaan Bapak Wiratno untuk Leuser dan konservasi menjadi inspirasi kami untuk dapat menerbitkan buku ini dan melanjutkan perjuangan konservasi untuk Leuser. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Andi Basrul, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser yang telah mendukung penerbitan dan kegiatan kami di lapangan sekaligus memberikan arahan kepada kami sehingga terjalin kerjasama yang harmonis dalam melaksanakan program kegiatan kami untuk mendukung konservasi Leuser. Terima kasih kami sampaikan kepada UNESCO yang telah mendukung dan memberikan arahan bagi kami untuk menerbitkan buku ini dan menjalankan program pengembangan ekowisata di Tangkahan.

Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk menuju perubahan yang baik bagi Leuser dan masyarakat luas.

Wassalam,

Panut Hadisiswoyo, MA, MSc
Ketua Yayasan Orangutan Sumatera Lestari

Sambutan

Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser

Upaya konservasi alam di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada masa itu, masyarakat kerajaan telah berupaya menyelaraskan kehidupan dengan alam sekitar melalui berbagai kearifan yang dimilikinya. Upaya konservasi alam tersebut kemudian berlanjut pada masa penjajahan Belanda serta pada masa pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, melalui penunjukan atau penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi, termasuk taman nasional.

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan bagian dari sejarah panjang konservasi alam di Indonesia. Upaya konservasi kawasan TNGL dimulai dari inisiasi para pemimpin lokal Aceh meminta Pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi kawasan Lembah Alas dan sekitarnya dan dideklarasikan dalam Deklarasi Tapaktuan tahun 1934. Upaya tersebut berlanjut pada masa pasca kemerdekaan dan oleh Pemerintah, TNGL ditetapkan menjadi salah satu dari 5 (lima) taman nasional pertama di Indonesia.

Pengakuan global telah diberikan kepada TNGL. UNESCO telah menetapkan TNGL sebagai Cagar Biosfer pada tahun 1981. Pada tahun 1984, TNGL juga ditunjuk sebagai *ASEAN Heritage Park* (AHP). Bersama-sama dengan TN Kerinci Seblat dan TN Bukit Barisan Selatan, ditetapkan sebagai Warisan Dunia (*Tropical Rainforest Heritage of Sumatera pada tahun 2004*). Selain itu, TNGL juga merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam tata ruang wilayah dan saat ini sedang dalam proses penetapannya melalui sebuah Keputusan Presiden.

Berbagai "kisah sukses" dan "kisah kelabu" mengiringi perjalanan pengelolaan salah satu taman nasional nasional tertua di Indonesia ini. Perambahan yang terjadi di Besitang, Kabupaten Langkat serta di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, merupakan bagian "kisah kelabu" yang mengancam kelestarian TNGL. Saat ini masih terus diupayakan penyelesaian perambahan tersebut agar kelestarian kawasan TNGL dapat terus dijaga. Disamping kisah kelabu, kisah sukses juga mengiringi perjalanan konservasi TNGL. Diantara kisah sukses tersebut adalah pengelolaan ekowisata Tangkahan yang kemudian *success story* tersebut ditulis oleh Ir. Wiratno, MSc ini. Penulis adalah Kepala Balai TNGL tahun 2005-2007 dan juga merupakan salah satu pelaku "sejarah" pengelolaan ekowisata Tangkahan oleh Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT).

Tangkahan bukan hanya sekedar ekowisata yang dikelola oleh masyarakat (*community based ecotourism*) yang terbukti bisa diterapkan di kawasan konservasi, namun juga merupakan sebuah proses transformasi dari kultur masyarakat pelaku penebangan liar, menjadi masyarakat yang melakukan upaya konservasi dalam menyelamatkan hutan TNGL di wilayah mereka, Sei Serdang dan Namo Sialang. Konsep pengelolaan wisata alam TNGL oleh masyarakat yang menurut ceritanya ditawarkan oleh Ir. Adi Susmianto, MSc (Kepala Balai TNGL tahun 1997) saat ini benar-benar dapat diterapkan dan harus diakui, memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi Balai Besar TNGL baik dari penerimaan PNBP maupun dalam upaya menjaga kelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Namun demikian, tak ada gading yang tak retak. Kisah sukses Tangkahan bagaimanapun tentunya memiliki berbagai permasalahan yang harus disikapi secara arif agar ke depan pengelolaan tersebut dapat berjalan semakin baik. Tangkahan perlu terus didampingi, dievaluasi serta ditingkatkan kedepannya dengan melibatkan para pihak yang terkait, baik BBTNGL, LPT, Pemda maupun swasta. Penulis secara gamblang menyampaikan saran-saran yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan ekowisata di Tangkahan. Buku ini merupakan upaya pendokumentasian "kisah sukses" pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan konservasi yang tentunya akan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi upaya-upaya pengembangan ekowisata di kawasan konservasi lainnya di Indonesia.

Terakhir saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ir. Wiratno, MSc yang telah berupaya menuliskan pengelolaan ekowisata di Tangkahan dalam sebuah buku. Selain itu juga kepada Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Centre (YOSL-OIC) yang telah bersedia memfasilitasi penerbitan buku ini. Saya berharap buku ini dapat bermanfaat untuk upaya pengelolaan Tangkahan yang semakin baik pada khususnya, serta pada umumnya bermanfaat untuk pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser yang kita banggakan ini.

Kepala Balai Besar,

Drs. Andi Basrul
NIP.19561121 198203 1 003

sumber foto : YOSL-OIC

Daftar Isi

BAGIAN SATU

Leuser : Konservasi dan Ancaman

1. Konservasi
   1.1. Sejarah Konservasi Nusantara
   1.2. Konservasi sebagai Gerakan
   1.3. Leuser
      1.3.1. Bermula dari Ketambe
      1.3.2. Nilai Lansekap Leuser
      1.3.3. Penyangga Kehidupan
      1.3.4. Pengakuan Global
         1.3.4.a. Cagar Bisofer
         1.3.4.b. Warisan Dunia
2. Ancaman
   2.1. Potret Konflik
   2.2. Permasalahan TN Gunung Leuser
   2.3. Tangkahan sebelum 1999
3. Ekowisata Leuser

BAGIAN DUA

Ekowisata Tangkahan : Solusi Permasalahan Leuser

1. Sejarah Tangkahan (deskripsi wilayah Tangkahan, lokasi, peta, batas wilayah, luas wilayah dsb)
2. Peran Tangkahan dalam Perlindungan Leuser
   2.1. Tantangan Saat Ini
   2.2. Solusi untuk Leuser

BAGIAN KETIGA

Ekowisata Tangkahan dan Masyarakat

1. Pengelolaan Ekowisata
   1.1. Ekowisata
   1.2. Tangkahan di Masa Lalu
   1.3. Tangkahan Saat Ini
      1.3.1. Lembaga Pariwisata Tangkahan
      1.3.2. Pola Kunjungan
      1.3.3. Potensi Riset
2. Peran Tangkahan Melindungi Leuser
3. Kondisi Sosial Ekonomi Tangkahan
   3.1. Persepsi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tangkahan

BAGIAN KEEMPAT

Apa Kata Mereka
   4.1. Pendapat Mereka Tentang Tangkahan

BAGIAN KELIMA

Pembelajaran Tangkahan
   5.1. Peran Masyarakat
   5.2. Perubahan Paradigma dan Kebijakan
   5.3. Pembelajaran Tangkahan
   5.4. Kepemimpinan Kolektif
   5.5. Langkah-langkah ke Depan

DAFTAR PUSTAKA

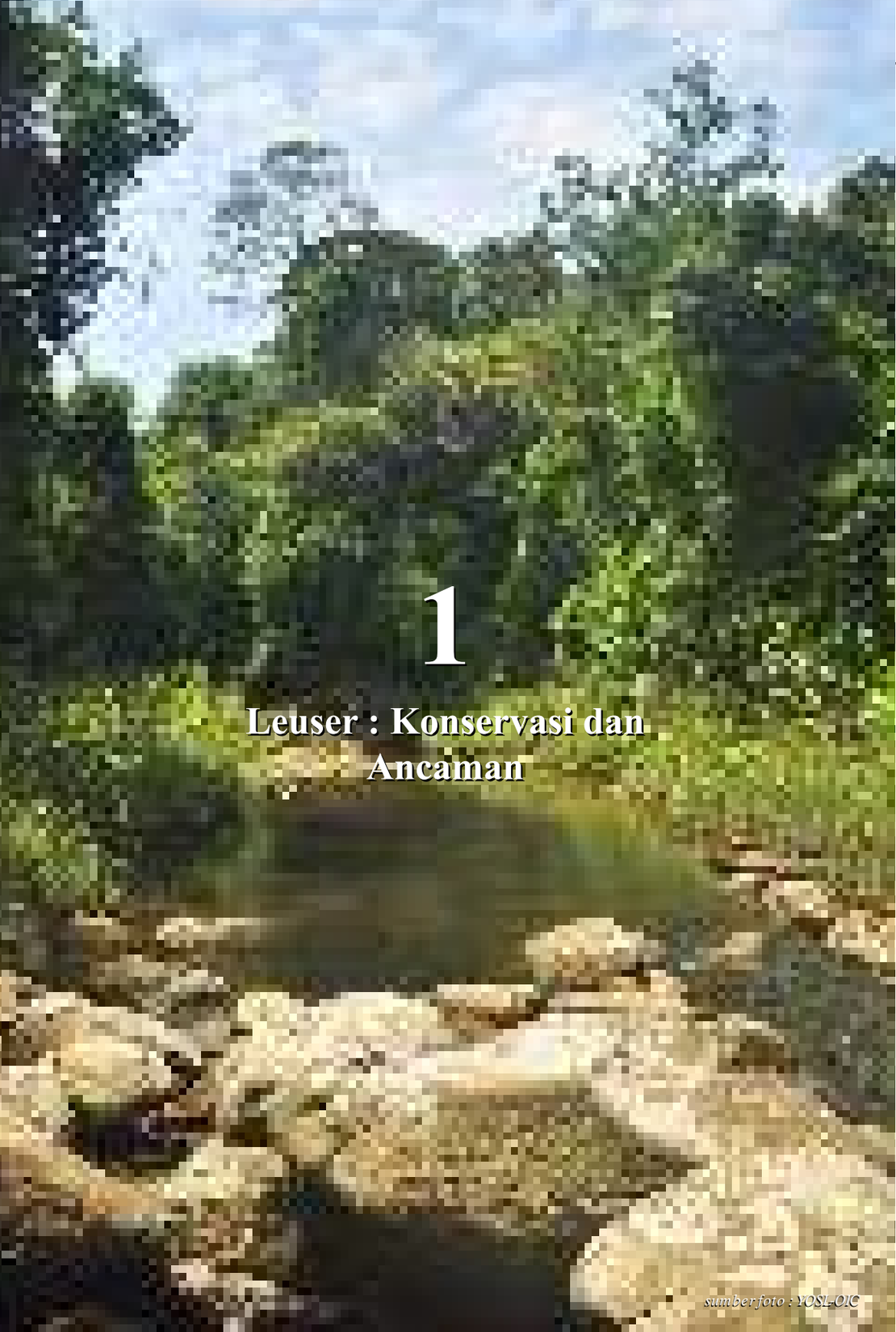

1

Leuser : Konservasi dan Ancaman

sumber foto : YOSL-OIC

1. KONSERVASI

1. 1. Sejarah Konservasi Nusantara

Pertanyaan tentang sejak kapan upaya konservasi alam di Indonesia? Apakah dibawa oleh Belanda atau jauh sebelumnya? Beberapa temuan penting yang diuraikan oleh Wiratno, dkk (2004), membuktikan bahwa upaya konservasi telah dilakukan jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Di masa Kerajaan-kerajaan Nusantara, hubungan antara manusia dengan alam, sudah didasarkan pada prinsip membangun relasi harmonis antar keduanya. Alam dianggap sesuatu yang suci *(sacred)*, yang memberi berkah bagi kehidupan manusia. Raja-raja menjalankan ritual-ritual penghormatan kepada penguasa alam dengan mendirikan tempat-tempat pemujaan dewa-dewa dan roh-roh leluhur.

Salah satu dokumen penting yang berkaitan dengan kebijakan konservasi alam adalah "Prasasti Malang" tahun 1395 dari jaman Kerajaan Majapahit. Dalam prasasti tersebut dinyatakan :

> *"Pemberitahuan kepada seluruh satuan tata negara si parasama di sebelah timur Gunung Kawi, baik di timur atau di barat batang air (Berantas); diberitahukan kepada sekalian wedana, juru, bujut, terutama kepada Pacatanda di Turen. Bahwa telah kita perkuat perintah seri paduka batara Partawa Iswara, yang ditanam di Wisnu-bawana dan begitu pula perintah seri paduka yang ditanam di Kertabuana, berhubungan dengan kedudukan satuan tata negara si parasame Katiden yang meliputi sebelas desa.*
> *Oleh karena masyarakat itu berkewajiban mengamat-amati padang alang-alang di lereng Gunung Ledjar, supaya jangan terbakar, maka haruslah ia bebaskan dari pembayaran pelbagai titisara. Selanjutnya masyarakat dilarang menebang pohon kayu dari hutan kekayu dan memungut telur penyu dan getah, karena larangan itu tidak berlaku padanya. Juga tidak seorang jua pun boleh melakukan di sana peraturan larangan berupa apa jua. Apabila keputusan raja ini sudah dibacakan maka Desa Lumpang haruslah menurutnya. Demikianlah diselenggarakan pada bulan pertama tahun Saka 1317".*

Temuan Prasasti pada jaman Kerajaan Majapahit ini membuktikan telah adanya upaya pelestarian lingkungan, pengaturan kompensasi bagi masyarakat yang dilarang melakukan eksploitasi dengan solusi yang konkrit. Upaya ini dilakukan jauh sebelum masa kolonial tiba di Indonesia.

Simon Winchester dalam bukunya : "Krakatoa" (terjemahan, 2010, diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo-Gramedia Group), menguraikan tentang misi dagang Belanda yang mendarat di pelabuhan lada di Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Apabila tahun kedatangan mereka dianggap sebagai waktu pertama Belanda menjejakkan kaki dan pengaruhnya di bumi Indonesia, maka terdapat rentang waktu 201 tahun, terhitung sejak Prasasti Malang tersebut dikumandangkan. Maka, terbukti bahwa kearifan lingkungan telah ada sejak Kerajaan-kerajaan Nusantara berdiri jauh sebelum Dr.S.H.Koorders membangun gerakan konservasi alam.

1. 2. Konservasi sebagai Gerakan

Dalam berbagai literatur tentang konservasi di Indonesia, tidak ditemukan satu pernyataanpun tentang konservasi alam yang digolongkan sebagai suatu "gerakan" atau movement. Atas keuletan seorang Pandji Yudistira, melalui penelusuran dokumen-dokumen Belanda sejak 2009 ketika Pak Pandji bertugas sebagai Kepala Bidang Wilayah III Ciamis, BBKSDA Jawa Barat. Akhirnya muncullah nama seorang tokoh bernama Dr.S.H.Koorders. Perburuannya yang panjang itu akhirnya membuahkan penerbitan buku berjudul: "Sang Pelopor" Peranan Dr.S.H.Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia, tahun 2012, yang diterbitkan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan. Dalam perjalanan ke Leiden untuk melakukan penelusuran dokumen-dokumen dan bertemu dengan beberapa tokoh Indonesianis di bidang konservasi alam (Wiratno, 2011), kami menemukan beberapa hal menarik, seperti pertanyaan apakah Belanda atau Hindia Belanda yang terlebih dulu memiliki kebijakan konservasi alam? Apabila kita menginterpretasikan konservasi alam dalam bentuk kawasan-kawasan konservasi, yaitu kawasan hutan yang dilindungi, maka pada tahun 1919, telah ditetapkan sebanyak 55 lokasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Menurut Yudistira (2012), pada tanggal 22 Juli 1912, didirikan Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming) di Buitenzorg (kebun raya). Di dalam rapat pertama perkumpulan perlindungan alam ini, Dr. S. H. Koorders dengan kelebihan suara diangkat sebagai Ketua Pertamanya dan jabatan ini tetap dipegangnya sampai dia meninggal (1919). Hasil yang diperoleh selama 7 tahun (1912-1919) pendirian perkumpulan perlindungan alam, yaitu:

- Pemerintah Hindia Belanda merespon usulan dari Perkumpulan Perlindungan Alam untuk mendirikan Natuurmonument (Monumen Alam) dengan diterbitkannya Natuurmonument Ordonnantie (Undang-Undang Monumen Alam/Cagar Alam) dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Atas Nama Ratu Belanda (Wilhelmina) tanggal 18 Maret 1916 No.49, Lembaran Negara 1916 No.278. Gubernur Jenderal dalam undang-undang ini melakukan peraturan/tindakan-tindakan untuk perlindungan alam antara lain:
- Dilarang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan perubahan keadaan umum di dalam cagar alam, seperti pengumpulan tanaman, menangkap, melukai atau membunuh hewan, pembakaran, menggembalakan ternak dan lain-lain.
- Menetapkan hukuman atas pelanggaran larangan yang terjadi di dalam cagar alam dengan hukuman denda atau hukuman penjara.
- Diperintahkan kepada semua Majelis Tinggi, Majelis Rendah, Pegawai, Pejabat dan Ahli Hukum untuk mematuhinya tanpa pandang bulu.
- Penunjukan awal kawasan Natuurmonument sebanyak 55 lokasi berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1919, yaitu tanggal 21 Pebruari 1919 No.6 (Staatsblad No.90) dan 11 Juli 1919 No.83 (Staatsblad No.392) yang diusulkan Perkumpulan Perlindungan Alam.

Berdasarkan hasil kajian sejarah itu, maka Hindia Belanda lebih dulu dalam membuat kebijakan konservasi alam dalam bentuk penunjukan kawasan-kawasan yang dilindungi dan juga perundang-undangan yang menyertainya. Sedangkan di Belanda, baru dibentuk Perkumpulan Perlindungan Alam Belanda pada tahun 1925, yang dipimpin oleh Dr.Tienhoven. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Prof. Peter Boomgaard bahwa: "The first Dutch attemps to preserve nature started earlier in Indonesia than they did in the Netherlands". Upaya konservasi alam

dimulai dari Hindia Belanda dan setelah itu baru diikuti oleh Belanda di Negeri Belanda. Pernyataan ini ditulis dalam artikel yang disiapkan Prof. Peter Boomgaard, berjudul : "Oriental Nature, Its Friends and Its Enemies", yang diterbitkan dalam Environmental and History Volume 5, Number 3, October 1999. The White Horse Press, Cambridge, UK.

Sebagai sebuah gerakan, maka tahun 1912 dapat disimpulkan sebagai tahun awal ditunjuknya suatu kawasan-kawasan hutan sebagai kawasan perlindungan alam, estetika, habitat hidupan liar, dan gejala alam.

1. 3. Leuser

Kompleks hutan Leuser terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), dan wilayah hutan-hutan lindung di sekitarnya, termasuk Rawa Tripa dan Singkil, seluas hampir 2 juta hektar disebut sebagai Ekosistem Leuser. Wilayah ini bertautan dengan kompleks hutan Ulu Masen, yang juga diperkirakan seluas 2 juta hektar, merupakan sisa kawasan hutan yang relatif utuh di Bumi Andalas bagian barat. Komplek ini boleh disebut sebagai Pilar di Ujung Barat Sumatera. Sedangkan di wilayah tengah, terdapat kompleks Taman Nasional Kerinci Seblat seluas sekitar 1,4 juta hektar, menjadi Pilar Sumatera bagian tengah, dan di Sumatera bagian selatan, terdapat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, seluas 350.000 hektar. Ketiga taman nasional ini membentang di jajaran pegunungan Bukit Barisan, dengan beberapa bagiannya merupakan hutan hujan tropis dataran rendah yang sangat penting sebagai habitat mamalia besar Sumatera. Rahasia di dalamnya masih banyak belum terungkap oleh ilmu pengetahuan dan oleh karenanya, menjadi kewajiban kita semua untuk bersikap hati-hati. *Precautionary principle* atau prinsip kehati-hatian menjadi pegangan kita, agar sumberdaya yang penuh dengan potensi dan belum sempat digali tersebut diharapkan masih terjaga dalam beberapa generasi mendatang. Di bawah ini, beberapa nilai yang sudah dapat diungkapkan oleh para ahli, sebagaimana diuraikan oleh Wiratno (2013), dan peranan Pusat Penelitian Ketambe oleh Suharto Djojosudharmo, dkk (2006), sebagai berikut:

I. 3. 1. Bermula dari Ketambe

Taman Nasional Gunung Leuser adalah salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia, yang merupakan satu hamparan hampir kompak berbentuk seperti tapal kuda. Mendiskusikan nilai konservasi Leuser tidak dapat kajian orang utan Sumatera *(Pongo abelii)*, terpenting di dunia. *Pongo abelii* yang merupakan satu-satunya kera besar di Asia.

Sebagaimana diuraikan oleh Suharto Djojosudharmo, Sri Suci Utami Atmoko, Azwar dan Yossa Istiadi (2006), Pusat Penelitian Ketambe adalah satu-satunya tempat penelitian Orangutan Sumatera yang terus melakukan penelitian orangutan liar yang ada di sana sejak tahun 1971 (terputus karena kondisi keamanan 2002 - awal 2003) hingga kini, bersama pusat penelitian simpanse di Gombe, Tanzania (tempat Dr. Jane Goodall) dan pusat penelitian gorila gunung di Karisoke, Rwanda (tempat almarhumah Dr. Dian Fossey) sebagai tiga tempat penelitian teratas yang terus menghasilkan karya-karya penelitian kera besar yang diakui dunia.

Ketambe juga telah berkontribusi luar biasa dalam membantu manusia untuk lebih memahami orangutan dan banyak hasil penelitiannya telah dipublikasi di jurnal-jurnal nasional dan internasional serta membantu dalam proses analisa berbagai lokakarya konservasi, misalnya lokakarya PHVA orangutan pada tahun 1993 dan 2004; dan pembuatan rencana aksi orangutan Sumatera di Berastagi pada tahun 2005.

Hutan Ketambe - Aceh Tenggara

sumber foto : YOSL-OIC

Pentingnya penelitian jangka panjang telah dibuktikan melalui hasil penelitian dari Ketambe, salah satunya adalah penelitian orangutan, di mana kita terus mendapatkan data dari individu-individu yang telah diikuti sejak tahun 1971 hingga kini. Berdasarkan catatan penelitian tersebut kita akhirnya mengetahui antara lain, bahwa orangutan adalah satu-satunya mamalia darat yang dapat hidup hingga usia lanjut serta mempunyai jarak antar kelahiran yang sangat lama (8-9 tahun); ini paling lama di antara semua mamalia terestrial di dunia. Orangutan sering melewati usia 50-an tahun. Dalam regenerasi hutan juga sudah dibuktikan fungsinya sebagai salah satu kunci penyebar biji. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan untuk terus melanjutkan penelitian jangka panjang ini hingga paling tidak satu siklus kehidupan dari orangutan di Ketambe, yang dapat kita ketahui dengan pasti mulai saat kelahirannya. Perlu kita pikirkan, kalau suatu studi sepanjang ini di hentikan, maka kita harus mulai lagi dari awal. Hal ini akan perlu waktu 35 tahun lagi sebelum kita sampai kembali ke posisi ilmu tentang individu-individu seperti ini lagi. Setelah adanya kasus *illegal logging* di area penelitian yang terjadi, pada saat terputusnya penelitian karena kondisi keamanan di tahun 2002 dan 2003, sangatlah menarik untuk diteliti bagaimana dampak *illegal logging* terhadap orangutan dan hewan yang dilindungi lainnya serta kondisi habitat terganggu di Ketambe.

Penelitian di Ketambe telah dilakukan sejak tahun 1970-an melalui program kerjasama berbagai lembaga, diantaranya adalah kerjasama jangka panjang antara Universitas Utrecht, Belanda dengan Universitas Nasional, Jakarta yang dibimbing langsung oleh Prof. Dr. J.A.R.A.M. van Hooff. Kemudian juga oleh LIPI, Ditjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHKA), universitas manca negara lainnya, antara lain University of Davis dan Duke University, USA; Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh; Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK), Banda Aceh; Universitas Pajajaran, Bandung; dan Universitas Indonesia, Jakarta. Ketambe tidak hanya menjadi pusat penelitian ekologi, tetapi juga telah menjadi area pelatihan konservasi bagi generasi muda Indonesia maupun manca negara lainnya. Hasil dari kerjasama penelitian dan pelatihan konservasi ini telah dibuktikan dengan dihasilkannya sarjana baik strata satu, strata dua dan strata tiga dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang beruntung ikut serta dalam penelitian di Ketambe, diantaranya bahkan telah menjadi pakar di bidangnya masing-masing, antara lain: Dr. Jito Sugardjito (Direktur FFI-Indonesia Program), Dr. Rohadi Abdulhadi (Sekretaris Umum LIPI), Dr. Barita O.Manullang (ahli ekologi hidupan liar), Drs. Tatang Mitra Setia, MSc (Dekan Fak. Biologi, UNAS), Drs. Ary S. Suhandi (Direktur INDECON), Dr Sri Suci Utami (UNAS), Dolly Priatna, dan banyak yang lain.

1.3.2. Nilai Lansekap Leuser

Di samping sebagai salah satu pusat penelitian orang utan Sumatera terpenting, TNGL merupakan laboratorium alam yang kaya sekaligus juga ekosistem yang rentan. MacKinnon and MacKinnon (1986) menyatakan bahwa Leuser mendapatkan nilai tertinggi untuk kontribusi konservasi terhadap kawasan konservasi di seluruh Indo-Malaya. Ekosistem Leuser adalah habitat spesies-spesies satwa penting di daratan Sunda *(Sundaland)*, terutama mamalia tingkat tinggi. Hampir 65% mamalia Sumatera (129 spesies mamalia dari 205 spesies) tercatat ada di tempat ini. Leuser menjadi habitat bagi 380 spesies burung. Suatu daftar terpanjang di dunia, dimana 350 di antaranya merupakan spesies yang tinggal di kawasan taman nasional. Ekosistem Leuser juga rumah bagi 36 dari 50 spesies burung *"Sundaland"*.

Ekosistem Leuser adalah habitat mamalia terpenting. Selain orangutan Sumatera *(Pongo abelii)*, ekosistem Leuser juga merupakan habitat bagi harimau Sumatera *(Panthera tigris sumatrae)*, badak Sumatera *(Dicerorhinus sumatrensis)*, tapir *(Tapirus indicus)*, gajah Sumatera *(Elephas maximus sumatrensis)*, owa *(Hylobathes lar)*, dan kedih *(Presbytis thomasii)*.

Di samping rumah bagi berbagai fauna kunci tersebut di atas, di TNGL kita bisa menemukan lebih dari 4.000 species flora. Termasuk di dalamnya 3 spesies dari 15 spesies tumbuhan parasit Rafflessia. TNGL merupakan tempat banyak jenis tumbuhan obat (Brimacombe & Elliot, 1996).

Ir. Agus Susatya, PhD sebagai Dosen di Universitas Bengkulu, dalam penelitian yang fokus pada salah satu flora penting yaitu rafflesia, telah membuktikan kepada masyarakat Indonesia maupun Internasional, bahwa Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa. Salah satunya adalah bunga raksasa Rafflesia spp., dari 25 jenis refflesia di seluruh dunia, 12 jenis diantaranya berada di Indonesia. Rafflesia ditemui tersebar di sepanjang jajaran Bukit Barisan Sumatera, mulai dari TN Gunung Leuser, TN Bukit Tigapuluh, hingga Cagar Alam Batang Palupuh,

Kabupaten Agam. Sementara di Jawa dapat dijumpai di TN Gunung Gede Pangrango, CA Semenanjung Pangandaran, TN Meru Betiri; di Kalimantan di CA Gunung Raya dan TN Bukit Baka Bukit Raya, serta TN Kayan Mentarang.

Sdr Ir. Agus Susatya PhD dalam seri penelitian untuk S3nya telah menemukan 2 jenis rafflesia baru, yaitu: (1) *Rafflesia bengkuluensis*, di Talang Tais, Bengkulu, dan *Rafflesia lawangensis*, di Bukit Lawang TN Gunung Leuser.

1.3.3. Penyangga Kehidupan

Hutan sebagai penyangga kehidupan dapat dimaknai perannya yang besar dalam fungsinya menjaga keseimbangan hidrologi dan suplai air bagi masyarakat luas, baik bagi pertanian maupun untuk kepentingan konsumsi. TNGL memainkan peran itu pula. TNGL menyediakan suplai air bagi 4 juta masyarakat yang tinggal di Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) maupun Sumatera Utara. Sembilan kabupaten tergantung pada jasa lingkungan TNGL. Jasa lingkungan yang dapat diberikan yaitu daerah resapan air, penyedia air tawar layak konsumsi, pengairan, penjaga kesuburan tanah, mengendalikan banjir, dan penyedia udara bersih. Leuser juga melindungi 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Propinsi NAD dan 3 DAS di Sumatera Utara. Di wilayah Aceh, DAS tersebut adalah Jambo Aye, Tamiang-Langsa, Singkil (Singkil dan Lawe Alas), Sikulat-Tripa, dan Baru-Kluet. Wiratno (2013) mendapatkan data bahwa produksi air dari DAS Leuser di wilayah Aceh tersebut tidak kurang dari 95,445 juta m3/tahun. Sedangkan di Sumatera Utara DAS yang dilindungi

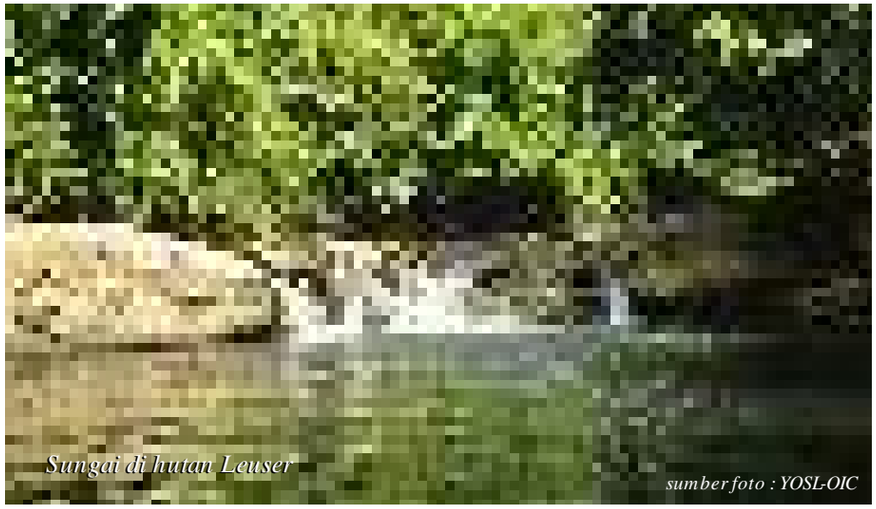

Sungai di hutan Leuser

sumber foto : YOSL-OIC

Studi yang dilakukan oleh Beukering dkk. (2003) memberitahukan kepada kita bahwa nilai Ekonomi Total Ekosistem Leuser, termasuk TNGL di dalamnya, dihitung dengan suku bunga 4% selama 30 tahun adalah USD 7 milyar (bila terdeforestasi), USD 9,5 milyar (bila dikonservasi), dan USD 9,1 milyar (bila dimanfaatkan secara lestari). Hal ini menunjukkan betapa peran kawasan hutan di Ekosistem Leuser dan di TNGL sangat besar dalam menjaga stabilitas ekosistem dan keberlanjutan pembangunan khususnya di daerah hilir yang sarat dengan penggunaan lahan produktif dan aset-aset pembangunan yang strategis.

Berdasarkan fakta-fakta dan hasil kajian tersebut, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hutan TNGL merupakan penyangga kehidupan bagi jutaan masyarakat di sekitarnya. Baik untuk kebutuhan air konsumsi, air untuk perikanan, pertanian, pembangkit listrik, penyeimbang iklim mikro, dan masih banyak manfaat lainnya.

1.3.4. Pengakuan Global

TNGL mendapat pengakuan internasional dengan status sebagai Cagar Biosfer (1981) dan Warisan Dunia (2004). Kedua status tersebut ditetapkan oleh UNESCO melalui program Man and Biosphere (MAB) dan World Heritage Committee atas usulan Pemerintah Indonesia, setelah melalui suatu proses seleksi yang ketat. Pengakuan tersebut menunjukkan nilai penting Leuser di kancah global, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan dalam arti yang luas. Pengakuan tersebut sekaligus juga merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya dalam melakukan pengelolaan. Kesempatan terbuka bagi pemerintah Indonesia dalam meminta dukungan internasional apabila dalam mengelola Leuser menghadapi berbagai persoalan, dan masyarakat global harus bersedia membantu pemerintah Indonesia.

1.3.4. a. Cagar Biosfer

Cagar Biosfer didefinisikan sebagai kawasan ekosistem daratan atau pesisir yang masih utuh, terdegradasi tetapi dapat dipulihkan kembali untuk mempromosikan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Cagar Biosfer melayani perpaduan tiga fungsi yaitu: (1) kontribusi konservasi lansekap, ekosistem, jenis, dan plasma nutfah, (2) menyuburkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan baik secara

ekologi maupun budaya, dan (3) mendukung logistik untuk penelitian, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan yang terkait dengan masalah konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan global. Fungsi Cagar Biosfer serta Jaringan Cagar Biosfer Dunia telah didefinisikan dan diuraikan dalam "Strategi Seville dan Kerangka Hukum Jaringan Cagar Biosfer Dunia" (LIPI, 2004). Di Indonesia terdapat 6 Cagar Biosfer yaitu di Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Lore Lindu, Pulau Siberut (termasuk Taman Nasional Siberut), dan Taman Nasional Komodo. Cagar Biosfer ketujuh baru ditetapkan ketika buku ini dalam proses akhir, yakni Bukit Giam-Siak di Provinsi Riau yang disponsori oleh pihak swasta, terutama PT Sinar Mas. Sedangkan secara global, telah ditetapkan 507 Cagar Biosfer yang tersebar di 102 negara, pada tahun 2006.

1.3.4.b. Warisan Dunia

Konvensi Warisan Dunia mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam diadopsi pada sidang ke 17 Konferensi Umum UNESCO di Paris tanggal 16 November 1972. Konvensi ini melindungi kawasan-kawasan yang penting bagi masa depan umat manusia. Kawasan yang ditetapkan harus memiliki nilai budaya dan konservasi tinggi. Konvensi ini berlaku efektif sejak 17 Desember 1975. Sampai Maret 2005, Konvensi Warisan Dunia telah diratifikasi lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1989. Terdapat 830 situs di 138 negara yang telah tercantum di dalam daftar Warisan Dunia, terdiri dari 644 situs budaya, 162 situs alami dan 24 situs campuran. Warisan Dunia adalah warisan yang (1) Terdiri dari Warisan Alam, Warisan Budaya dan campuran, (2) Melestarikan warisan yang tidak dapat digantikan dan warisan yang memiliki "Nilai maha agung yang luar biasa *(Outstanding Universal Value)*", (3) Perlu melindungi warisan yang tidak dapat dipindahkan, dan (4) Menjadi tanggung jawab kesadaran dan kerjasama kolektif international (UNESCO, 2004).

Sampai saat ini, Indonesia memiliki 7 tempat yang tercantum dalam Daftar Warisan Dunia. Candi Borobudur (1991), Candi Prambanan (1991), situs arkeologis Sangiran (1996) termasuk dalam Situs Warisan Budaya. Sedangkan Situs Warisan Alam adalah Taman Nasional Ujung Kulon (1991), Taman Nasional Komodo (1991), Taman Nasional Lorentz (1999) dan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Kawasan TRHS ini ditetapkan pada Sidang ke 28 Komite Warisan Dunia di Suzhou Cina, 27 Juni-7 Juli 2004. Mengingat adanya tekanan serius terhadap kawasan TRHS, World Heritage Committee (WHC) mengirim utusan melakukan Misi Monitoring Reaktif (Reactive Monitoring Mission). Salah satu hasilnya menyarankan agar pemerintah Indonesia membuat Emergency Action Plan (EAP) untuk mengatasi ancaman dan permasalahan di kawasan TRHS. Rencana Strategi ini merupakan salah satu bagian dari kerangka penyelesaian masalah sesuai EAP. Di Leuser, ancaman itu adalah illegal logging (era 1990-2005) dan berubah menjadi perambahan untuk perkebunan karet dan sawit di akhir tahun 1990 sampai dengan saat ini. Besitang adalah contoh nyata dari kerusakan hutan hujan tropis dataran rendah terpenting di wilayah Sumatera Utara, karena perambahan sawit. Lebih dari 4.000 hektar sawit dan kerusakan kawasan (dalam berbagai tingkatannya) seluas hampir 16.000 hektar. Salah satu penyebabnya adalah adanya pengungsi dari korban konflik Aceh tahun 1999. Sampai dengan saat ini, berbagai upaya telah dilakukan pada tahun 2006-2007, namun tidak dilanjutkan selama empat tahun. Baru pada tahun 2012 dilakukan upaya penegakan hukum namun kurang berhasil. Pada tahun 2013, sedang diupayakan untuk diterbitkan suatu INPRES guna menyelesaikan persoalan pengungsi di Besitang ini, dan akan dikoordinasikan oleh Menko Kesra.

2. ANCAMAN

2.1. Potret Konflik

Sampai dengan era 1990, tidak banyak berita yang mengungkap berbagai konflik antara masyarakat, baik masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, maupun masyarakat pendatang, dengan taman nasional atau kawasan konservasi lainnya, seperti di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam. Seiring dengan semakin habisnya hutan-hutan produksi sejak dieksploitasi secara mekanis pada awal 1970an. Era 1990an juga ditandai dengan meningkatnya permintaan akan sawit, sehingga dimulailah era monokultur sawit, dan hal ini terbukti nyata setelah 22 tahun ini dimana *landscape* Sumatera telah berubah total.

Di beberapa tempat, telah menyebabkan meningkatnya konflik horisontal, seperti di areal perluasan TN Tesso Nilo (8.000 Ha perambahan sawit); TN Gunung Leuser di Besitang (4.000 Ha sawit) dan 16.000 Ha areal hutan hujan tropis dataran rendahnya telah mengalami degradasi yang sangat parah; TWA Holiday Resort yang sebagian besar telah berubah menjadi kebun sawit; SM Balai Raja, di Riau, dimana hutan alamnya tinggal < 200 Ha dari yang semula seluas 13.500 Ha. Di wilayah TN Bukit Barisan Selatan, perambahan dengan kopi mendominasi persoalan masyarakat dengan pengelola taman nasional; Di TN Rawa Aopa Watumohai, coklat adalah komoditi unggulan yang ditanam oleh perambah.

Kawasan-kawasan konservasi dengan nuansa adat yang masih kental, pekerjaan rumahnya tidak kalah penting untuk ditangani secara sistematis dengan payung hukum dan kebijakan yang komprehensif berdasarkan kondisi sosial, budaya, sejarah, dan dinamika politik lokal yang sangat beragam. TN Kayan Mentarang, di Provinsi Kalimantan Utara, sejarahnya adalah milik 11 suku Daya' Besar. Saat ini pengelolaannya diarahkan secara kolaboratif dan dibentuk Dewan Penentu Kebijakan, yang beranggotakan para pihak, khususnya perwakilan dari suku-suku pemilik hak ulayat tersebut. WWF mendampingi untuk beberapa tahun dalam proses kelola bersama tersebut. TN Lorentz, seluas hampir 2 juta hektar, juga bernuansa Adat yang sangat kuat dan sebagian masyarakatnya sangat bergantung pada sumberdaya yang ada di dalam taman nasional tersebut.

2.2. Permasalahan di TN Gunung Leuser

Perambahan, ilegal logging, perburuan satwa, klaim lahan, dan berbagai bencana, seperti banjir dan longsor, merupakan permasalahan yang dihadapi hampir setiap waktu dalam pengelolaan TN Gunung Leuser pada rentang waktu 20 tahun terakhir ini.

Purwaningsih, dalam Yapekka, (2010), menghitung kerusakan di TNGL secara berkala. Pada tahun 1989, luas wilayah TNGL yang terdegradasi mencapai 5.742 hektar. Di tahun 2003, luas lahan yang terdeforestasi telah mencapai 18.742 hektar. Diduga dibukanya pemukiman bagi pengungsi asal Aceh di wilayah Besitang dan sekitarnya awal 2000-an menjadi kontributor terbesar degradasi hutan TNGL. Meskipun tahun 2009 luasan yang terdegradasi tampak menyusut menjadi 18.239 hektar, namun secara menyeluruh diperkirakan penambahan luas areal terdeforestasi di TNGL selama 20 tahun terakhir adalah 13 ribu hektar lebih.

Namun demikian, berbagai persoalan yang terjadi tersebut dapat dikategorikan sebagai gejala atau *symptom*. Akar masalahnya tentu lebih rumit kait mengkaitnya, dari apa yang muncul dan terekam. Secara umum, faktor-faktor penyebabnya dapat dikelompokkan ke dalam dua, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar organisasi pengelola, seperti pertambahan penduduk yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan lahan garapan, serta kemiskinan dan meningkatnya kebutuhan dasar (makanan, bahan perumahan, kayu bakar). Selain itu meningkatnya kebutuhan kayu di tingkat regional, serta dipicu semakin habisnya sumber kayu dari hutan produksi; lemahnya penegakan hukum, meningkatnya permintaan akan sawit, telah merubah sebagian besar tata guna lahan di seluruh Pulau Sumatera, termasuk meningkatnya perambahan ke dalam TNGL. Sedangkan yang dimaksudkan dengan faktor internal adalah faktor yang disebabkan dari dalam organisasi pengelola taman nasional itu sendiri. Terbatasnya jumlah staf (1 juta hektar diurus hanya oleh 200 staf); masih lemahnya kapasitas kerja, sistem kerja, dan motivasi kerja di tingkat lapangan. Hal ini masih diperburuk dengan terbatasnya sarana dan prasarana, sehingga yang terjadi adalah kurangnya staf yang menjaga di lapangan. Patroli hanya terbatas sesekali dilakukan. Akumulasi dari berbagai faktor penyebab tersebut, masih diperburuk dengan kondisi keamanan di Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Gayo (pada periode 2005-2007) yang masih belum kondusif, serta adanya bencana Tsunami (26 Desember 2005), menyebabkan sebagian besar staf takut berada di lapangan. Maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan TNGL di lapangan pada periode 2005-2007 tersebut mengalami kelumpuhan. Namun, penulis mendengar dan sebagian meyakini bahwa sebelum periode tersebut, pola pengelolaan TNGL juga belum menemukan bentuknya yang dapat dikatakan efektif. Ada periode pengelolaan yang dapat dijadikan contoh, khususnya di Besitang, yaitu di masa Pak Napitupulu (sering kali dipanggil Pak Napit). Figur yang tegas, pekerja lapangan yang handal dan disegani seluruh staf dan masyarakat Besitang. Masa penegakan hukum yang cukup mengenai sasaran adalah di akhir 2005, untuk kasus penebangan haram di Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga seluruh kilang kayu di dalam

TNGL wilayah Aceh Tenggara ditutup. Namun demikian, proses hukum terhadap pelaku tidak sesuai dengan harapan. Dukungan WALHI dan jaringannya, menjadi faktor penentu operasi khusus ini (Wiratno, 2013). Penyelesaian perambahan di Besitang, Kabupaten Langkat juga menemukan momentumnya pada 2006, dengan dukungan penuh dan konsisten dari Polres Langkat dan Polda Sumatera Utara. Ratusan hektar kebun sawit di eks PT Putri Hijau dan di Sekoci berhasil dihancur-musnahkan (Wiratno, 2013).

2.3. Tangkahan sebelum 1999

Di Tangkahan, persoalan hutan semula adalah penebangan haram yang dilakukan sejak masa Belanda, di awal 1920an. Bukan dilakukan oleh masyarakat Karo, yang memiliki pranata budaya dan nilai-nilai konservasi tinggi, tetapi oleh kongsi Belanda dengan pedagang Tiongha bernama Kon Sen Song. Kemudian berkembang kongsi Song-Asiong-Inggip sampai periode 1950an. Masyarakat Karo mulai berani melakukan kegiatan ini setelah kemerdekaan dan dimana kekuasaan Belanda berakhir. Di era 1990an, muncul toke baru Kho An, yang membuka kilang kayu di Tanjung Beringin. Tujuannya adalah memutus rantai perdagangan kayu oleh tiga toke kayu, yaitu A Gong, A Lai, dan A Lai muda di Tanjung Pura. Kho An digantikan oleh A Beng yang berkongsi dengan aparat keamanan, preman, dan paranormal. Fase terakhir adalah berkembangnya agro-industri skala besar (prediksi penulis perubahan ini terjadi mulai 1990an, yaitu era ekspansi perkebunan sawit skala besar), yang mendorong masyarakat mengeksploitasi hutan untuk mendapatkan lahan, sementara pengusaha yang berada di belakang pembalakan kayu terus bertahan dan melakukan regenerasi (Saiful Bahri dalam Wiratno, 2013 halaman 182-197).

Sungai di hutan Tangkahan *sumber foto : YOSL-OIC*

Pada tahun 1999, Pak Adi Susmianto, saat itu Kepala TN Gunung Leuser, menerima aksi demo yang digerakkan antara lain oleh maraknya ilegal logging di Leuser wilayah Sumatera Utara, yang salah satu penggerak demo tersebut adalah Saiful Bahri. Demo ini malahan berakhir dengan dialog dan ditawarkannya ide tentang kelola bersama masyarakat di Tangkahan, dan mulai membuahkan hasilnya di 2004 sampai dengan saat ini.

Ketika tahun 2004, Tangkahan sudah mulai menunjukkan hasilnya dari kegiatan ekowisata berbasis masyarakat, ribuan kilometer jaraknya ke arah timur, yaitu di Ruteng, Kabupaten Manggarai telah terjadi tragedi yang membawa korban jiwa atas nama konservasi. Rabu Berdarah di Manggarai, begitulah judul di media massa saat itu. Sebanyak 6 orang petani kopi yang berkebun di TWA Ruteng, melakukan aksi demo ke Polres Manggarai di Ruteng, menuntut pembebasan beberapa kerabat petani yang ditahan. Pembabatan kopi tahun 2003 dalam skema Operasi Wanalaga itu, berbuntut penangkapan dan berlanjut jatuhnya korban, dimana 6 orang petani tertembak di depan Polres Manggarai, dan puluhan cacat seumur hidup. Kasus ini merembet ke urusan HAM dan dibukukan dengan judul : "Gugat! Darah Petani Kopi Manggarai (Eman J.Embu & R.Mirsel - Editor, 2004).

Penulis bertugas Februari di BBKSDA NTT dan bertanggungjawab pula mengelola TWA Ruteng. Sejak 10 Maret 2004 sampai penulis bertugas sebagai Kepala Balai Besar KSDA NTT, tidak pernah ada lagi komunikasi dengan masyarakat khususnya keluarga korban penembakan tersebut. Hampir 9,5 tahun putus hubungan. Atas dasar kondisi inilah, maka kami memulai inisiatif "Kelola Tiga Pilar". TWA Ruteng akan dikelola bersama Gereja, Masyarakat Hukum Adat, dan Pemerintah Setempat. Rabu Berdarah tidak perlu terjadi apabila pengelola TWA Ruteng atau pengelola kawasan konservasi di Indonesia, menyadari bahwa masyarakat adalah bagian dari solusi pengelolaan. Masyarakat bukan hanya obyek. Ia adalah subyek (baca : pelaku) dalam pengelolaan kawasan konservasi. Sejauh mungkin hindarkan korban jiwa di masyarakat setempat dalam kelola kawasan konservasi. Ini sebaiknya menjadi cita-cita dan visi kita bersama.

Dalam perspektif itulah, maka pendekatan yang dibangun di Tangkahan adalah suatu upaya yang sangat positif, konstruktif, dan sangat diharapkan terjadi di berbagai kawasan konservasi di seluruh tanah air. Kawasan konservasi bukan "kertas kosong". Ia tidak pernah menjadi "kertas kosong", kawasan tanpa penduduk, tanpa klaim, tanpa konflik kepentingan. Solusi harus dibangun mulai dari tingkat kebijakan. Kebijakan dibangun berdasarkan pengalaman dan praktik-praktik dari lapangan. Maka, dokumentasi hasil lapangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dalam perumusan kebijakan nasional yang "doable", realistis, dan terutama aspiratif.

Perjalanan wisata dengan gajah di hutan Tangkahan

sumber foto : www.sumutpos.co

3. EKOWISATA DI LEUSER

Kawasan TN Gunung Leuser yang membentang di wilayah 10 kabupaten dan dua provinsi, tentu memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa dan beragam. Bahkan juga didukung dengan potensi budayanya yang sangat khas, perpaduan antara beberapa budaya, seperti Karo, Gayo, dan Aceh. Beberapa lokasi yang sudah sangat terkenal di masa lalu dan hingga saat ini adalah wisata Arung Jeram di Sungai Alas dan Gurah (Kabupaten Aceh Tenggara); pendakian puncak Leuser melalui Kedah, di Kabupaten Gayo.

Bukit Lawang, dengan icon orang utan sudah sangat terkenal sejak 30 tahun yang lalu. Kawasan ini sempat menjadi kawasan yang tidak terkontrol serta berubah sebagai pariwisata masal *(mass tourism)* yang dikunjungi lebih dari 21.000 wisatawan setiap tahunnya dan akhirnya hancur akibat banjir bandang tahun 2003 dengan 200 korban jiwa. Wisata alam di wilayah Aceh Tenggara sempat mati suri akibat kondisi keamanan yang tidak memadai sebagai akibat konflik GAM-militer saat itu. Bahkan pasca perjanjian damai pada 2006 yang ditandatangi di Helsinki, kondisi keamanan di wilayah Aceh belum menjamin mampu menghadirkan wisatawan manca negara.

Sementara itu potensi obyek dan daya tarik wisatanya sangat beragam dan menjanjikan untuk dibangun sebagai paket-paket wisata alam baru. *Rafflesia spp.*, misalnya yang ditemukan di Bukit Lawang dan Ketambe, serta di beberapa lokasi lainnya, bisa dikemas untuk paket baru yang tidak kalah menariknya disamping orang utan.

Tangkahan menjadi urutan terbaru dari obyek dan daya tarik wisata alam di wilayah Sumatera Utara, atau di Kabupaten Langkat pada khususnya. Walaupun sudah diinisiasi sejak tahun 2000, namun Tangkahan mulai menunjukkan potensinya yang handal setelah dibangun secara keroyokan dan terpadu, pada tahun 2002 hingga saat ini. Balai (Besar) TN Gunung Leuser, Indonesian Ecotourism Network (INDECON), Fauna Flora International, Conservation International, serta UNESCO, pada periode 2000-2006.

Namun demikian, Tangkahan dibangun bukan semata-mata ditujukan untuk wisata alam, tetapi ada sejarah yang lebih rumit dari sekedar

mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara ke wilayah yang masih sangat asri dan indah ini. Sebagian dari sejarah itulah yang akan dihadirkan dan diuraikan dalam buku ini. Termasuk di dalamnya, pola-pola pengelolaan wisata alam yang berbasis masyarakat *(community-based ecotourism)*, adalah pendekatan yang memiliki basis filosofis dan ideologi yang lebih subtansial dan mendalam. Bagaimana hubungan-hubungan antara pemerintah sebagai pengelola taman nasional di satu sisi dan masyarakat lokal yang memiliki sumberdaya alam serta akses yang sangat terbatas, dapat duduk bersama dan membangun kesepahaman tentang konservasi di satu sisi dan nilai-nilai ekonomi (lokal) untuk kesejahteraan masyarakat, di sisi lainnya. Cerita dan dialektika yang menarik itu secara (tidak) sengaja dibangun di Tangkahan, sejak tahun 1999, namun berakar dari kesejarahan konflik-konflik yang dapat dirunut jauh ke tahun 1920an.

Apakah ada solusi? Pertanyaan inilah yang dicoba untuk dijawab, melalui kajian kritis terhadap Tangkahan, yang disandingkan dengan tetangganya yang menghadapi persoalan pelik, di Besitang dan Restorasi di Sei Serdang. Juga akan dilihat dari perspektif nasional, dimana terdapat pembelajaran di CA Simpang Tilu, dimana masyarakat di tingkat desa bersatu padu membantu pemerintah melindungi cagar alam dengan isu bersama soal air. Gerakan di Tangkahan juga akan disandingkan dengan upaya-upaya di tingkat global tentang peran masyarakat dalam kelola kawasan lindung. Durban Accord yang dihasilkan dalam Kongres Taman Nasional se Dunia di Durban, Afrika Selatan pada tahun 2004, juga akan dijadikan pertimbangan, untuk "membaca" dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di Tangkahan.

3.1. Implikasi ke Depan

Uraian tentang nilai Leuser sehingga mendapatkan pengakuan secara global menunjukkan posisi Leuser sebagai sumberdaya "milik" komunitas global. Potensinya yang besar masih tersembunyi dan belum tergali. Pengakuan global sebagai cagar biosfer dan warisan dunia semestinya menjadi faktor pendorong utama bagi pemerintah Indonesia, untuk meningkatkan upaya kelola di tingkat tapak serta perlindungan kebijakan lintas sektor di tingkat nasional. Kasus perambahan sawit sebaiknya diselesaikan di tingkat nasional secara lintas sektor. Seiring dengan hal itu, upaya merangkul masyarakat lokal dalam untuk mendapatkan manfaat nyata bagi kehidupan ratusan masyarakat dusun, desa, gampong, yang sebagian besar kehidupannya masih bergantung pada sumberdaya Leuser. Termasuk jasa lingkungan khususnya sumberdaya air untuk pertanian, kebun, ladang, dan air untuk konsumsi, perlindungan bencana (tanah longsor, banjir bandang), sumber bahan pangan dan perumahan, penjaga keseimbangan siklus air, kesuburan tanah.

Di antara pola interaksi desa atau masyarakat dengan Leuser, yang saat ini bisa dijadikan contoh adalah simpul di Tangkahan, simpul restorasi di Sei Serdang, simpul Bukit Lawang. Kesemuanya adalah wilayah pedesaan yang berbatasan dengan Leuser di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebaiknya segera dapat diidentifikasi simpul-simpul interaksi di wilayah Aceh, dimana ratusan desa mengepung Leuser secara langsung, seperti di Lembah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues.

Hutan hujan Taman Nasional Gunung Leuser

sumber foto : YOSL-OIC

Pengakuan global terhadap Leuser dan di banyak kawasan taman nasional lainnya di seluruh tanah air, semestinya menjadi faktor pemicu dan unsur pengungkit bagi manajemen untuk meningkatkan kemampuan pengelolaannya sampai ke tingkat tapak. Mengambil langkah lanjutan dari berbagai inisitaif, seperti di Tangkahan, di Restorasi Sei Serdang yang telah menunjukkan indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat, guna semakin terjaga dan membaiknya kondisi hutan Leuser di kedua wilayah tersebut. Di tingkat nasional, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan, mendukung dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Leuser, peningkatan kapasitas leadership di seluruh simpul organisasi, dukungan pendanaan yang memadai, sarana prasarana yang cukup, dan melakukan pemantauan secara lebih intensif terhadap perkembangan Leuser. Pada tataran internasional, pengakuan global perlu didorong terus untuk mewujudkan dukungan internasional terhadap Leuser yang banyak menghadapi masalah-masalah besar saat ini dan ke depan. Pada tahun 2006, telah di inisiasi suatu proposal bersama dengan UNESCO, dan akhirnya pemerintah Spanyol melalui UNESCO Jakarta Office memberikan dukungan selama 3 tahun, dan nampaknya berlanjut sampai dengan saat ini; demikian pula dengan World Heritage Center di Paris, menggelontorkan dana ke Leuser. Pendanaan ini khusus untuk merespon kerusakan Leuser dan mendukung Balai KSDA Aceh, pasca bencana Tsunami.

Tantangan bagi seluruh pengelola kawasan-kawasan konservasi termasuk taman nasional adalah bagaimana mendorong peningkatan intensitas dan efektifitas pengelolaan di tingkat tapak. Rencana Strategis Ditjen PHKA (2010-2014), telah mengamanatkan bahwa 50 taman nasional harus dikelola berbasis resor. Tugas ini diterjemahkan ke dalam berbagai pelatihan yang dikoordinasikan di Direktorat Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung, dengan paket pelatihan Resort-Based Management atau RBM. Dengan semakin seringnya staf berada di lapangan, atau bahkan tinggal di lapangan, maka berbagai persoalan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan lebih cepat, dan selanjutnya untuk dapat diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya. Di samping itu, pengelola taman nasional semakin mengenal siapa saja tetangganya, dimana ia sebaiknya berkoordinasi dan membangun hubungan yang lebih intens, dan terus menerus tanpa mengenal lelah. Membangun sistem bertetangga yang saling menjaga, menghormati, dan saling menguntungkan.

Sejak 2010 hingga 2012, telah dilakukan lebih dari 30 kali pelatihan RBM untuk seluruh taman nasional dan beberapa Balai KSDA. Telah dibangun jaringan instruktur lintas UPT Taman Nasional, untuk mendorong proses percepatan pembelajaran dan membangun semangat kembali ke lapangan, menjaga hutan di lapangan, dan bukan hanya sekedar patroli rutin. Leuser sebagai Cagar Biosfer dan Warisan Dunia, dengan segala manfaatnya yang sangat besar, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, harus dikelola di tingkat lapangan. Harus dikelola secara kolaborasi dan kerjasama para pihak. Apalagi pada tahun 2011, dalam Sidang Komite Warisan Dunia ke 35, tanggal 19-29 Juni 2011 di Paris, TRHS (TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan) telah masuk ke dalam daftar Endangered World Heritage, Warisan Dunia yang terancam punah.

Maka, pelaksanaan RBM di Leuser merupakan jawaban konkrit terhadap tanggungjawab kita dalam mempertahankan nilai-nilai strategis Leuser untuk masyarakat luas, dan menjawab status Leuser sebagai *endangered* World Heritage. Melalui RBM ini pula, dapat didorong meningkatnya keterlibatan para pihak terutama Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mereka sebaiknya turut serta secara aktif dalam pengamanan dan pemanfaatan secara lestari, penyelesaian persoalan perambahan dan *illegal logging*, serta perburuan satwa-satwa dilindungi, secara terpadu dan berkelanjutan.

Sungai di hutan Tangkahan - TNGL

sumber foto : YOSL-OIC

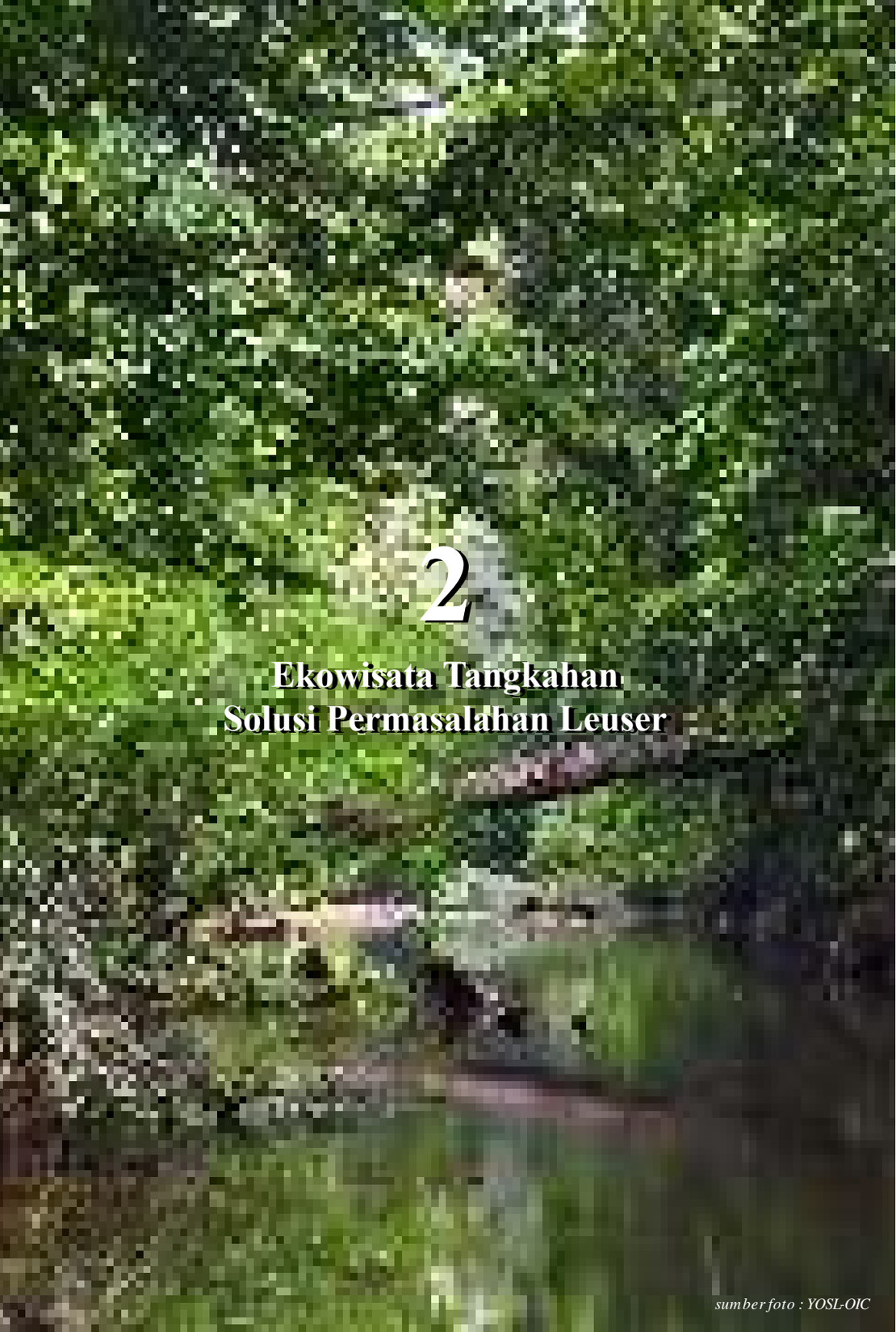

2

Ekowisata Tangkahan Solusi Permasalahan Leuser

sumber foto : YOSL-OIC

1. SEJARAH TANGKAHAN (DESKRIPSI WILAYAH TANGKAHAN, LOKASI, PETA, BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH DAN SEBAGAINYA)

Tanpa terasa sudah sepuluh tahun kawasan Tangkahan menjadi primadona ekowisata di Sumatera Utara, sejak dilakukan peluncuran produk ekowisata secara resmi di bulan Februari 2004 yang ditandai dengan kunjungan Direktur Tenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Ibu Myra P. Gunawan MSc. Ketidakterasaan ini terjadi karena secara historis Tangkahan sebelumnya dikenal sebagai surga para toke kayu yang membalak kekayaan hutan Tangkahan secara sistematis, dengan mengandalkan arogansi kekuasaan dan kekerasan. Realita arogansi kekuasaan ini terjadi karena kawasan Tangkahan dialiri dua anak sungai yang dapat berfungsi sebagai jalur perjalanan keluarnya hasil kayu jarahan hutan Leuser yang kaya. Kehidupan masyarakat setempat terbungkam oleh situasi dan kondisi yang sengaja dibangun dengan alasan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Perambahan dan penjarahan kekayaan hutan Tangkahan sebagai bagian dari harta karun pegunungan Lauser yang fenomenal tersebut, dapat dikatakan berlangsung dengan sangat mulus dalam kurun waktu yang cukup panjang. Sebagai akibat dari keterlibatan banyak pihak yang enggan menaati aturan dan memikirkan dampak negatif yang pasti datang menerjang masyarakat nantinya.

Dalam situasi hingar-bingar penjarahan hasil hutan Tangkahan yang dipicu oleh tingginya permintaan pasar, mulailah terjadi beberapa persoalan sosial di tengah masyarakat manakala para penebang dari desa desa sekitar Tangkahan masuk untuk mengadu nasib berebut kayu di lahan yang sama. Tak pelak kondisi ini menimbulkan persaingan yang tinggi diantara kelompok masyarakat penebang. Pada saat itu sebenarnya Tangkahan secara spontan telah dikunjungi wisatawan lokal untuk berlibur di pantai (istilah yang digunakan oleh masyarakat di Tangkahan untuk sisi sungai berpasir dan berbatu yang digunakan untuk aktivitas). Saat itu tanpa adanya mekanisme pengelolaan dan dikuasai oleh beberapa kelompok masyarakat saja. Kondisi Tangkahan yang kurang kondusif karena meningkatnya praktek mempertaruhkan hasil pembalakan kayu Leuser di meja judi, menyebabkan kunjungan

wisatawan lokal berkurang dan terhenti sama sekali. Tangkahanpun semakin tak nyaman, persaingan antar kelompok meningkat, hubungan harmonis keluargapun terganggu. Kondisi ini mulai perlahan menyurut saat adanya penangkapan salah satu tokoh yang sekaligus menjadi pelaku penebangan liar Bapak Ukur Depari yang dikenal dengan sebutan pak Okor. Pada saat yang bersamaan sekelompok anak muda – anak anak bangsa - yang masih memiliki identitas dan idealisme, menerobos perlahan memasuki relung desa, merasuk sukma warga, membasuh hati dan pikiran setiap insan yang mendiami kawasan Tangkahan khususnya, dan Kecamatan Batang Serangan umumnya.

Kehadiran “anak-anak muda” yang penuh idealisme ini tak urung melahirkan kecurigaan dan rasa waswas yang mengkhawatirkan bagi penduduk dan para toke kayu. Kehadiran “anak-anak muda” ini terasa mengusik kebiasaan, mengancam “masa depan” pemanfaatan hasil rambahan yang selama ini terasa mampu membangun eksistensi kehidupan mereka. Akibatnya, berbagai pertentangan dan kontroversi pun mulai mencuat di antara sesama penduduk. Pro dan kontra pun memecah belah “kebersamaan” kelompok yang selama ini dipandang mampu memuluskan sinergitas beberapa penduduk setempat dengan para toke kayu yang secara terampil terus merambah kayu hutan mereka. Betapa tidak kalau selama bertahun-tahun masyarakat merasa

Air terjun di sungai Tangkahan

sumber foto : YOSL-OIC

sangat terbantu kehidupan perekonomiannya dengan hasil dari perambahan kayu hutan, maka dengan kehadiran “anak-anak muda” yang penuh dedikasi ini sebagian masyarakat mulai merasa goyah, dan cemas. Angin, dan gemuruh air terjun, ataupun arus sungai yang selama ini dimanfaatkan sebagai alunan irama pengobat lelah mengiringi aktivitas mereka membabat tiap jengkal pohon di dalam hutan, kini berubah bagai badai yang setiap saat mengancam kebiasaan buruk tersebut. Secara perlahan, masyarakat mulai memindahkan mimpinya dari memberangus hutan kepada mimpi indah membangun halaman rumahnya. Aliran sungai tidak lagi diperuntukkan menghanyutkan ribuan batang kayu untuk memperkaya para cukong dari kota. Rimba, tidak lagi menjadi hal yang disiasati hanya untuk mendapatkan kepuasan sesaat. Masyarakat mulai bergerak, mulai mempersiapkan masa depan di bawah biru langit yang cerah, menghirup udara yang segar, membangun generasi baru anak-cucu yang mencintai tanahnya, mencintai air sungainya, menjaga pohon dan hewannya, mendiami buminya yang damai. Sudah sejak tiga belas tahun yang lalu, Tangkahan berbenah diri menjadi kawasan baru wisata lingkungan. Tiga tahun belajar membangun kawasan baru dengan kehidupan baru, nafas baru dan segar dengan paru-paru yang bersih mewujudkan Tangkahan kawasan tadah kayu jarahan hutan sebagi kawasan ekowisata yang eksotis, sebelum meluncurkan produk wisata di tahun 2004.

Kini siapa yang tak kenal wajah Tangkahan. Sebuah destinasi wisata alam yang dikemas sebagai bentuk ekowisata yang mendukung konservasi Leuser di Sumatera Utara. Lebih dari 40,000 wisata lokal mengunjungi Tangkahan setiap tahunnya dan secara perlahan angka wisatawan manca negara sudah melebihi 6000 orang setiap tahunnya. Pemerintah daerah dan pengusaha sudah mulai melirik investasi jangka panjang dan kalau tidak dikendalikan secara bijak, investasi ini dapat menjadi bencana baru. Para pihak di Tangkahan kini sudah memikirkan dampak pengembangan ekowisata terhadap kawasan lindung, tatanan sosial, dan perekonomian. Masyarakat sepakat bahwa ekowisata Tangkahan harus berkelanjutan dan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa No. 04 tahun 2014 yang mengatur tentang pengembangan infrastruktur di kawasan ekowisata dan pengelolaan sampah. Kini peraturan desa itu sudah berjalan dan akan mengawal ekowisata Tangkahan berjalan secara berkelanjutan.

2. PERAN TANGKAHAN DALAM PERLINDUNGAN LEUSER

TNGL memiliki panjang batas kawasannya lebih dari 1022 Km, dan dikepung oleh dua provinsi, Aceh dan Sumatera Utara yang terdiri dari delapan kabupaten (Gayo Luwes, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Karo, dan Langkat). Terdiri dari 40 kecamatan dan 111 desa. Berpenduduk lebih dari 4 juta jiwa.

Kawasan konservasi seluas itu, dengan predikat sebagai Cagar Biosfer dan Warisan Dunia, hanya dikelola (baca: dilindungi) oleh 200 staf Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL). Tentu suatu hal yang tidak mungkin dilakukan secara efektif. Selama jangka waktu pengelolaan 20 tahun terakhir, membuktikan semakin meningkat dan semakin kompleksnya persoalan yang muncul di lapangan.

Maka, pola-pola kerjasama saling menguntungkan antara masyarakat, terutama yang tinggal di desa-desa sepanjang batas kawasan dengan pihak BBTNGL, yang memiliki petugas-petugasnya di setiap resort wilayah, adalah suatu strategi pengelolaan taman nasional yang sebaiknya (harus) dilakukan. Namun demikian, untuk dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat ini diperlukan upaya kerja yang serius, konsisten, dan sebaiknya staf berada di lapangan secara terus menerus. Diperlukan dukungan kepemimpinan atau *leadership* yang kuat daRI seluruh lini, mulai dari Kepala Balai Besar, Kepala Bidang Teknis, Kepala Bidang Konservasi Wilayah, Kepala Seksi Konservasi Wilayah, sampai Kepala Resort di tingkat paling bawah, di lapangan.

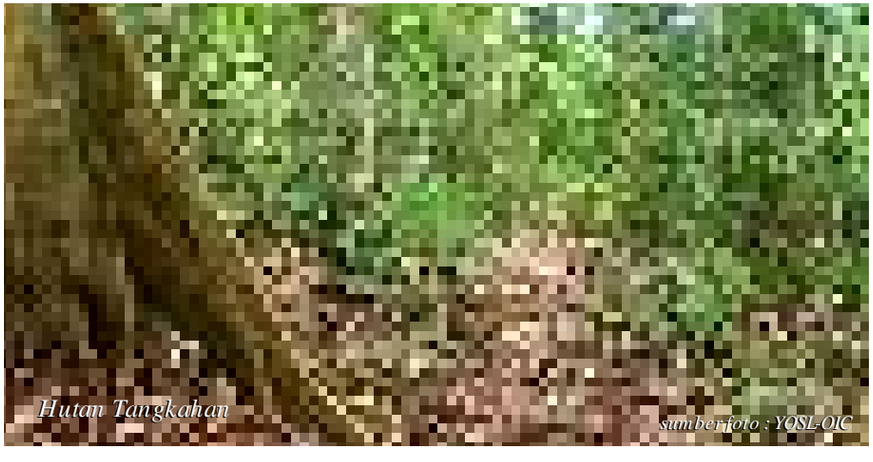

Hutan Tangkahan *sumber foto : YOSL-OIC*

Apabila masyarakat mendapatkan manfaat dari Taman Nasional, terutama manfaat langsung yang dirasakan secara nyata untuk membantu kehidupan ekonominya sehari-hari, maka masyarakat akan secara otomatis membantu mengamankan kawasan hutan tersebut. Hal ini akan diuraikan secara detil tentang Tangkahan, dimana ekowisata yang dikelola oleh masyarakat mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memberikan alternatif pendapatan selain yang berasal dari pekarangan atau kebun yang luasnya semakin terbatas, sekaligus mampu menjaga kawasan Leuser dari kegiatan-kegiatan merusak.

Ekowisata Tangkahan adalah potret dari hasil kerjasama banyak pihak, utamanya yang mendukung upaya proteksi atau perlindungan kawasan taman nasional khususnya kawasan hutan di wilayah sekitar Desa Sei Serdang dan Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Dampak nyatanya memang terbatas di wilayah hutan di sekitar kedua desa tersebut saja, namun demikian, telah terjadi *multiplier effect* dalam bentuk peningkatan kesadaran para pihak khususnya yang bekerjasama. Tangkahan dikenal bukan saja sebagai kawasan wisata alam, tetapi juga menarik minat peneliti, mahasiswa, LSM, maupun kunjungan pejabat Kementerian Kehutanan, cq Ditjen PHKA, untuk "menikmati" Tangkahan. Ini telah terjadi sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini.

Pola penjagaan kawasan taman nasional yang seperti ini, mulai diadopsi dengan inisiatif yang disebut sebagai "restorasi ekosistem" di Sei Serdang, masuk dalam wilayah Resort Cinta Raja. Walaupun restorasi dilakukan hanya pada kawasan eks perambahan sawit seluas 27 hektar yang didukung oleh kerjasama dengan UNESCO tetapi telah memberikan *multiplier effect* nya sampai ratusan hektar kawasan taman nasional di sekitarnya. Hal ini menunjukkan suatu bukti bahwa keberadaan staf di lapangan *(ground presence)* adalah salah satu kunci yang sangat menentukan. Kepala Resort Cinta Raja yang sekaligus sebagai staf yang bertanggungjawab menjaga areal restorasi tersebut, Sdr. Keleng Ukur, mendapatkan Penghargaan dari Menteri Kehutanan pada tahun 2011. Kisah keberhasilan restorasi ini telah dituliskan oleh Suer Suryadi, Ahtu Trihangga, dan Keleng Ukur dalam Wiratno (2013: halaman 97-109). Dinyatakan bahawa restorasI bukan hanya sebuah program penanaman dan menjaga, tetapi juga sekaligus mengamankan kawasan taman nasional.

Tahun 2013, OIC mulai masuk dengan program restorasi dengan pendekatan yang sama di dekat areal ini, juga dimulai dengan luasan yang kecil, sekitar 73 hektar, di areal yang sebenarnya belum aman benar tetapi masih terdapat perambahan oleh masyarakat. Hal ini yang cukup menarik dan sekaligus menantang untuk dapat diselesaikan secara bersama, sambil membangun kesadaran bersama-sama.

2.1. Tantangan Saat Ini

Berdasarkan kajian Ujang Wishnu Barata (komunikasi pribadi, Juli 2013), disampaikan bahwa Tangkahan saat ini dalam situasi yang terancam. Setidaknya ada dua titik lokasi yang berpotensi memberikan pengaruh negatif bagi keberlanjutan praktik ekowisata di Tangkahan.

Tekanan yang luar biasa dari wilayah Sekoci dan Sei Lepan saat ini sudah mengarah ke Cinta Raja di sebelah Selatan (dan berdekatan dengan Tangkahan) serta ke Sei Betung di sebelah Utara (dan berdekatan dengan perbatasan Aceh). Sementara dari arah Sei Glugur (yang juga berbatasan dengan wilayah Bukit lawang) di Selatan Tangkahan, aktifitas *illegal logging* meskipun dalam skala kecil masih dijumpai. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh cukong lahan dan pemain kayu di sekitar Sei Serdang dan Namu Sialang untuk melempar isu iming-iming pembukaan lahan. Bahkan, keberhasilan restorasi di Cinta Raja belum cukup kuat untuk menahan tekanan dari "Utara" (Sekoci – Sei Lepan dan sekitarnya). Hal inilah yang mendasari bahwa konsep integrasi wilayah Tangkahan-Cinta Raja melalui paket-paket wisata dan penelitian adalah sangat penting untuk membentengi dan memberikan "perlawanan" terhadap tekanan dari "Utara" tersebut.

Sungai di tangkahan *sumber foto : YOSL-OIC*

Peta kawasan rawan konflik di Taman Nasional Gunung Leuser

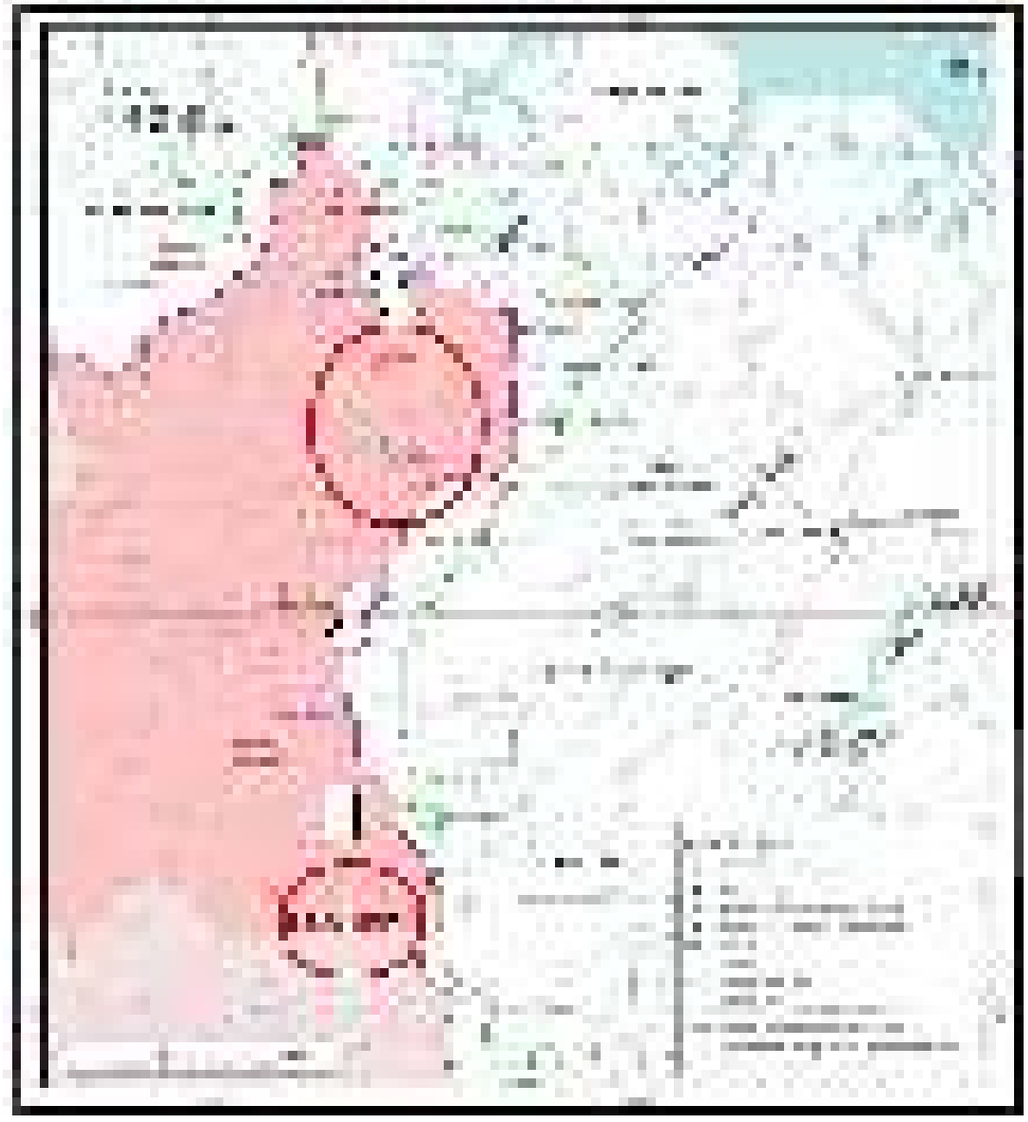

Bulatan merah menunjukkan lokasi konflik. Makin besar bulatan, makin besar intensitas dan tekanan akibat konflik / permasalahan tersebut. Tanda panah menunjukkan arah tekanan ke lokasi lain di sekitarnya.

Selain itu, permasalahan banyaknya pal batas yang hilang, rusak atau berpindah di wilayah Resort Tangkahan dan sekitarnya juga cukup berpotensi mengganggu keutuhan kawasan. Eksistensi kawasan terancam oleh para oportunis yang lapar lahan. Masyarakat sangat menunggu mengenai kejelasan batas ini. Ketegasan mengenai permasalahan batas dan dukungan berupa investasi, pendampingan, dan implementasi program-program untuk peningkatan kegiatan wisata yang konsisten menunjukkan keberpihakan yang nyata dari pemangku kawasan kepada masyarakat. Hal inilah yang sangat ditunggu masyarakat Tangkahan melalui konsep ekowisata mereka.

Tekanan lain adalah dari aktifitas wisata di Bukit Lawang. Ketidaknyamanan yang mulai dirasakan pengunjung di Bukit Lawang meninggalkan cerita berantai bahwa di lokasi yang berdekatan, suasana yang jauh lebih aman dan nyaman bisa didapat. Fenomena ini harus segera diantisipasi oleh Tangkahan agar "eksodus" pengunjung dari Bukit Lawang ke Tangkahan yang masih membawa mental-perilaku *mass tourism*, sebatas "penikmat alam" bukan "pencinta alam" tidak memberikan dampak buruk bagi kawasan.

2.2. Solusi untuk Leuser

Tanpa dukungan seluruh jajaran di BBTNGL, dan para mitra, serta komitmen pemerintah kabupaten, khususnya delapan kabupaten yang berbatasan dengan Leuser, maka upaya-upaya untuk melindungi TNGL akan semakin berat. Tangkahan, kemungkinan besar akan bertahan sebagai "sosial buffer", sebagaimana akan diuraikan dalam Bagian Tiga dan seterusnya dalam buku ini. Namun, sebagaimana diuraikan oleh Ujang Wishnu Barata di atas, menunjukkan betapa Tangkahan juga terus mengalami tekanan dari berbagai pihak lain yang tidak mendapatkan manfaat dari Tangkahan. Baik dari arah Selatan maupun Utara. Program-program kerjasama jangka panjang dengan masyarakat, nampaknya bukan hanya dapat dikembangkan dari potensi ekowisata, seperti di Tangkahan, tetapi juga banyak pilihan antara lain bagaimana mengembangkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan lainnya. Misalnya, damar mata kucing di Hutan Adat Menggamat, Aceh Selatan, yang berbatasan dengan TNGL, dapat dikelola dan dipasarkan secara lestari.

Maka, Tangkahan adalah satu noktah kecil yang dapat dijadikan pembelajaran penting bagi TNGL dan bahkan bagi para pengelola taman nasional atau kawasan konservasi lainnya, di seluruh Indonesia. Bagaimana, apabila pengelola taman nasional bersedia membangun hubungan yang baik, saling menguntungkan, dan saling menghargai, dengan masyarakat setempat, tidak mustahil pada waktunya, masyarakat mendukung pengamanan, perlindungan dan pemanfaatan yang lestari serta dapat dipertanggungjawabkan. Sejak dicetuskannya ide besar di Tangkahan pada tahun 2000, kini telah 13 tahun dan selama periode itu tentu banyak sekali tantangan dan berbagai persoalan muncul. Dinamika sosial ini tentu sebaiknya direspon secara proporsional oleh pihak pengelola taman nasional, dan bahkan bagi siapapun yang peduli akan kelestarian hutan di satu sisi dan kesejahteraan masyarakat di sisi lainnya. Seperti dua sisi dari keping mata uang yang sama. Hutan lestari, masyarakat mandiri dan sejahtera.

Pepohonan di hutan Tangkahan

sumber foto : YOSL-OIC

3

(Eko)Wisata Tangkahan

sumber foto : YOSL-OIC

1. PENGELOLAAN EKOWISATA (DULU DAN SEKARANG)

1. 1. Ekowisata

Berdasarkan Ekowisata Indonesia (www.ekowisata.info), para ahli memiliki definisi yang berbeda-beda seusai dengan persepktifnya masing-masing. Apa yang disebut dengan ekowisata atau sering juga ditulis atau disebut dengan ekoturisme, wisata ekologis, ecotourism, eco-tourism, eco tourism, eco tour, eco-tour dan sebagainya. Definisi yang telah diterima luas adalah yang diberikan oleh The International Ecotourism Society (TIES) seperti diuraikan di bawah ini.

Rumusan 'ecotourism' sebenarnya sudah ada sejak 1987 yang dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sbb:

"Nature or ecotourism can be defined as tourism that consist in travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objectives of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plantas and animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in the areas."

"Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi (tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa liar, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini."

Rumusan di atas hanyalah penggambaran tentang kegiatan wisata alam biasa. Rumusan ini kemudian disempurnakan oleh The International Ecotourism Society (TIES) pada awal tahun 1990 yaitu sebagai berikut:

"Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserved the environment and improves the welfare of local people."

"Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat".

Definisi ini sebenarnya hampir sama dengan yang diberikan oleh Hector Ceballos-Lascurain yaitu sama-sama menggambarkan kegiatan wisata di alam terbuka, hanya saja menurut TIES dalam kegiatan ekowisata terkandung unsur-unsur kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan manfaat dan sekaligus melestarikan potensi sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan. Dengan kata lain ekowisata adalah kegiatan wisata alam plus plus. Definisi di atas telah telah diterima luas oleh para pelaku ekowisata.

Adanya unsur plus plus di atas yaitu kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahtraan masyarakat setempat ditimbulkan oleh :

1. Kekuatiran akan makin rusaknya lingkungan oleh pembangunan yang bersifat eksploatatif terhadap sumber daya alam.
2. Asumsi bahwa pariwisata membutuhkan lingkungan yang baik dan sehat.
3. Kelestarian lingkungan tidak mungkin dijaga tanpa partisipasi aktif masyarakat setempat.
4. Partisipasi masyarakat lokal akan timbul jika mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi *('economic benefit')* dari lingkungan yang lestari.
5. Kehadiran wisatawan (khususnya ekowisatawan) ke tempat-tempat yang masih alami itu memberikan peluang bagi penduduk setempat untuk mendapatkan penghasilan alternatif dengan menjadi pemandu wisata, porter, membuka *homestay*, pondok ekowisata *(ecolodge)*, warung dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan ekowisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka atau meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal, baik secara materiil, spirituil, kulturil maupun intelektual.

Kata Ecotourism sendiri kependekan dari Ecological Tourism yang jika di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pariwisata Ekologis. Namun pelaku pariwisata dan konservasi sejak lokakarya nasional di tahun 1996, mempopulerkan kata Ekowisata untuk terjemahan *ecotourism*, dengan tujuan untuk memudahkan pengertian banyak pihak, sehingga konsep ekowisata menjadi lebih cepat diterima masyarakat luas. Sejak saat itu istilah ekowisata menjadi lebih sering digunakan baik oleh pelaku, akademisi maupun pemerintah. Sedangkan pengertian Ekowisata Berbasis Komunitas (*community-based ecotourism*) merupakan usaha ekowisata yang dimiliki, dikelola dan diawasi oleh masyarakat setempat. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan ekowisata dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan ekowisata sebanyak mungkin dinikmati oleh masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini masyarakat memiliki wewenang yang memadai untuk mengendalikan kegiatan ekowisata. Istilah ekowisata juga dikenal di Kementerian Kehutanan dan prinsip-prinsipnya digunakan dalam penerapan pariwisata di kawasan konservasi. Namun di dalam penulisan-penulisan akademis tentang konservasi dilingkungan Kementerian Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) masih menggunakan istilah Pariwisata Alam, karena konsep ekowisata belum terlahir di Indonesia saat Undang-undang Kehutanan No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diberlakukan, dimana Undang-undang ini masih menggunakan istilah Pariwisata alam dan masih berlaku hingga saat ini.

1.2. Tangkahan di Masa Lalu

Kawasan Tangkahan pada awal abad ke 20 (tahun 1900an) merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung (natur reservaat) dan hutan produksi, dimana model ladang berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kayu bakar, berburu dan lainnya merupakan bahagian dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam bingkai kearifan tradisional. Walaupun begitu, beberapa pengusaha dari luar memulai pengelolaan kayu pada era 1930an melibatkan penduduk lokal sebagai tenaga kerja (generasi pertama). Proses pengelolaan kayu dilakukan dengan menggunakan alat tradisional, diangkut ke tepi sungai oleh beberapa ekor kerbau, dan dialirkan melalui sungai ke Tanjung Pura. Era ini merupakan langkah permulaan penduduk mencari sumber penghasilan baru selain bercocok tanam tumbuhan berumur panjang dengan pola persil. Dan pada pertengahan tahun 1960 an dimulai gelombang pengelolaan kayu (generasi kedua) yang lebih besar dengan melibatkan beberapa pemodal dari luar. Pasokan kayu tetap didistribusikan ke kota Tanjung Pura yang merupakan hilir sungai Batang Serangan. Sisa eksploitasi kayu tersebut menjadi areal perladangan masyarakat melalui SIM (surat Izin Menggarap), dan komoditi nilam

adalah salah satu komoditi unggulannya, disamping getah mayang dan jelutung yang sudah dipungut oleh penduduk dengan agen dari luar. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pembukaan areal hutan untuk perkebunan semakin luas dan ditetapkannya kawasan hutan tersebut menjadi Taman Nasional pada awal 1980 tidak mampu menghentikan aktivitas pengambilan kayu yang sudah tidak terbatas antara kawasan Hutan Produksi atau Taman Nasional. Selama puluhan tahun aktivitas pengambilan kayu sudah merupakan sistem nilai yang menjadi kebiasaan penduduk akhir 1980an. Di era tahun 1990an beberapa tokoh generasi pertama bebas dari penjara (*illegal logging*), sebahagian meneruskan aktivitasnya kembali dan sebahagian lagi menginisiatif membuka obyek wisata yang selanjutnya diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat dan pemuda di dusun setempat; Kuala Gemoh dan Kuala Buluh (Desa Namo Sialang).

Akhir 1999, tokoh-tokoh masyarakat dari desa di sekitar kawasan Tangkahan memberikan informasi yang sangat vital untuk melakukan gerakan dan mengumpulkan para wisatawan, pemandu wisata dan tokoh-tokoh masyarakat Bukit Lawang untuk mufakat merumuskan agenda bersama dalam pemberantasan *illegal logging*. Melalui proses investigasi dan konsultasi semua pihak yang terlibat, akhirnya pada Januari tahun 2000 terbentuklah Front Peduli Lingkungan Hidup (FPLH). Awal Maret tahun 2000, dilakukan aksi unjuk rasa pertama kali ke Kantor Wilayah Kehutanan Sumatera Utara di Medan dengan melibatkan puluhan wisatawan dan wartawan asing, masyarakat Bukit Lawang dan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Umum di Medan serta dukungan berbagai kelompok gerakan mahasiswa. Aksi ribuan demonstran tersebut membangunkan 29 LSM Sumatera Utara dan Aceh untuk bangkit menggugat Pemerintah dan membentuk KPLH-KEL. Departemen Kehutanan tersentak dan segera menurunkan Soeripto (Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan saat itu) untuk melakukan peninjauan langsung dengan pesawat di sekeliling Leuser dan merekomendasikan operasi gabungan di berbagai tempat secepatnya.

Operasi gabungan yang terjadi di Tangkahan, melahirkan konflik horizontal antara pelindung *illegal logging* dengan pemiliki penginapan yang ditempati para aparat pada saat operasi terjadi. Konflik yang melibatkan ratusan pemuda dari luar, secara langsung maupun tidak langsung mampu berkontribusi dalam meredam seluruh konflik yang terjadi, baik konflik tentang pariwisata maupun konflik tentang *illegal logging* itu sendiri. Dan berbagai aktivitas di Tangkahan saat itu terhenti total selama beberapa waktu. Begitu juga aktivitas FPLH di Medan dan Bukit Lawang terhenti total karena penyelesaian permasalahan telah dibawa oleh KPLH_KEL melalui proses litigasi dan peradilan. Sementara itu Kepala Balai TNGL saat itu (Ir. Adi Susmianto,MSc) menginisiatif suatu strategi baru kepada masyarakat sekitar hutan melalui konsep "Hutan A dikelola oleh Masyarakat Desa A" bersama-sama dengan Balai TNGL secara legal formal.

Kebangkitan Pariwisata kembali bermula dan dipelopori oleh Pemuda dan Pemudi di Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang yang menginginkan perubahan sosial dan ekonomi, obsesi modernisasi melalui pengembangan pariwisata maka dibentuklah Tangkahan Simalem Ranger pada 22 April 2001 sebuah perkumpulan yang mempelopori pengembangan bukan hanya sungai tetapi juga hutan sebagai tempat pariwisata seperti di Bukit Lawang. Mereka menuntut berbagai aktivitas-aktivitas pembalakan kayu dan perambahan (yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri) harus dihentikan. Merekapun menggunakan pendekatan budaya Batak Karo, dimana gerakan pemuda - pemudi tersebut kemudian berubah menjadi sebuah gerakan sosial di desa Namo Sialang dan desa Sei Serdang. Mereka aktif dalam aktivitas sosial desa, membantu musyawarah maupun berbagai kegiatan adat seperti pesta pernikahan maupun kematian. Dalam budaya adat Batak Karo dikenal anak buluh yaitu kelompok anak-anak yang secara sosial membantu orang tua dalam pekerjaan dan kegiatan adat. Pendekatan ini ternyata jitu, karena pada akhirnya melibatkan berbagai lapisan masyarakat, menarik simpati kalangan orang tua, khususnya ibu-ibu dan mereka berhasil mendorong terciptanya sebuah gagasan baru. Dan gerakan ini mempengaruhi banyak pola pikir baru masayarakat tentang nilai-nilai keorganisasian.

Tanggal 19 Mei tahun 2001 merupakan momen penting dalam sejarah Tangkahan, atas inisiatif Tangkahan Simalem Ranger berkumpullah pemimpin-pemimpin kelompok penebang, perambah dan tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat Desa Namo Salang dan Desa Sei Serdang yang terlibat konflik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pertemuan yang melelahkan, pada akhirnya para tokoh bersepakat dan memilih untuk mengembangkan Pariwisata. Pertemuan ini juga

menetapkan beberapa tokoh sebagai Dewan Pengurus. Dan musyawarah ini kemudian disebut sebagai Kongres I Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) dengan melalui proses pemungutan suara untuk memilih Dewan Pengurus, AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) dan menyusun dasar-dasar pengembangan pariwisata. Dan hari itu disebut sebagai Kongres Pertama serta merupakan tonggak penting dalam pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser dikemudian hari yang diinisiasi oleh masyarakat sekitar hutan. Dan merupakan prestasi pemuda - pemudi lokal yang tergabung dalam Tangkahan Simalem Ranger yang saat itu hanya berpikir sederhana tentang pariwisata dimana mereka bisa terlibat dan bukan pada aspek luas lainnya.

Visitor Centre di Tangkahan *Sumber foto : YOSL-OIC*

Seiring waktu berjalan, karena objek wisata yang cukup menarik semua terdapat di dalam Taman Nasional, maka Lembaga Pariwisata Tangkahan menyepakati sebuah bentuk kerjasama melalui nota kesepakatan (MoU/*memorandum of understanding*) dengan Balai Taman Nasional Gunung Leuser dan ditandatangani pada 22 April 2002 oleh Kepala Balai TNGL saat itu (Ir. Awriya Ibrahim,MSc) selaku pemangku Kawasan untuk memberikan hak kelola Taman Nasional kepada masyarakat Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang melalui Lembaga Pariwisata Tangkahan (Bapak Njuhang Pinem) sebagai ketua umum. Penandatanganan MoU tersebut merupakan hal yang cukup berani dilakukan pada saat itu karena merupakan suatu *property right* (Aset kolektif) seluas kurang lebih 17.500 ha zona inti TNGL (batas administratif desa) untuk pengembangan Ekowisata. Dan sebagai kewajibannya masyarakat desa Namo Sialang dan masyarakat desa Sei Serdang bertanggung jawab penuh di dalam pengamanan dan kelestarian Taman Nasional Gunung Leuser yang berbatasan dengan wilayah desa tersebut. Seiring waktu berjalan kekhawatiran banyak pihak tentang penandatanganan tersebut tidak terbukti, malah dapat menjadi momen penting di TN Gunung Leuser selanjutnya untuk menginisiasi kolaborasi manajemen sebelum diterbitkannya Pp.19 / Tahun 2004 tentang Kolaborasi Manajemen kawasan KPA dan KSA. Kini kebijakan tersebut telah menjadi acuan dan diadopsi dalam membangun berbagai sistem dan strategi pengembangan kawasan konservasi baik di tingkat nasional dan internasional.

Akan tetapi, proses penandatangan MoU tersebut bukan dapat secara langsung menghentikan berbagai aktivitas *illegal logging*, perambahan maupun aktivitas perusakan sumber daya alam lainnya saat itu. Akan tetapi masih merupakan proses yang dihiasi oleh konflik demi konflik di tingkat lokal, hingga dilakukan beberapa kesepakatan secara formal dan informal serta beberapa komitmen sosial. Dan sepanjang tahun 2002 merupakan masa yang paling sulit dalam beberapa waktu berjalan untuk proses penyesuaian dan integrasi sosial antara LPT dengan berbagai kelompok-kelompok lain. Hingga dicapai kesepakatan untuk melaksanakan Kongres ke II pada awal tahun 2003. Dan dukungan berbagai pihak diundang untuk membantu proses pengembangannya; seperti Kelompok – kelompok Pecinta Alam, Pramuka, Organisasi Non Pemerintah dan para mahasiswa mahasiswa dari berbagai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk membantu masyarakat. UML dan INDECON membantu dalam perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Desa (RIPPDES) dan peningkatan kapasitas Tangkahan Simalem Ranger dalam pelayanan pariwisata, dasar-dasar konservasi, identifkasi keanekaragaman hayati, monitoring serta meningkatkan kapasitas keorganisasian LPT. Sementara itu Fauna Flora Internasional melakukan program patroli gajah untuk mendukung pengamanan kawasan. Disamping peranan utama dari Balai TNGL dan Dinas Kehutanan, serta Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat.

Kongres LPT ke II tahun 2003, merupakan momen bersejarah karena merubah LPT sebagai organisasi terbuka untuk seluruh masyarakat di dua desa, dimana seluruh penduduk adalah merupakan anggota LPT yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dimana di dalam proses restrukturisasi, Tangkahan Simalem Ranger masuk menjadi salah satu Departemen LPT. Pemuda-pemuda dan tokoh sosial yang berpengaruh terpilih sebagai kepengurusan untuk tahun 2003-2006.

Dan dirumuskannya XIX BAB dan 55 pasal Peraturan Desa tentang Undang-undang Kawasan Ekowisata Tangkahan yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan sosial, pelestarian sumber daya alam, ekonomi lokal, peranan pemuda, adat, agama dan penataan ruang kawasan dalam pengembangan ekowisata. Dan peraturan desa ini merupakan peraturan desa pertama yang disusun secara partisipatif yang mengatur tentang konservasi dan pranata sosial secara langsung, sebelum diadopsi ke banyak tempat. Dan tahun 2003 juga ditandai dengan penandatangan pembahagian PERMIT/SIMAKSI (PNBP) antara Kepala Balai TNGL saat itu (Ir. Hart Lamer Susetyo) dengan Ketua Umum LPT Periode 2003-2006 (Bp. Njuhang Pinem) dan juga dukungan pembangunan fisik dan sarana prasarana yang pertama kali dilaksanakan. Disamping dukungan dari INDECON, FFI dan UML serta berbagai NGO dan Pemkap Langkat.

Dan awal tahun 2006, ditandai dengan Kongres ke III LPT, penandatangan MoU tahap ke II yang merupakan penguatan daripada MoU 22 April 2002 ditandatangani pada 23 Juli 2006 antara Kepala Balai TNGL (Ir. Wiratno,MSc) dan Ketua Umum LPT (M.Tanden Bangun). Dimana berdasarkan P.19 / 2004 LPT secara kolaborasi dapat memanfaatkan berbagai jasa lingkungan dari TNGL. Dan LPT membentuk Badan Usaha Milik Lembaga (BUML) untuk mengelola jasa lingkungan tersebut. Dan dimulailah era integrasi antara ekonomi dan ekologi di kawasan Ekowisata Tangkahan dalam semangat kolaborasi untuk melahirkan gelombang besar perubahan di TN Gunung Leuser.

(http://gunungleuser.or.id/oldweb/sejarah_kawasan_ekowisata_tangkahan.htm).

Melalui pengelolaan partisipatif semacam ini, konservasi menjadi dambaan warga sekitar. Masyarakat yang diberdayakan secara aktif memiliki rasa memiliki *(sense of belonging)* yang tinggi. Mereka bukan lagi sekedar penonton atau pihak yang 'diperdaya'. Dengan mengakui hak dan kepentingan mereka sebagai pemangku alam, rasa tanggung jawab muncul, maka terjadilah sinergi atas kelestarian lingkungan dan peningkatan kemakmuran rakyat.

Bila seluruh hutan Indonesia mengalami nasib baik seperti ini, pasti Indonesia tidak akan duduk di peringkat ketiga dunia sebagai penghasil emisi terbesar dari pengalihan fungsi hutan.

1. 3. Tangkahan Saat Ini

Tangkahan di 2013 jauh berbeda dengan masa awalnya di 1999-2000. Saat ini, telah berdiri dan beroperasi sembilan ecolodge, Jungle Lodge, Mega Inn, Green Lodge, Linnia Resort, Ulik Sabar Inn, Gajah Lodge, Masta Inn dan Tangkahan Inn. Tentu, sarana penginapan tersebut berkembang seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Tangkahan. Pencarian di mesin Google, menunjukkan hasil 10.400 temuan terkait dengan Ekowisata Tangkahan, hanya dalam waktu 0,22 detik. Hal ini menunjukkan, betapa Tangkahan begitu terkenal di dunia maya, dan informasi berbiak menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan kecepatan per detik.

1.3.1. Lembaga Pariwisata Tangkahan

Sejarah terbentuknya Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) diuraikan secara detil oleh salah satu pencetus ide dan penggeraknya, yaitu Saiful Bahri, sebagaimana diuraikan dalam boks berikut :

Berdirinya Lembaga Pariwisata Tangkahan

- *Ir. Adi Susmianto selaku kepala Balai TNGL masa itu (akhir 1999) dengan berbagai tekanan demonstrasi/media yang menuntut penindakan tegas terhadap berbagai aktivitas perambahan dan ilegal logging melakukan Operasi Gabungan di Kecamatan Batang Serangan (Tangkahan), dan untuk pertama kalinya isu kerusakan Leuser menjadi agenda nasional.*
- *Ketika upaya law enforcement tidak efektif membendung degradasi hutan, maka Pak Adi Susmianto meletakan fondasi dasar kerjasama dengan masyarakat lokal/desa sebagai fokus utama (2000-2001). Ir.Awriya Ibrahim (pengganti Kepala Balai TNGL) melanjutkan upaya kerjasama yang lebih formal melalui sebuah MoU dengan masyarakat lokal untuk pemanfaatan hutan (ekowisata) dengan batas teritorial (wilayah administrasi desa) bersama Pemerintah Kabupaten Langkat (Ir.Azwar Pane, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan). Dan di tingkat masyarakat pemuda/pemudi telah membentuk Tangkahan Simalem Ranger (22 April 2001) dan di tingkat orangtua (pelaku illegal logging dan perambahan) telah membentuk Lembaga Pariwisata Tangkahan (19 Mei 2001) melalui mekanisme Kongres (I).*

- *Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 22 April 2002 (hari Bumi) ditanda tangani naskah Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser UPT Dephut RI Ir. Awriya Ibrahim dengan Ketua Umum Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) Bpk. Njuhang Pinem sebagai bentuk ikatan legal formal dimulainya sebuah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam mengelola hutan negara".*
- *Pada September 2002, Bpk Ary.S.Suhandi dari Indonesia Ecotourism Network (INDECON) difasilitasi oleh Unit Management Leuser melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Desa (RIPPDES) secara partisipatif, dan disosialisasikan di Pemerintah Kabupaten Langkat dimana hal tersebut menjadi dasar dan titik tolak pengembangan Kawasan Ekowisata Tangkahan selanjutnya.."*
- *Pada Januari 2003, Fauna dan Flora Internasional (FFI) berkerjasama dengan Balai KSDA, Balai TNGL dan Lembaga Pariwisata Tangkahan melaksanakan program Conservation Respons Unit (CRU) yang merupakan program monitoring kawasan, pengamanan dan penyuluhan masyarakat, dengan menghadirkan gajah-gajah yang dipinjamkan dari Unit Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh... "*
- *Pada Maret 2003, Lembaga Pariwisata Tangkahan melaksanakan agenda Kongres ke II, yang merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Perencanaan Kawasan (GBHPK), Restrukturisasi Organisasi, Revisi AD/ART dan menyusun pasal demi pasal Peraturan Desa tentang Undang-undang Kawasan Ekowisata Tangkahan dengan sangat demokratis dan partisipatif. Dan hasilnya disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa, Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang. Selanjutnya hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dan Balai TNGL sebagai bahan acuan berbagai peraturan dan ketentuan lainnya.."*
- *Pada Agustus 2003-2004, Indecon bekerjasama dengan Lembaga Pariwisata Tangkahan dan Balai TNGL melaksanakan program penguatan kapasitas masyarakat dalam pelayanan pariwisata, pengembangan produk, pemasaran, monitoring dan keorganisasian yang difasilitasi pendanaannya oleh program CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund).."*

- *Pada awal Oktober 2003, Ir.Hart Lamer Susetyo (kepala Balai TNGL) menandatangani perjanjian kerjasama pembahagian surat ijin masuk kawasan konservasi (Simaksi) dengan Lembaga Pariwisata Tangkahan dan mendukung berbagai program pelestarian dan fasilitas pengembangan ekowisata .... " Selain itu, Balai TNGL juga mengeluarkan perizinan pengembangan Bumi Perkemahan seluas dua hektar, untuk mendukung pengembangan produk wisata dan bina cinta alam bagi generasi muda.."*
- *Awal Februari 2004, dilaksanakan peluncuran secara resmi produk Pariwisata Tangkahan ditandai dengan kehadiran Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Ibu Myra Gunawan, MSc yang disambut secara adat dan juga dilaksanakan temu wicara dengan masyarakat..."*
- *Dengan kerjasama berbagai pihak, dan dukungan Balai TNGL dan Pemerintah Kabupaten Langkat, proses pengembangan ekowisata Tangkahan telah menampakkan hasilnya sebagai destinasi Ekowisata baru dan menjadi daerah kunjungan bagi wisatawan domestik dan mancanegara, dan kunjungan utusan dari UNESCO ke Kawasan Ekowisata Tangkahan menandai ditetapkannya Taman Nasional Gunung Leuser sebagai World Heritage Site.."*
- *Pada tanggal 27 September 2004, Lembaga Pariwisata Tangkahan mendapatkan Piagam Penghargaan Inovasi Kepariwisataan Indonesia, dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak I Gede Ardika.*
- *Pada tanggal 5 Oktober 2007, Lembaga Pariwisata Tangkahan telah ditetapkan dengan Akte Notaris, Nomor 09.*

Sejak tahun 2009, Balai Besar TN Gunung Leuser (BBTNGL) mulai tertib menarik karcis masuk, baik bagi pengunjung dalam negeri sebesar Rp 2.500,- dan wisatawan manca negara sebesar Rp 20.000,-. Berdasarkan karcis masuk yang diperoleh, diketahui bawah sejak tahun 2009-2012, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Tangkahan adalah sebagai berikut : tahun 2009 (877 orang), tahun 2010 (1.539), tahun 2011 (2.409 orang) dan tahun 2012 (2.755 orang). Total pengunjung selama 4 tahun sebanyak 7.580 wisatawan mancanegara. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2012, jumlah wisatawan mancanegara

meningkat 214% dibandingkan dengan tahun 2009. Maka selama 4 tahun, Tangkahan sudah menyumbangkan kepada negara sebesar Rp 151.600.000,-

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Harian Lembaga Pariwisata Tangkahan, 80% wisatawan mancanegara tersebut memilih kegiatan *elephant trekking*. Sedangkan pengunjung lokal, biasanya hanya *tubbing* atau bermain-main di Sungai Buluh dan hanya sedikit saja yang masuk ke dalam kawasan TN Gunung Leuser. Namun demikian, jumlah pengunjung lokal ini dapat mencapai ribuan pada hari-hari libur dan hari besar keagamaan, sehingga dampak ekonominya cukup tinggi dalam menggerakkan ekonomi mikro khususnya warung makan, minum, dan penyewaan ban untuk *tubbing*.

Saat ini, untuk 1 jam menikmati hutan Leuser sambil berpatroli dengan gajah *(elephant trekking)*, dikenakan biaya Rp 650.000/orang. Apabila diasumsikan 80% wisatawan mancanegera memiliki paket patroli gajah ini, maka selama 4 tahun, pihak pengelola *elephant trekking* memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp 394.160.000 (6.064 orang x Rp 650.000,), selama 4 tahun atau rata-rata sebanyak Rp 98.540.000,- per tahun.

Apakah wisatawan manca negara menikmati Tangkahan? Inilah salah satu kesaksian atau testimoni wisatawan dari Inggris bernama Thomas Arnold dan Chloe White Devon, yang diemail ke : tangkahanecotourism.com :

Had a lovely stay here in wonderful Tangkahan. Upon arrival the staff were all very welcoming & helpful. The elephant trekking and bathing was an amazing exprience, lovely to see how well looked after the elephants are. Tangkahan really in a jungle paradise, will definately be returning here some day. Thanks again for every one for making our time here so special.

Trekking dengan gajah ini juga menawarkan paket Tangkahan-Bukit Lawang, yang memerlukan waktu 4 hari (3 malam) dengan biaya 550 Euro Rp 8.000.000,-) per orang. Tentu dengan mendapatkan pengalaman tidur di hutan atau *night safary* dengan segala tantangannya. Untuk paket panjang ini, para wisatawan bisa mengontak pihak pengelola melalui *www.elephantjunglepatrol.com*. Sayang sekali, dari 8 ekor gajah, hanya 3 ekor yang siap untuk paket Tangkahan-Bukit Lawang dan 5 ekor untuk patroli jarak pendek. Menurut Ruth, Ketua Harian LPT, penambahan gajah ini sangat diharapkan, untuk memenuhi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tersebut.

Elephant Trekking *sumber foto : YOSL-OIC*

Dari diskusi dengan Edy-*Elephant Trekking* dan Ruth, tentang prospek Tangkahan, mereka menyampaikan pendapatnya seperti ini:

"Makin lama makin naik tamunya tapi trend ecotourism berubah ke mass-tourism, apalagi pada hari-hari besar biasanya di pantai Sei Buluh. Jumlah pengunjung di Tahun 2011 sekitar 38.000 orang sedangkan di Tahun 2012 sekitar 41.000 orang. Hari Raya dan Tahun Baru saja bisa mencapai 8.000 an pengunjung/hari. Ya mereka main-main situ saja tapi dan perekonomian di sini bergerak. Ya..mereka pulang hari kebanyakan tidak menginap. Untuk prospek ke depan grafik meningkat. Booking dari luar ke Community Tour Operator (CTO), satu bagian yang berada di bawah naungan LPT, Selama kita masih terapkan manajemen satu pintu maka masih bagus. Yang menarik karcis pengunjung adalah petugas LPT. Seluruh permit ditandatangani Kepala Seksi. Untuk wisatawan manca negara, ditarik pungutan sebesar Rp 30.000,- dimana Rp 20.000,- disetor untuk ke BB TN Gunung Leuser sebagai PNBP dan yang Rp 10.000,- untuk LPT.

Terima kasih untuk teknologi informasi yang sangat membantu promosi Tangkahan. Beberapa website dapat dikunjungi, seperti :

www.indonesiatravelonline.com/medan/medan-tour/tangkahan-eco-tour4d.html;www.naturalguide.org/ng_recommended_detail.asp?idrecomm=238&cat=109;

www.sumatraecotourism.com/tangkahan/index.html;

www.lombokmarine.com/ tangkahan-nature-reserve.htm;

bahkan foto-foto Tangkahan dapat dinikmati dari koleksi Pamela dari *Australiatravel.webshots. com/album/55822 0008eKUdnh*

Tangkahan sebagai magnet bahkan telah menarik Jaringan Radio Komunitas Indonesia, cabang Sumatera Utara untuk merencanakan membuat Radio Komunitas Tangkahan. Alasan perlunya dibangun jejaring radio komunitas, sebagaimana dikutip dari *www.jrkisumut.wordpress.com,* sebagaimana dapat dibaca latar belakang dukungan mereka, dalam box berikut.

Jaringan Radio Komunitas Tangkahan
Pengembangan sebagai kawasan ekowisata Tangkahan ini berjalan cukup panjang dan membutuhkan proses pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat sekitar yang pasang surut juga. Meskipun telah berjalan tidak kurang dari tiga belas tahun, tidak membuat warga sekitar secara masif mengerti dan sadar akan pengelolaan wisata yang berbasis pelestarian secara berkelanjutan ini. Kebutuhan ekonomi yang kian hari semakin meningkat membuat warga rentan terhadap perilaku yang justru akan merusak tatanan nilai yang selama ini telah tertanam, khususnya tentang pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan alam ini demi generasi yang akan datang. Keterbukaan wilayah ini akan pengunjung dari luar sedikit demi sedikit telah menggerus kearifan dan nilai-nilai budaya lokal yang selama ini terjaga secara turun temurun. Kebebasan media khususnya televisi turut andil dalam membentuk karakter masyarakat menjadi materialis.

Seni budaya setempat lambat laun mulai bergeser dan terpengaruh oleh budaya luar. Sangat sedikit ruang bagi warga untuk mengekspresikan dirinya dalam upaya melestarikan dan mengembangkan seni budayanya. Dalam kondisi yang serba dilematis ini, sangat diperlukan suatu gerakan masyarakat untuk merubah keadaan ini menuju perbaikan secara menyeluruh, yakni perubahan ekonomi yang berbasis pada kearifan budaya local yang mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi anak cucu.

Oleh sebab itulah bersama Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Sumut, sejumlah warga dan tokoh masyarakat mulai menggagas pendirian Radio Komunitas di kawasan Tangkahan ini. Radio Komunitas Tangkahan tidak hanya sekedar menyiarkan hiburan semata, akan tetapi akan turut membangun pemahaman dan penyadaran pendengarnya untuk bergerak bersama melakukan aksi-aksi realt menjawab persoalan yang ada. Selain itu radio komunitas Tangkahan diharapkan mampu menjadi media pendidikan dan perekat warga dalam mengerakkan perubahan untuk kembali melestarikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal di tengah arus globalisasi yang kian hari semakin menggilas sendi-sendi kehidupan baik secara ekonomi, politik dan kebudayaan. Secara khusus radio komunitas ini akan menjadi pusat informasi, pendidikan dan gerakan perubahan masyarakat di Kawasan Tangkahan dan masyarakat sejangkau siar umumnya.

1.3.2. Pola Kunjungan

Pola kunjungan wisatawan mancanegara ke Tangkahan digambarkan dalam grafik di bawah ini. Kondisi tahun 2010, sebanyak 1.539 wisatawan mancanegara (wisman) menikmati Tangkahan, dengan puncak kunjungan *(peak season)* terjadi selama 4 bulan yaitu sejak Juli hingga September. Sedangkan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 856 orang, dengan puncak kunjungan pada bulan Januari dan terus menurun sampai di akhir tahun. Data wisatawan nusantara ini adalah wisnus yang masuk ke dalam taman nasional. Sedangkan wisnus yang hanya bermain-main di sekitar Sungai Buluh yang jumlahnya ribuan orang di hari-hari besar, tidak dikenakan tiket masuk sehingga tidak tercatat.

Grafik: Distribusi kunjungan Wisnus dan Wisman Tahun 2010

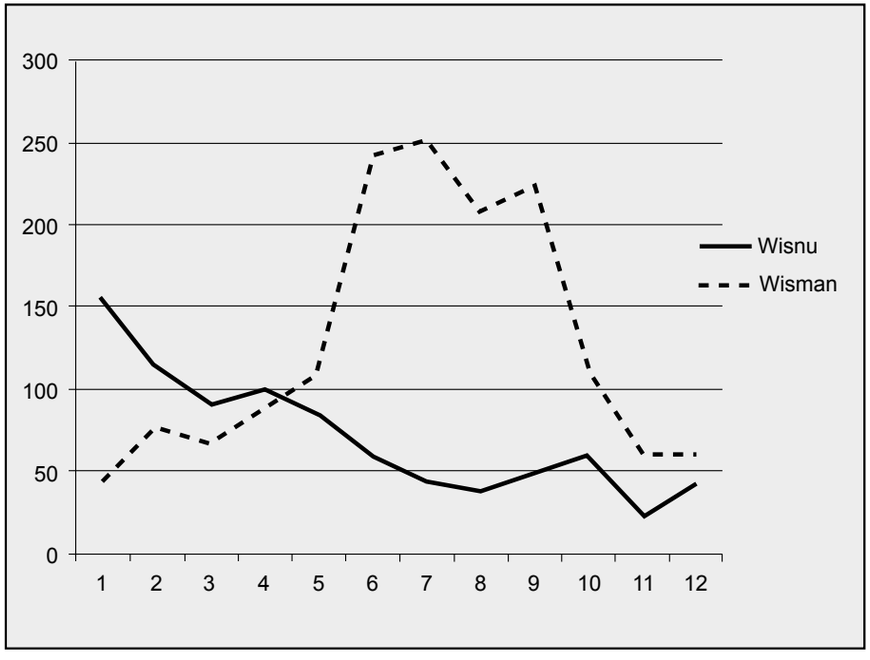

Sumber: Analisis data (BB TN Gunung Leuser, 2013)

1.3.3. Potensi Penelitian

Setelah hampir 13 tahun dikembangkannya Tangkahan sebagai lokasi yang dikenal sebagai tempat berwisata alam, maka banyak pihak yang mulai tertarik untuk melakukan penelitian. Data yang tercatat di BBTNGL, mengungkapkan bahwa sejak 2010-2011, telah dilakukan sebanyak 7 judul penelitian, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel: Penelitian di Tangkahan (2010-2011).

Tahun	No	Atas Nama	Judul Penelitian	Asal Pemohon
2010	1	Asnah, dkk	Penelitian Magister Sains dengan Judul, "Inventarisasi Jamur Makroskopis di Kawasan Ekowisata Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser".	Program Studi S2 Biologi USU
	2	Eling Tuhono	Penelitian Magister Sains dengan Judul, "Analisis Vegetasi dan Pendugaan Karbon Tersimpan Pada Tegakan Hutan di Kawasan Ekowisata Tangkahan, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat".	Program Studi S2 Biologi USU
	3	Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS., dkk	Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan USU dengan tema "*Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Hutan Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera Utara*".	Pasca Sarjana USU
	4	Ir. Achmad Jauhar Arief, M.Sc, dkk.	Penelitian dengan judul "*Monitoring Climate Change*".	Tim LIPI
2011	5	Elsi Kurnia Sari, Ricky Dharmawan Triatmojo, Delcia Septiani	Penelitian dengan Judul, "Pengembangan Potensi Wisata Alam di Kawasan Ekowisata Tangkahan di Sekitar TNGL".	Jurusan Kehutan, Fak. Pertanian, Universitas Sumatera Utara
	6	Maurin Lis Evan Panggabean	Penelitian dengan judul "Pendugaan Cadangan Karbon *Above Ground Biomass* (AGB) Pada Tegakan Hutan Alam di Kabupaten Langkat"	USU
	7	Maria Joao Palermo De Faria Amaral, Abdulrokhman Kartonegoro, S.Si	Penelitian "*Genomic footprints of adaptation and diversification in tropical stone oaks (Lithocarpus; Fagaceae)*".	Peneliti WN. Portugal

Sumber: Balai Besar TN Gunung Leuser (2013).

Selain hasil-hasil penelitian di atas, Leuser juga merupakan habitat bunga terbesar di dunia, yaitu bunga Rafflesia. Ir.Agus Susatya, PhD sebagai Dosen di Universitas Bengkulu, dalam penelitian yang fokus pada salah satu flora penting yaitu rafflesia, telah membuktikan kepada masyarakat Indonesia maupun Internasional, bahwa Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa. Salah satunya adalah bunga raksasa Rafflesia *spp*.

Dari 25 jenis rafflesia di seluruh dunia, 12 jenis berada di Indonesia, tersebar sepanjang jajaran Bukit Barisan Sumatera, mulai dari TN Gunung Leuser, TN Bukit Tigapuluh, Cagar Alam Batang Palupuh, Kabupaten Agam; di Jawa dapat dijumpai di TN Gunung Gede Pangrango, CA Semenanjung Pangandaran, TN Meru Betiri; di Kalimantan di CA Gunung Raya dan TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Kayan Mentarang.

Ir. Agus Susatya PhD dalam seri penelitian untuk S3nya telah menemukan 2 jenis rafflesia baru, yaitu: (1) *Rafflesia bengkuluensis*, di Talang Tais, Bengkulu, dan *Rafflesia lawangensis*, di Bukit Lawang TN Gunung Leuser. Jadi sangat mungkin, di Tangkahan yang tidak jauh dari Bukitlawang, juga akan ditemukan *Refflesia lawangensis* tersebut. Kalau benar, bisa ditemukan di wilayah Tangkahan, akan menjadi salah satu obyek wisata alam baru dan sangat diminati oleh wisatawan dari manca negara. Eksplorasi untuk mendapatkan lokasi tumbuh dan mekarnya *Rafflesia lawangensis*, merupakan prioritas dalam rangka mengembangkan diversifikasi obyek-obyek wisata di Tangkahan.

Akhirnya, kita bisa memberikan pendapat bahwa Tangkahan bukan hanya tempat untuk berwisata alam. Tangkahan juga menarik banyak pihak untuk melakukan penelitian. Ke depan, sebaiknya beberapa agenda penelitian perlu diprioritaskan, seperti terkait dampak dari kehadiran wisatawan mancanegara dan domestik, meliputi nilai dampak ekonomi, ekologi, dan sosial budaya, khususnya yang menyangkut daya dukung *(carrying capacity)*, kepemanduan *(guiding)*, interpretasi *(interpretation)*. Untuk wisatawan lokal ini, tentu dampak ekonominya cukup signifikan, namun kita belum mengetahui dampak lingkungannya, karena jumlahnya yang bisa sangat banyak (8.000 pengunjung) dalam sehari, di masa *peak season*, di hari-hari libur atau hari besar.

Pada tahun 2006, penulis masih menjumpai seorang pemandu wisata yang memakai t-shirt dengan tulisan “Taman Nasional Bukit Lawang”. Informasi yang tentu saja tidak tepat dan cenderung bisa menyesatkan. Bukit Lawang dan Bahorok adalah sebagian kecil dari potensi dan aset wisata alam di TN Gunung Leuser, yang luasnya hampir 1 juta hektar tersebut. Visitor Center yang direnovasi oleh UNESCO dengan dana dari Pemerintah Spanyol pada tahun 2007, di Bukit Lawang, diharapkan dapat membantu untuk memberikan pemahaman kepada wisatawan manca negara, dalam memahami TN Gunung Leuser secara menyeluruh, dan memahami bahwa Bukit Lawang adalah sebagian kecil dari potensi wisata alam di TN Gunung Leuser tersebut. Persoalan di Bukit Lawang adalah bagaimana wisatawan mancanegara dapat melihat orangutan dengan cara dan prosedur yang benar. Saat ini masih ditemukan banyak masalah, antara lain pemberian pakan pada orangutan oleh *guide* yang sebenarnya dilarang, secara aturan pemerintah. Dr. Ian Singelton telah memberikan konsep bagaimana melakukan perubahan konsep pengelolaan orangutan semi liar dipadukan dengan pengelolaan wisata terbatas. Konsepsi dari Dr Ian Singelton tersebut dapat dibaca di buku yang berjudul: “Tersesat di Jalan Yang Benar; Seribu Hari Mengelola Leuser” (Wiratno, 2013). *Icon* di Bukitlawang adalah orangutan. Keunggulan Tangkahan, adalah adanya kesempatan wisatawan mancanegara untuk dapat melihat orangutan liar di dalam hutan, melalui kegiatan *jungle trekking*. Selain tentu saja mengikuti *elephant trekking* yang telah menjadi trademark Tangkahan, termasuk acara memandikan gajah-gajah di Sungai Batang Serangan. Bagi banyak pihak, terutama wisatawan mancanegara, berkesempatan memandikan gajah adalah *new and unforgetable experiences*.

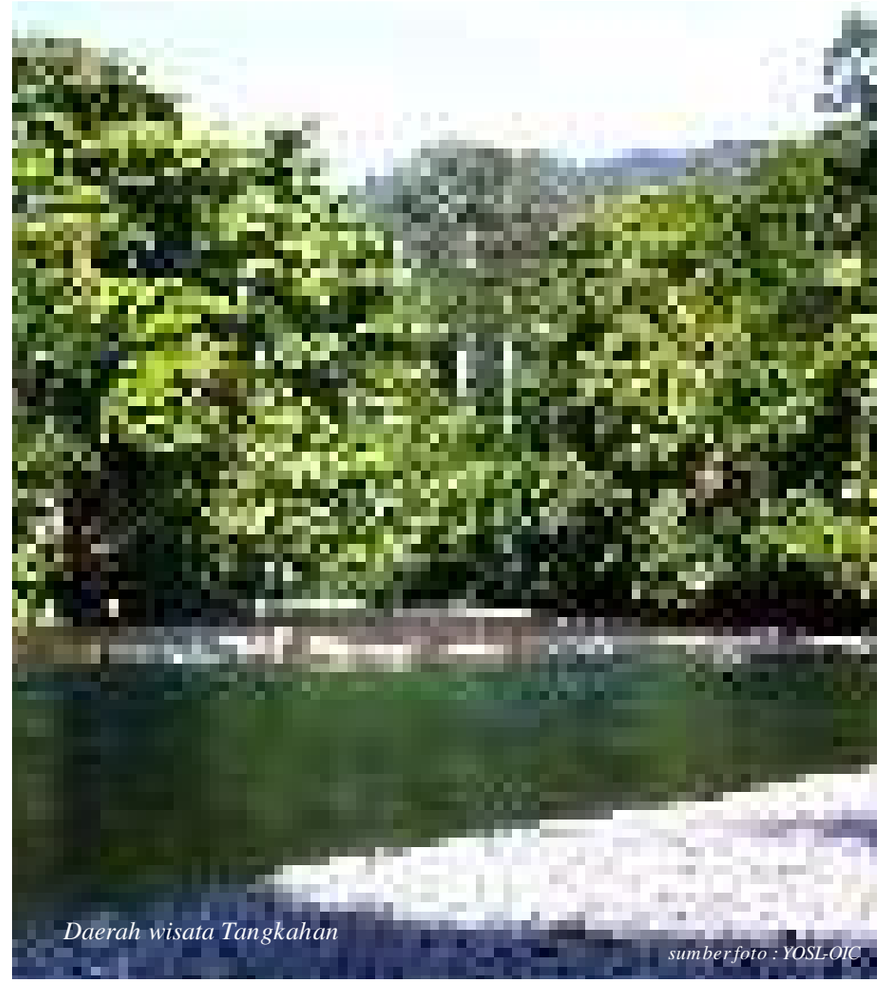

Daerah wisata Tangkahan

sumber foto : YOSL-OIC

2. Peran Tangkahan dalam Melindungi Leuser

Definisi ekowisata seperti di atas dan kelima nilai plus-plus rasanya memang itulah yang terjadi di Tangkahan. Namun demikian, Tangkahan menyimpan anomali. Memiliki sejarahnya sendiri. Bukan sekedar membangun ekowisata berbasis masyarakat, sejak dari awalnya. Tetapi adanya dukungan yang konsisten dari Balai (Besar) TN Gunung Leuser dan beberapa mitra kunci seperti FFI dengan program *elephant trekking*-nya, Indecon yang mendampingi beberapa tahun untuk disain tapak dan menyemangati Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT), untuk bergerak mendorong pengelolaan wisata dan sekaligus menjaga kawasan hutan Leuser, khususnya wilayah yang berbatasan dengan Desa Sei Serdang dan Desa Namo Sialang. Terjaga dari kerusakan dan pengrusakan, melalui program patroli oleh Tangkahan Simalem Ranger dan *elephant trekking*.

Yang tidak kalah penting adalah adanya beberapa tokoh muda yang terus melakukan upaya-upaya penguatan kelembagaan lokal dan menjaga momentum pergulatan intelektual, terutama di sepanjang awal pembentukan LPT. Intelektualisme yang diterjemahkan ke dalam banyak konsep antara lain kemandirian desa sebagai yang banyak dicita-citakan, sebagai daerah otonomi penuh. Bagaimana desa menguasai kembali sumberdaya lokal dan tidak dikendalikan oleh pihak luar, dan sebagainya. Konsep-konsep ini secara tidak langsung telah menyumbangkan, melatari dan mewarnai pola hubungan masyarakat dengan taman nasional, yang semakin harmonis dan saling bersinergi.

Maka, Tangkahan bukan sekedar penerapan konsep yang kemudian lebih dikenal sebagai *"community-based ecotourism"*. Tangkahan telah mempengaruhi pola pikir dan langkah tindak masyarakat Sei Serdang dan Namo Sialang, dalam menyelamatkan hutan Leuser di sekitar wilayah desanya. Konsep inilah yang ditawarkan oleh Pak Adi Susmianto, pada tahun 1997 kepada para pendemo yang resah karena kerusakan hutan di Leuser wilayah Sumatera Utara. Ide, gagasan, dan tawaran yang disambut baik oleh para tokoh pendiri Tangkahan saat itu, dan tetap didukung oleh Balai (Besar) TN Gunung Leuser sampai dengan saat ini. Konsistensi dukungan selama hampir 13 tahun.

Kawasan hutan di sekitar Tangkahan saat ini sudah terbebas dari aksi perambahan dan penebangan liar. Tidak ada suara *chainsaw* meraung-raung seperti terjadi di masa lalu. Balok-balok kayu yang ada di dalam hutan, sebagai hasil pembalakan di masa lalu, saat ini masih ada dan tidak ada yang berani mengangkutnya ke luar kawasan Tangkahan. Penulis menyaksikan sendiri adanya bukti-bukti itu pada waktu kunjungan ke Tangkahan tahun 2006-2007.

Yapekka (2010), dalam kajiannya tentang persoalan TNGL dikaitkan dengan peran masyarakat, menyatakan tentang pentingnya membangun "penyangga sosial" sebagai berikut :

> *Sesungguhnya, wujud nyata dari konsep 'penyangga sosial' ini telah ada dan cukup efektif mencegah terjadinya kerusakan TNGL, sebagaimana terlihat dalam proses sosial yang dilakukan sebagian penduduk Namo Sialang dan Sei Serdang. Di kedua desa ini, sekelompok penduduk yang awalnya adalah para pelaku pembalakan liar, lalu difasilitasi oleh beberapa orang luar desa yang peduli terhadap kelestarian TNGL, membentuk lembaga yang disebut Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) pada tahun 2001. Lembaga ini kemudian melakukan kolaborasi dengn BBTNGL untuk mengembangkan ekowisata di Tangkahan yang dalam perjalanan waktu terus meningkatkan jaringan kerjasama dengan beberapa LSM, misalnya Fauna and Flora International (FFI) dalam pelaksanaan Community Response Unit (CRU) melalui patroli gajah, Indonesian Ecotourism Network (INDECON) untuk pengembangan tour operator, serta YEL untuk atraksi wisata elephant trekking. LPT dan pihak-pihak yang selama ini berkolaborasi dengannya telah membalikkan keadaan, di mana kawasan hutan di Tangkahan yang semula menjadi target penebangan liar, kini menjadi salah satu area yang cukup terjaga. Keberadaan LPT pada akhirnya banyak diakui pihak luar, bahkan internasional, sebagai sebuah gerakan sosial yang mampu membentengi TNGL dari kerusakan. Bahkan, pada beberapa desa, telah tumbuh kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba mengikuti jejak LPT, seperti Relasi di Penampean dan LPSE di Kinangkong.*
>
> *Di luar masalah-masalah internal yang dihadapi kelompok-kelompok masyarakat tersebut, fenomena seperti ini membuktikan*

bahwa masyarakat, sejauh diberi peran cukup besar dalam mengelola TNGL, dapat bekerja lebih efektif dalam menjaga kelestarian TNGL. Namun, belajar kembali dari sejarah keberadaan LPT, dibutuhkan kepercayaan yang besar dan pendampingan yang intensif ketika proses sosial tersebut dilakukan.

Bukan saja kawasan Tangkahan menjadi lebih aman dan terhindar dari kerusakan, tetapi ternyata telah terjadi perubahan pola pikir dan tindakan para tokoh-tokoh penggerak Tangkahan. Hal ini tercermin dari jawaban terhadap pertanyaan kunci kepada para tokoh, sebagaimana tercantum pada Bagian Empat: Apa Kata Mereka.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Tangkahan

Ibukota Batang Serangan terletak di kelurahan Batang Serangan. Kecamatan ini berjarak sekitar 30 kilometer dari ibukota Kabupaten Langkat yaitu Stabat. Luas wilayah Batang Serangan sekitar 99.304 Ha (993,04 km2) dengan rasio terhadap total luas kabupaten 15,85%. Kecamatan ini terdiri dari 8 desa/kelurahan dengan status hukum definitif dan seluruhnya diklasifikasikan sebagai desa swasembada, yaitu: desa Sungai Musam, Namo Sialang, Sei Serdang, Sei Bamban, Batang Serangan, Kwala Musam, Karya Jadi, dan Paluh Pakih BBS. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Batang Serangan mencapai 38.842 jiwa yang tersebar pada 9.430 Kepala Keluarga atau 4,1 jiwa/KK, dengan kepadatan penduduk 39 jiwa/km (Yapekka, 2010).

Hulu sungai di daerah wisata Tangkahan *sumber foto : YOSL-OIC*

Tangkahan adalah sebuah nama tempat wisata alam, di pinggir Leuser, dimana terdapat dua desa yang berbatasan dengannya, yaitu Desa Sei Serdang dan Desa Namo Sialang. Keduanya, merupakan bagian dari delapan desa di wilayah administratif Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Membahas Tangkahan berarti juga membicarakan kondisi Desa Sei Serdang dan Desa Namo Sialang.

Ekonomi Kabupaten Langkat, secara umum digerakkan oleh sektor perkebunan. Di seluruh Langkat, luas dan produksi kebun karet rakyat cenderung stagnan, bahkan luasannya sedikit menurun dari 41.859 hektar di tahun 2002, menjadi 41.503 hektar di tahun 2008. Sedangkan produksinya sedikit meningkat dari 29.284 ton tahun 2002 menjadi 29.460 ton di tahun 2008. Hal sebaliknya justru terjadi pada perkebunan sawit rakyat. Pada tahun 2002, luas kebun sawit milik rakyat ada sekitar 41.125 hektar dengan produksi 529.951 ton. Sedangkan tahun 2008 luasnya naik menjadi 41.531 hektar dengan jumlah produksi 535.814 ton. Luasan tersebut sudah meliputi sawit yang tidak lagi berproduksi, masih berproduksi, serta yang sawit belum berproduksi. Khusus di kecamatan di sekitar TNGL, Besitang memiliki luas lahan dan produksi kebun sawit rakyat yang paling tinggi (Yapekka, 2010).

Kajian Yappeka (2010) tersebut, khususnya semakin luasnya kebun sawit milik rakyat, di atas, tidak secara tegas menjelaskan kaitannya dengan perambahan di TNGL, khususnya di wilayah Besitang, Kabupaten Langkat. Di bagian lain, Yappeka (2010) mengutip kajian pakar GIS/Remote Sensing UNESCO, Rina Purwaningsih (dikutip ulang dari Bagian I), yang menyatakan sebagai berikut :

Pada tahun 1989, luas wilayah TNGL yang terdegradasi mencapai 5.742 hektar. Di tahun 2003, luas lahan yang terdeforestasi telah mencapai 18.742 hektar. Diduga dibukanya pemukiman bagi pengungsi asal Aceh di wilayah Besitang dan sekitarnya awal 2000an menjadi kontributor terbesar degradasi hutan TNGL ini. Meskipun tahun 2009 luasan yang terdegradasi tampak menyusut menjadi 18.239 hektar, namun secara menyeluruh diperkirakan penambahan luas areal terdeforestasi di TNGL selama 20 tahun terakhir adalah 13 ribu hektar lebih.

Penulis meyakini bahwa kerusakan seluas 13 ribu hektar tersebut sebagian besar berada di Besitang, yaitu di Resort Sei Betung, Resort Sei Lepan dan Resort Sekoci, dimana masih terdapat perambahan aktif sawit, sampai saat ini, baik yang dilakukan oleh eks pengungsi Aceh maupun oleh perambah lokal, sebagaimana yang diuraikan secara terinci upaya-upaya penegakan hukumnya pada periode 2005-2007 (Wiratno, 2013; halaman 70-97).

3.1. Persepsi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tangkahan

Untuk mengetahui perkembangan sosial ekonomi masyarakat Tangkahan, pihak YOSL-OIC telah melakukan kajian sosial ekonomi masyarakat di sekitar Tangkahan melalui wawancara langsung dengan beberapa anggota masyarakat setempat. Wawancara ini dilakukan dengan melibatkan 100 responden untuk mendapat informasi secara silang *(crosscheck)* dari masyarakat setempat menyangkut tiga aspek dasar pengembangan ekowisata, yakni: aspek konservasi, aspek perekonomian, dan aspek peran masyarakat.

Pada aspek konservasi, fokus pertanyaan diarahkan kepada dua hal, yakni masalah konservasi kawasan sebagai bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan masalah keberadaan kawasan tersebut sebagai areal ekowisata.

Bagi masyarakat Tangkahan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser merupakan kawasan yang harus tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Masyarakat sangat memahami, meskipun kawasan ekowisata Tangkahan bukanlah seluruhnya masuk ke dalam wilayah TNGL, namun keberadaan kawasan ekowisata tersebut langsung atau tidak langsung sangat berperan menjaga kelestarian TNGL sekaligus membangun kawasan tempat tinggal mereka untuk tetap menjadi bagian yang utuh. Oleh karena itulah masyarakat setempat tetap berharap upaya-upaya pelestarian kawasan pendukung TNGL harus juga dilakukan sebagai bagian edukasi masyarakat untuk hidup harmonis dengan alam sekitar, karena dari survey yang dilakukan , 70% responden sangat memahami makna konservasi yang diterapkan di wilayah mereka tinggal.

Pemahaman masyarakat yang sangat tinggi terhadap konsep konservasi dapat dilihat dari hasil survey dimana 98% responden menyatakan perlunya kawasan ekowisata Tangkahan dilestarikan. Pengembangan dan pemanfaatan kawasan TNGL sebagai kawasan wisata lingkungan memang harus tetap mengacu kepada ketentuan tata ruang yang telah menetapkan zonasi kawasan. Dalam survey yang dilakukan, 91,7% responden menyatakan perlunya kawasan khusus wisata massal dikembangkan untuk mengantisipasi minat dan jumlah kunjungan. Namun di sisi lain masyarakat tetap berharap agar pemerintah dan berbagai pihak seperti LSM harus terus menerus melaksanakan berbagai upaya agar ekosistem hutan di Tangkahan dan TNGL dapat terjamin pelestarian dan keberadaannya.

Aspek peran serta/pelibatan masyarakat, menyoroti beberapa persoalan yakni, *sense of belonging,* kelembagaan, sumber daya manusia, dan peran stakeholder (TNGL) bagi pengembangan kawasan. Rasa memiliki *(sense of belonging)* masyarakat setempat terhadap kawasan ekowisata Tangkahan sebenarnya sangat tinggi, yaitu 91,7%, dan yang menyatakan tidak merasa memiliki adalah 8,3%. Kondisi ini dapat ditolerir karena sebenarnya ada 13,3% responden yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD, dan 11,7% responden tidak memiliki pekerjaan, disamping 15% responden adalah penduduk setempat yang usianya dibawah 20 tahun. Realitas ini memberi gambaran bahwa sebagian masyarakat memang masih kurang memiliki apresiasi yang baik terhadap keberadaan kawasan ekowisata Tangkahan. Apalagi kalau dilihat ada 31,6% masyarakat lokal yang menyatakan tidak pernah diajak terlibat dalam pengembangan, pengelolaan dan pengawasan kawasan ekowisata Tangkahan, padahal ada 91,7% responden yang menyatakan keinginan mereka untuk terlibat dalam pengembangan, pengelolaan dan pengawasan kawasan objek ekowisata tersebut. Keadaan ini member gambaran yang sangat gamblang bahwa ada selisih 25% yang sebenarnya sangat potensial untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan yang selama ini terabaikan. Walaupun masyarakat lokal mengakui dan menerima kehadiran LSM dalam pengelolaan kawasan Tangkahan, namun hanya 60% responden mengungkapkan dan menilai LSM telah memberi sumbangsihnya bagi pembangunan dan pengembangan kawasan Tangkahan sebagai kawasan ekowisata. 10% responden menyatakan "LSM belum" memberi sumbangsihnya, dan 30% menyatakan tidak tahu. Untuk TNGL masyarakat menilai kinerja kemitraan pihak TNGL sudah baik yakni 75%. Namun mereka juga mengharapkan aspek *attitude* kepemimpinan merupakan elemen penting yang mesti hadir di tengah-

tengah kepekaan. Untuk melihat persepsi masyarakat lokal terhadap apa yang sudah dilakukan pihak TNGL dalam aktivitas ekowisata *(hospitality)*, hasil survey menunjukkan angka 81,7% menyatakan baik. Di sisi lain 100% responden menyatakan sangat berkeinginan untuk memperoleh pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM lokal.

Pada aspek perekonomian, fokus pertanyaan diarahkan kepada beberapa hal, yakni dampak keberadaan kawasan ekowisata Tangkahan sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat, masalah infrastruktur kawasan, masalah atraksi ekowisata, dan masalah promosi kawasan ekowisata. Dalam survey yang dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat lokal terhadap keberadaan aktivitas ekowisata di Tangkahan, pada dasarnya, 90% responden mengakui memperoleh keuntungan secara ekonomi ketika aktivitas ekowisata dibuka dan semakin berkembang di Tangkahan. Perkembangan aktivitas ekowisata itu juga mendorong 61,7% masyarakat melakukan/memiliki usaha perekonomian yang berkaitan langsung dengan keberadaan kegiatan ekowisata tersebut. Sekitar 33% menyatakan tidak memiliki usaha langsung, dan hal ini sangat dapat dimaklumi, karena 30% responden bekerja di sektor formal. Begitupun, hasil survey menemukan jawaban optimis bahwa 85% responden mengakui potensi peluang usaha ekonomi sangat dimungkinkan untuk menunjang keberadaan aktivitas ekowisata di Tangkahan.

Usaha penginapan di Tangkahan *sumber foto : YOSL-OIC*

Menyinggung peluang usaha perekonomian yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menunjang perkembangan objek ekowisata, dalam wawancara yang dilakukan terungkap bahwa pemikiran masyarakat masih terfokus pada usaha/ peluang yang secara praktis untuk memenuhi kebutuhan rutinitas sehari-hari. Peluang yang mereka harapkan itu misalnya seperti membuka warung makanan/rumah makan, penginapan, cindera mata (assesoris & kaos), ataupun alat transportasi (ojek). Sementara peluang usaha yang bisa menunjang kegiatan ekowisata dan upaya pengembangan aspek-aspek konservasi secara kreatif belum terjangkau oleh daya pikir mereka. Padahal sebenarnya jika masyarakat setempat dapat berpikir kreatif dan kritis, masyarakat bisa saja mengemas berbagai bentuk kegiatan sebagai bagian dari atraksi wisata yang dapat menunjang atraksi ekowisata sekaligus sebagai bentuk pembelajaran (edukasi) dibidang konservasi.

Bentuk-bentuk kreatifitas itu sebenarnya bisa saja kegiatan yang berhubungan dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat, baik dari aspek seni budaya, maupun tradisi bertani atau bercocok tanam yang dapat dikemas menjadi atraksi wisata yang menarik, unik dan spesifik. Sebagaimana juga pernah diungkapkan oleh ketua LPT bahwa untuk bidang seni budaya, masyarakat Tangkahan sama sekali tidak memiliki perhatian dan kemampuan untuk mewujudkannya menjadi bagian dari aktifitas atraksi wisata. Disamping tema yang berkaitan langsung dengan aspek ekonomi secara praktis, sebanyak 91,7% responden termotivasi untuk meningkatkan kualitas SDM keluarga melalui pendidikan formal. Motivasi peningkatan kualitas pendidikan ini mereka alami setelah melihat cepatnya perkembangan aktivitas ekowisata di Tangkahan, baik dari segi kuantitas kunjungan, kualitas wisatawan, dan kualitas aktivitas.

Dalam rangka upaya meningkatkan perekonomian, masyarakat setempat juga tetap berusaha membangun sentra usaha cindera mata. Namun karena faktor lemahnya permodalan, masyarakat hanya mampu mengantisipasi permintaan cindera mata pada even-even tertentu.

Disamping faktor permodalan, faktor keterampilan juga merupakan hambatan tersendiri yang mereka alami. Untuk tema atraksi wisata di kawasan Tangkahan, 86,7% responden menyatakan cukup baik. Persepsi ini cukup beralasan karena kawasan ekowisata ini memang memiliki

bentang alam yang masih alami. Sumberdaya alam yang dimiliki kawasan Tangkahan memang merupakan modal besar yang masih dapat terus dikembangkan dan dapat dieksplorasi sesuai kapasitas yang terukur. Optimisme ini juga memerlukan perencanaan ulang justru ketika 90% responden memilki persepsi yang sangat baik terhadap atraksi gajah. Keberadaan gajah yang semula difungsikan sebagai sarana patrol keamanan hutan, kini dapat dialih gandakan fungsinya secara lebih profesional lagi sebagai bagian dari atraksi yang paling diminati wisatawan.

Di bidang infrastruktur, meskipun 75% responden menyatakan cukup baik, namun perlu untuk mendapat perhatian yang serius. Sebagian masyarakat menginginkan infrastruktur jalan menuju kawaan ekowisata sangat perlu dibenahi agar kelancaran lalu lintas dapat memperlancar arus keluar-masuk wisatawan.

Aspek promosi merupakan salah satu tema yang disurvey dalam penelitian ini. Hal itu karena pertimbangan bahwa industri pariwisata merupakan sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi, karena berperan strategis dalam menangani permasalahan ekonomi maupun sosial. Dalam rangka memasarkan produk wisata, maka aspek promosi menjadi sangat penting. Survey yang dilakukan dengan tema promosi kepada masyarakat setempat memberi hasil yang cukup baik, karena 86,7% responden berpendapat bahwa promosi mengenai kawasan ekowisata Tangkahan sudah berjalan dengan sangat baik dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di dalam maupun keluar negeri.

Meskipun diakui bahwa sebagai daerah tujuan ekowisata Tangkahan sudah mampu memberi wawasan dan harapan baru bagi masyarakat, menanamkan perspektif baru bagi kehidupan masa depan, peran pemerintah dan pemangku kepentingan lain harus tetap dapat menjaga dan memotivasi kegairahan kehidupan di kawasan tersebut.

Karena pada dasarnya, meskipun pembangunan kawasan ekowisata Tangkahan dipelopori dan diwujudkan berdasarkan keinginan masyarakat setempat, peran pemerintah sebagai fasilitator sangatlah menentukan keberadaan kawasan ekowisata tersebut ke masa depan. Keterbukaan, dan kejujuran masyarakat setempat membangun dan melestarikan Tangkahan harus dapat diapresiasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun kepercayaan masyarakat hidup dan berkehidupan di Tangkahan secara layak dan berkelanjutan.

Masyarakat telah menaruh harapan yang besar terhadap keberadaan Tangkahan sebagai kawasan wisata ekologis, menggantungkan asa kehidupan pada setiap dahan dan ranting pepohonan yang menghiasi kawasan ekowisata tersebut. Nadi kehidupan masyarakat Tangkahan saat ini bergerak sangat dinamis mengikuti arus globalisasi wisatawan yang ingin menikmati gelora eksotisme hutan hujan tropis.

Disisi lain pemerintah melalui Balai Besar Taman Nasional dan pemerintah daerah harus mampu menjembatani aspirasi masyarakat, merealisasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap langkah dan aspek pembangunan, yang ditujukan bagi keberadaan Tangkahan sebagai kawasan ekowisata yang harus tetap dapat diandalkan bagi kepentingan masyarakat setempat, bagi kepentingan bangsa, dan bagi kepentingan kehidupan masyarakat dunia.

Wisata sungai di Tangkahan

sumber foto : YOSL-OIC

4

Apa Kata Mereka

sumber foto : YOSL-OIC

Membaca dan memahami Tangkahan tidak bisa dilepaskan dari sejarah yang melahirkannya. Mereka yang menuliskan sejarah Tangkahan sejak 1999 sampai saat ini masih ada, dan dari merekalah penulis mendapatkan wawasan, pandangan, kritik, kepedulian, kerisauan, kebanggaan, dan harapan untuk masa dengan yang lebih baik. Salah satu pelaku sejarah adalah Wak Yoen atau lebih dikenal sebagai *black panther*. Tokoh senior dari Bukit Lawang ini "menemukan" Tangkahan pada tahun 1997. Ialah yang "baurekso" sampai saat ini, yang mengasuh 3 pemuda yang kelak akhirnya mengambil jalannya masing-masing, yaitu Saiful Bahri, Taufik Ramadan, dan Syukur Alfajar yang dikenal dengan panggilan Sugeng. Meramu pendapat mereka, para *stakeholder* atau lebih tepatnya *shareholder* Tangkahan sangat menarik. Muncul kesan yang mendalam bagi penulis bahwa ikatan emosional itu masih sangatlah kuat.

Evaluasi Tangkahan pernah dilakukan oleh seorang antropolog, Sunjaya. Laporannya dikemas dan menjadi bagian dari buku penulis yang (segera) diterbitkan oleh UNESCO. Sunjaya (2013) dalam Wiratno (2013) mengutip pendapat Arun Agrawal dan Clark C. Gibson (1999) yang mengemukakan strategi konservasi 'berbasis masyarakat lokal' *(community-based conservation)* sering dianggap tidak efektif mencapai tujuan pelestarian alam. Pegiat konservasi maupun pengelola kawasan konservasi kerap dihadapkan pada kompleksitas dan dinamika sosial di dalam masyarakat yang dilibatkan. Ketimbang menuding bahwa masyarakat lokal tidak memiliki pemahaman tentang konservasi, Agrawal dan Gibson justru menilai para pembuat kebijakan atau pengelola program-program konservasi telah keliru dalam memahami konsep 'masyarakat'. Kesalahan tersebut terletak pada tiga asumsi. Pertama masyarakat *(community)* diasumsikan sebagai suatu kelompok kecil yang dibatasi oleh teritori tertentu (misalnya desa). Kedua masyarakat dianggap memiliki struktur sosial yang homogen. Dan ketiga, masyarakat dilihat sebagai sekelompok orang yang memiliki norma dan kepentingan yang sama.

Ketiga cara pandang tersebut menyebabkan konsep 'masyarakat' dipahami secara statis ketimbang dinamis, *solid* ketimbang *heterogen*, dan sesuatu yang nyata ketimbang berada dalam bayangan. Bagi Agrawal dan Gibson, masyarakat adalah sesuatu yang didefinisikan dalam alam pikiran seseorang. Ia sesungguhnya sekumpulan para aktor yang saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai kepentingan.

Para aktor ini tidak selalu bertindak berdasarkan nilai atau norma yang dianggap ideal bagi kelompoknya. Pendapat ini menarik nantinya untuk dibuktikan kebenarannya dalam konteks Tangkahan.

Tangkahan juga dikupas habis dari sejarah pergolakannya oleh salah satu pencetus Tangkahan di masa depan, yaitu Saiful Bahri. Ia menulis lebih dari 58 halaman, dan mungkin bisa menjadi buku tersendiri yang sangat menarik karena ditulis oleh salah satu pelaku dan ditinjau dari berbagai sudut pandang. Seorang intelektual lokal dan masyarakat Tangkahan (baca: Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang) selayaknya bangga memiliki putra dengan tingkat pemikiran yang luar biasa itu. Penulis bisa merasakannya sejak menjadi Kepala Balai TN Gunung Leuser, pada Januari 2005 sampai masa tugas berakhir di Agustus 2007. Ialah yang menjadi pencetus Kongres Rakyat Batas Leuser, pada Juli 2007. Kongres yang mencoba untuk membangun kesepahaman bersama, desa-desa yang berbatasan dengan hutan Leuser wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Peranan Ary Suhandi tidak dapat dilepaskan dari Tangkahan pada awal tahun 2000. Ia seorang tokoh/praktisi yang bertangan dingin dalam mendorong, membangun, memfasilitasi, dan mengangkatnya *(scaling-up)* inisiatif lokal seperti Tangkahan-yang nyaris tidak ada di Indonesia Travel Atlas terbaru (2012) sekalipun. Hanya Bohorok, sebagai tempat rehabilitasi orangutan yang sudah tercantum dalam Travel Atlas tersebut. Atas perannya yang besar dalam mendampingi pengembangan Tangkahan, bersama-sama dengan tokoh-tokoh Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT). Puncaknya adalah pada September 2004, Bapak I Gede Ardika Menteri Pariwisata memberikan Anugerah INOVASI PARIWISATA INDONESIA, kepada Ketua LPT, Pak Okor. Tangkahan menjadi dikenal di seluruh tanah air sejak saat itu.

Gajah Sumatera di Tangkahan *sumber foto : YOSL-OIC*

4.1. Pendapat Mereka tentang Tangkahan

Penulis menyebarkan *checklist* pertanyaan kunci kepada beberapa tokoh dan pelaku utama pengembangan Tangkahan, dan beberapa *stakeholder* lainnya, seperti staf TNGL, mulai dari Kepala Bidang Teknis, Kepala Bidang Wilayah, Kepala Seksi, dan Kepala Resort. *Checklist* pertanyaan dikirimkan secara terpisah dan selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis. Menarik bisa mengetahui setelah 13 tahun Tangkahan mulai dibangun hingga saat ini. Suatu rentang waktu yang tidak pendek bagi upaya pengembangan masyarakat. Pada periode 13 tahun itu telah berganti sebanyak enam Kepala Balai TNGL. Fokus diskusi dilakukan untuk menggali beberapa momen sejarah, yaitu dengan Wak Yoen *(Black Panther)*. Salah satu tokoh pertama yang "meninggalkan" Bukit Lawang diakhir tahun sembilan puluhan, jauh sebelum banjir bandang tahun 2003 yang membawa korban ratusan jiwa dan kehancuran sarana dan prasarana wisata di Bukitlawang. Tentu saja diskusi intensif dilakukan dengan Ketua Umum LPT yang baru Pak Sentosa dan Ketua Hariannya-Ruth, dan para pedagang makanan, CRU, CTO, Kepala Desa Sei Serdang, Direktur OIC, Taufk Ramadan, Nurdin Razak (akademisi dan praktisi fotografer alam), dan sebagainya.

Wahdi Azmi

Menurut Wahdi Azmi, salah seorang tokoh FFI yang cukup lama berinteraksi dengan penulis pada masa 2005-2007, hal-hal hal positif yang menjadi kata kunci keberhasilan di Tangkahan adalah : (1) Tangkahan merupakan inovasi pemberdayaan masyarakat yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Leuser untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan kawasan, mengamankan sekaligus memanfaatkannya, (2) Pembelajaran Tangkahan adalah berhasilnya konservasi diterjemahkan ke dalam pola pikir masyarakat yang melihat sumber daya hutan sebagai pilihan *livelihood*. Semakin kuat hubungan ini semakin terjamin kawasan hutan dan masyarakat sekitar kawasan merasa memiliki dan bangga terhadap keberadaan Hutan TNGL, (3) Penyerahan mandat pengelolaan bagian dari Taman Nasional kepada masyarakat melalui lembaga yang mendapat legitimasi baik dari masyarakat sekitar kawasan, dan (4) Dalam konteks pengembangan ekowisata, Tangkahan belajar dari hal positif dan negatif pola pengelolaan yang ada di kawasan lain seperti Bukit Lawang. Hal positif yang tetap dijaga adalah manajemen satu pintu *"one gate management system"* dimana LPT yang diberikan

mandat oleh BBTNGL menjadi satu satunya pengelola, sehingga dapat menghindari potensi masalah yang akan terjadi bila pengelolaan tidak dilakukan satu pintu, seperti persaingan tidak sehat antar operator wisata, antar interpreter dan guide, dan lain sebagainya.

Namun demikian, selama beberapa tahun mendukung program pengembangan ekowisata Tangkahan, masih ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut :

- Permasalahan yang menjadi tantangan sejak awal adalah berbagai pelaku wisata di Tangkahan belum melihat kebutuhan mutlak untuk mendukung manajemen satu pintu yang dilakukan oleh LPT, dan kesulitan antar sektor untuk memandang *sector* lain sebagai satu kesatuan utuh untuk menghasilkan sebuah produk ekowisata yang unggul.
- CRU adalah partner LPT yang berjuang menegakkan prinsip pengelolaan satu pintu di bawah LPT dengan perpanjangan tangan *Community Tour Operator* (CTO) dimana lembaga ranger mendapat tugas untuk menggerakkan CTO. Sebagian besar intervensi CRU adalah mensosialisasikan dan konsisten dan tunduk terhadap pola pengelolaan yang diterapkan oleh LPT. Pada tahap awal pengembangan Tangkahan berbagai pelaku wisata mengalami kesulitan dalam mengikuti sistem ini.
- Dibanding level *input capacity* building yang dilakukan oleh semua pihak, kondisi pengelolaan Tangkahan sekarang harus diakui melebihi ekspektasi saya. Masyarakat dengan latar pendidikan yang menengah ke bawah hari ini cukup mampu untuk mempertahankan kegiatan ekowisata berjalan dan berbagai perbaikan masih dilakukan terutama oleh pengurus LPT yang baru terpilih sekarang.

Membicarakan soal keuntungan apa saja yang diperoleh, Wahdi Azmi menguraikan bahwa dalam konteks *livelihood*, kita tidak bisa menilai *economic capital* semata sebagai modalitas yang terbangun, peningkatan *social capital* adalah salah satu yang menjadi *driven factor* penting yang seringkali berjalan tanpa disadari. *Exposure* LPT dan masyarakat dengan berbagai pihak di berbagai level dalam setiap detail kegiatan sejak inisiatif awal telah menjadi salah satu pendorong motivasi dan membuka wawasan masyarakat dan pengurus LPT.

Masyarakat sekitar kawasan, melalui berbagai *service* wisata seperti pelayanan akomodasi, jasa pemanduan, penyewaan fasilitas dan sarana kegiatan wisata seperti *tubing* dan lain-lain, adalah yang paling banyak mendapat manfaat secara ekonomi. Pemerintahan desa melalui retribusi dan parkir, BBTNGL melalui retribusi kawasan (Surat izin masuk kawasan konservasi atau Simaksi). CRU mendapat manfaat untuk biaya operasional pengelolaan CRU melalui *trekking* gajah. Di luar manfaat ekonomi , BTNGL adalah yang terutama menerima manfaat berupa pengelolaan partisipatif dan pengamanan kawasan berbasis masyarakat yang dikembangkan.

Kantor Conservation Response Unit (CRU) - Tangkahan

sumber foto : YOSL-OIC

BBTNGL dan Pemkab Langkat, adalah pihak yang paling relevan dan memiliki kapasitas untuk mendukung Tangkahan. Berbagai dukungan BBTNGL melalui kegiatan keproyekan, baik rutin maupun *occasional* telah diberikan untuk mendukung program di Tangkahan, dukungan lebih lanjut masih diperlukan.

Bagi Pemkab Langkat, masih sangat banyak ruang untuk meningkatkan dukungan pada berbagai level. Lobi tingkat tingkat tinggi dibutuhkan agar dukungan Pemkab Langkat, pada saat yang tepat dapat mendukung Tangkahan, untuk maju sesuai dengan rencana pengelolaan yang disepakati *stakeholder* yang relevan.

Sedangkan pihak lain yang memiliki kapasitas dan tanggungjawab untuk mendukung Tangkahan adalah PTPN II yang berlokasi di sekitar Tangkahan. PTPN II berencana akan mengusulkan sertifikasi ISPO dan mereka perlu menunjukkan best management practice dan dukungan terhadap masyarakat di sekitar kawasan mereka.

Kegiatan pengembangan wisata di Tangkahan telah secara nyata berdampak positif terhadap kondisi hutan di sekitar Tangkahan. Ditandai dengan berhentinya kayu *logging* yang dibawa keluar melalui Tangkahan dan sungai Batang Serangan. Dimana pada awal-awal kegiatan CRU di Tangkahan masih sering didapati ekstraksi kayu melalui kawasan Tangkahan. Meskipun demikian, di wilayah yang bersebelahan dengan Tangkahan masih ada kegiatan pembalakan, walaupun hal tersebut diluar pengaruh dan wilayah kewenangan LPT.

Agar keberhasilan Tangkahan ini dapat direplikasi di tempat lainnya, prasyarat utama adalah adanya kelembagaan lokal yang mendapat legitimasi dan mandat secara kuat dari masyarakat sekitar kawasan tersebut. Disamping itu, perlu adanya pemahaman yang kuat akan nilai penting konservasi dalam tubuh kelembagaan yang terbentuk yang ditandai dengan pernyataan di visi misi kelembagaan yang tertuang jelas dalam AD/ART lembaga, serta memiliki dukungan yang kuat dari pemangku wilayah dan pemerintah setempat.

Genman Hasibuan

Genman Hasibuan termasuk pendatang baru, dan kini sebagai Kepala Bidang Teknis di BBTNGL. Memiliki pengalaman sebagai Kepala Seksi di TN Gunung Halimun Salak. Ia mengetahui sejarah pengembangan Tangkahan menjadi lokasi destinasi *ecotourism* di TNGL pertama sekali saya ketahui dari draft buku yang dituliskan oleh Bapak Wiratno dengan judul "Tersesat di Jalan Yang Benar : Seribu Hari Mengelola Leuser" (diterbitkan UNESCO Jakarta Office, April 2013). Disamping itu juga saya mewawancara teman-teman LSM lokal seperti Syaiful Bahri, staf senior TNGL seperti Hendra Wijaya dan Taufik Haryadi, serta tokoh Tangkahan seperti Bapak Okor.

Menurut Genman, pengembangan Tangkahan tentunya sangat bermanfaat bagi kelestarian hutan Leuser, khususnya hutan di sekitar Tangkahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan aktivitas wisata yang berkembang di Tangkahan telah memberikan alternatif pendapatan bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, kebiasaan masyarakat yang penghidupannya dari aktivitas *illegal logging* pada beberapa waktu lalu telah berbalik arah dengan memanfaatkan kawasan hutan TNGL sebagai obyek daya tarik yang dapat dipasarkan kepada wisatawan minat khusus dengan tidak merusak keberadaan hutan yang ada. Bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan wisata di Tangkahan sangat fokus mempertahankan dan melindungi hutan TNGL sebagai tempat wisata alam. Saat ini pemerintah desa setempat telah membuat Peraturan Desa sebagai dasar kelompok masyarakat untuk menarik retribusi bagi pengunjung. Retribusi yang ditarik dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dampak negatif kegiatan wisata yang dikembangkan tentu tetap ada, akan tetapi sampai saat ini masih bisa dikendalikan. Oleh karena itu, tantangan ke depan dengan semakin berkembangnya aktivitas wisata di Tangkahan, dampak negatif ini harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak sehingga pemanfaatan kawasan TNGL secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. *Site plan* merupakan hal yang harus disusun pengelola sebelum melaksanakan pengembangan pariwisata di Tangkahan.

Disamping hal tersebut di atas, dengan dikeluarkannya PP 36 Tahun 2010 tentang IPPA, diamanatkan agar semua aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata alam di dalam kawasan hutan khususnya di dalam kawasan konservasi, harus mengikuti aturan main yang telah digariskan dalam peraturan tersebut. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam kegiatan pengusahaan pariwisata alam di Tangkahan harus di dorong untuk mengikuti aturan tersebut. Persoalan baru akan muncul ketika penerapan peraturan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam aktivitas pengusahaan pariwisata di Tangkahan. Sosialisasi peraturan dan pendampingan kelompok masyarakat, adalah merupakan kunci sukses terlaksanakannya peraturan tersebut dengan baik.

Berkembangannya kelompok masyarakat Tangkahan dalam pengusahaan pariwisata alam tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak khususnya BBTNGL. Berbagai macam program telah digulirkan untuk mendukung dan mengembangkan

pengusahaan pariwisata alam di Tangkahan, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa tahun terakhir ini BBTNGL bekerjasama dengan Direktorat PJLKKHL Kemenhut gencar melaksanakan promosi dan publikasi wisata Tangkahan melalui mass media dan pameran-pameran tingkat nasional. Hasilnya telah terwujud, antara lain dengan peningkatan jumlah kunjungan ke Tangkahan.

Penarikan karcis masuk ke Tangkahan telah dilaksanakan oleh masyarakat sejak dimulainya pengembangan Tangkahan sebagai tujuan pariwisata TNGL. Karcis yang dipungut masyarakat keseluruhannya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat untuk operasional pengelolaan, pembiayaan sosial kemasyarakatan dan dukungan pembangunan desa.

Model pengembangan pariwisata Tangkahan telah menjadi bagian dari paparan BBTNGL dalam rapat koordinasi pengelolaan pariwisata alam di Kementerian Pariwisata pada tahun 2011 atas undangan rapat yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata. Sementara itu, fokus dukungan BBTNGL saat ini dan ke depan adalah pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Model Desa Konservasi, peningkatan kapasitas SDM masyarakat dalam hal kepariwisataan dan konservasi serta promosi dan publikasi melalui media massa, internet dan pameran-pameran nasional. Upaya tersebut merupakan fokus investasi yang dilakukan oleh BBTNGL terhadap Tangkahan 5 tahun terakhir ini. Kawasan TNGL dengan luasan lebih dari 1 juta hektar saat ini banyak mendapatkan tekanan dan tantangan yang diakibatkan peningkatan populasi penduduk yang berimplikasi terhadap tingginya kebutuhan lahan untuk pengembangan wilayah dan budidaya pertanian masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut koordinasi, sosialisasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan kesadaran masyarakat luas tentang peran dan nilai penting keberadaan TNGL merupakan hal yang harus dilaksanakan. Perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari adalah merupakan strategi pengelolaan yang secara terpadu dan berkesinambungan didorong direalisasikan tanpa mengesampingkan keterbatasan-keterbatasan pengelolaan yang ada.

Masih tingginya kerusakan kawasan yang diakibatkan oleh perambahan, *illegal logging* dan perburuan satwa liar telah menghabiskan energi yang sangat besar untuk penanggulangannya. Kompleksitas persoalan dan kepentingan serta keterbatasan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki BBTNGL mengakibatkan rumitnya menyelesaikan persoalan dengan tuntas.

Genman berpendapat bahwa pendekatan pengelolaan yang perlu dilakukan di TNGL dengan luasan 1 juta hektar, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada, adalah dengan mendorong masyarakat lokal dan para pihak terkait untuk mengambil peran dan fungsi dalam pengelolaan TNGL yang lestari. Tentunya masyarakat dan para pihak akan mempertanyakan terkait dengan manfaat yang akan diperoleh mereka bila ikut mengambil peran dalam pengelolaan TNGL. Memperhatikan hal tersebut maka diperlukan suatu kumunikasi dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait terutama masyarakat lokal untuk memetakan dan mendiskusikan siapa berbuat apa dan dimana serta akan mendapatkan manfaat apa dalam pengelolaan TNGL. Singkatnya pengelolaan TNGL yang lestari dengan kawasan yang sangat luas dengan mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki akan bisa diwujudkan dengan mendorong pengembangan sistem kolaborasi pengelolaan kawasan TNGL. Oleh karena itu, peran petugas lapangan dalam memfasilitasi kepentingan konservasi dengan tidak mengesampingkan kebutuhan kesejahteraan masyarakat lokal dan pengembangan wilayah sudah saatnya untuk dilakukan.

Illegal loging di TNGL

sumber foto : YOSL-OIC

Ujang Wishnu Barata
PEH pada BB TN Gunung Leuser

Terkait dengan strategi pengamanan kawasan Leuser, pola Tangkahan sangat membantu kawasan TNGL lebih aman dan dijaga oleh masyarakat secara langsung. Nihilnya angka *illegal logging* dan perambahan di 17.500 ha areal yang dikelola oleh masyarakat untuk aktifitas ekowisata membuktikan hal ini. Meskipun aksi *illegal logging* masih terjadi pada spot-spot lokasi di luar kawasan ekowisata yang berdekatan, seperti Sei Glugur hingga perbatasan dengan wilayah Bukit Lawang, namun skalanya masih dalam level bisa dikendalikan melalui patroli dan operasi pengamanan rutin.

Menurut Ujang, pola kolaborasi dengan konsep ekowisata melalui pemberian mandat kelola kepada masyarakat sekitar Tangkahan dipahami dan disikapi secara berbeda oleh para pejabat struktural dari level Balai Besar hingga level Resort. Pada level Balai Besar dan Bidang Wilayah, optimalisasi setoran PNBP dan berbagi peran dengan Pemda setempat serta pihak perkebunan dan mitra lainnya lebih menjadi perhatian utama. Pensikapan lebih kepada bagaimana mengatur setoran PNBP agar tidak menyalahi ketika ada pemeriksa keuangan dari pusat. Masih terdapat kegamangan dalam menyikapi roh MoU (tahun 2006) yang memberikan mandat penuh pengelolaan pada areal seluas 17.500 ha terutama karena belum adanya payung hukum yang jelas mengenai inisiatif kolaborasi ini. Pemberian MoU tersebut dipandang terlalu "berani" sehingga memerlukan *effort* lebih dalam mengawalnya.

Peran pendampingan dan pengawasan langsung diserahkan ke Seksi dan terutama Resort. Pemungutan PNBP ditugaskan kepada staf resort, yang sayangnya hanya hadir ke lapangan untuk menarik pungutan. Akibatnya hubungan interpersonal dengan tokoh masyarakat, pengurus LPT, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan ekowisata sehari-hari menjadi kurang maksimal. Petugas jarang turun dan mengawal langsung setiap perkembangan di bawah, misalnya terlibat dalam evaluasi/pelaksanaan paket wisata, urun rembug dalam mensikapi problem-problem riil akomodasi, dan lain-lain. Menurut saya, idealnya, perkembangan Tangkahan diagendakan secara khusus dalam pertemuan reguler dengan LPT, minimal di tingkat bidang wilayah, untuk memudahkan *cross check* data/informasi dari laporan harian petugas lapangan, di tingkat Seksi dan Resort.

Pola Tangkahan dan Pola Restorasi di Sei Serdang, dibangun atas dasar spirit yang sama. Penguasaan kawasan yang dikolaborasikan melalui tahapan awal proses yang terkomunikasikan dengan baik di level bawah dan masyarakat. Perbedaannya adalah pada pemberdayaan resort secara penuh pada kegiatan restorasi, sedangkan pada pola ekowisata Tangkahan, lebih diharapkan berperan sebagai fasilitator/komunikator lokal. Sebenarnya, tantangan/peluang strategis saat ini adalah bagaimana menghubungkan kesuksesan restorasi dengan aktifitas ekowisata di Tangkahan sebagai paket alternatif (misalnya paket wisata minat khusus /riset), sehingga memberi kesempatan kepada LPT atau kelompok lokal lain di sekitar Sei Serdang untuk aktif/melebarkan sayap ke lokasi restorasi.

Ujang memberikan pendapatnya tentang hal-hal yang masih perlu dilakukan oleh BBTNGL dalam mendukung Tangkahan, adalah : (1) Pengaturan kembali (re-arrangement) kegiatan kemitraan di Tangkahan, sehingga terjadi reposisi peran para mitra dalam bentuk sinergitas kegiatan dapat ditata ulang secara lebih jelas, (2) Agenda pertemuan rutin dengan mitra terkait terutama LPT, untuk membahas isu dan ide-ide terbaru pengembangan kawasan Tangkahan, (3) Pembinaan internal personil lapangan di tingkat resort maupun seksi agar lebih aktif terlibat dalam pendampingan aktifitas ekowisata di lapangan, (4) Promosi, data, dan informasi mengenai Tangkahan yang terakses on-line, dan 5) Penyegaran/pelatihan guide dan interpreter local.

Tentang ada tidaknya perubahan paradigma kerja di TNGL setelah ditinggalkan oleh Ujang untuk studi S2 di Belanda selama dua tahun, ia memberikan pendapatnya yang menarik. Menurut Ujang, hal yang paling mencolok adalah bahwa porsi kegiatan perlindungan/pengamanan terlalu besar. Kegiatan operasi tarlalu banyak menyita perhatian. Selama tidak ada kegiatan dari Mako, personil SPORC TNGL di *standby*-kan di kantor Balai Besar, sehingga menyulitkan Seksi dalam pemberdayaan mereka menyangkut kejadian-kejadian yang harus segera ditangani.

Peningkatan kinerja dalam hal administrasi keproyekan- menimbulkan konsekuensi bahwa hal-hal teknis menjadi kedodoran. Proses-proses rekonsiliasi, pendampingan, dan berbaur dengan masyarakat, kalaupun ada, menjadi kurang terekam dengan baik, karena terlalu mengandalkan laporan tertulis dari sisi kegiatan DIPA. Porsi Balai Besar terlalu besar

dalam melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan lapangan. Sebenarnya ini problem yang muncul setidaknya dalam empat tahun terakhir.

Secara umum, sistem kerja lapangan belum dikelola/disupervisi sehingga mengalir sebagai panggilan jiwa bagi petugas lapangan untuk setiap hari menengok kawasannya dan mengikuti isu local, di wilayah kerjanya bersama dengan masyarakat. Mereka turun ke lapangan hanya ketika ada kegiatan, atau ketika ada perintah dari Balai Besar. Saya kira ini juga problem lama yang berada pada level akut.

Saiful Bahri

Sebagai salah satu pelaku dan penggagas Tangkahan, Saiful Bahri menyatakan bahwa baginyaTangkahan adalah sebuah fraksis dari kelahiran ide, Tangkahan adalah sebuah (rahim) dari berbagai ide-ide yang saling berdialektika. Tidak ada seorangpun yang dapat mengklaim Tangkahan adalah merupakan hasil karya seseorang atau satu orang, tidak juga oleh saya. Tetapi Tangkahan adalah akumulasi dari rangkaian ide yang saling berdialektika secara terus menerus. Untuk mewakili para peserta sejarah, dan dari perspektif subjektifitas saya Tangkahan saat ini dapat dinilai dari dua indikator, yaitu : a) Indikator pragmatis, Tangkahan telah mampu melakukan lompatan quantum yang melampaui batas cita-cita dan harapan dimasa lalu (1999-2003) yang bertumpu pada keinginan untuk "merakyatkan hutan Negara" untuk sudut pandang konservasi kawasan hutan dan "Negara dalam desa" untuk sudut pandang sosial budaya dan ekonomi. b) Indikator ideal, Tangkahan masih merupakan "pulau konservasi" yang terpencil di tengah "samudera luas". Sebuah area yang teralienasi dari satu kesatuan kawasan yang memiliki eskalasi tekanan yang sangat tinggi. Sehingga dibutuhkan suatu kepemimpinan ide untuk membangun satu wilayah hutan dalam satu kesatuan wilayah sosial, budaya dan ekonomi yang saling berikat dan terintegrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya melalui konsepsi "clusterisasi".

Sebagai koreksi terhadap pencapaian dari pragmatis yang disebutkan di atas, Tangkahan sampai saat ini masih belum memiliki kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi. Kemandirian sosial yang belum tercapai adalah; di bidang otoritas pengelolaan kawasan, di bidang integrasi masyarakat pada dua wilayah desa, dan di bidang regulasi lokal. Kemandirian ekonomi yang belum tercapai adalah pengembangan visi kewirausahaan bisnis kolektif konservasi yang meliputi pengelolaan sebuah *holding company* berbasis pada Badan Usaha Milik Lembaga (integrasi BUMDes) dan berbasis pada kebangkitan swasta lokal. Koreksi lain di bidang ekonomi adalah kelas menengah masih dipimpin dan didominasi oleh komunitas pendatang dan bangsa asing serta basis ekonomi masih bertumpu pada sektor pariwisata (belum optimal) dan belum mengusahakan berbagai sektor industri jasa lingkungan didalam/luar kawasan.

Pasilitas penyeberangan sungai di Tangkahan *sumber foto : YOSL-OIC*

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kekuatan sosial budaya ekonomi-lah yang telah menyelamatkan TNGL di wilayah Tangkahan dari ambang kehancuran pada masa 1999-2000, kekuatan sosial budaya ekonomi yang dibangkitkan pada masa itu masih berupa harapan-harapan, cita-cita dan keberanian menerobos jebakan *"trial & error"*. Kondisi masa itu masih dalam medan pertarungan yang sulit dan rumit, dimana terjadi perpecahan sosial, gejala pembangkangan terhadap nilai budaya tradisional, dan kemiskinan masyarakat yang diakibatkan oleh luasan teneurial untuk budidaya yang sangat sempit dan terhimpit oleh kawasan TNGL dan Perusahaan perkebunan (BUMN/Swasta). Secara ekonomi, masyarakat "ambigu" untuk mengusahakan lahan yang sedikit secara optimal (dengan pola kepemilikan yang sulit) atau menjadi buruh pembalakan kayu dengan

harapan menjadi toke kayu atau menjadi buruh perkebunan dan atau menjadi preman agar dapat memiliki dan menguasai seluruh sektor-sektor produksi di wilayah tersebut.

Inovasi dan motivasi sosial konservasi telah melahirkan ide, ide tersebut menjadi harapan, ide dan harapan yang disampaikan secara terus menerus dan secara berulang akan menjelma menjadi sebuah pembenaran *(volk wisdoms)*. Proses pembenaran tersebut ketika dirawat dan diarahkan kejalan yang benar akan menjadi sebuah kebenaran, kebenaran tersebut akan tetap tumbuh dan terjaga ketika disuarakan oleh suara orang banyak akan menjelma menjadi energi yang sangat besar. Energi "kebenaran" tersebut akan meruntuhkan, mengendalikan dan mengalahkan energi yang "tidak benar". Para penjaga bertugas untuk menjaga energi "kebenaran "tersebut sambil membawa serta para pengikut energi yang "tidak benar" tersebut untuk ditransformasikan. Proses transformasi tersebut selalu dilakukan ke dalam bentuk transaksi dan negosiasi yang cenderung permisif sebagai bagian dari strategi-strategi persuasif oleh para penjaga. Dampak positif dari strategi tersebut adalah berhasil mengakumulasikan lawan menjadi kawan (penguasaan tanpa perang). Dampak negatifnya adalah kerap terjadi ambiguitas dalam pengambilan keputusan di bidang otoritas, integrasi dan regulasi. Pengambilan keputusan yang tidak berbasis pada latar belakang personal/faksi dipastikan akan berdampak pada perpecahan sosial.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi "kunci konsistensi" kawasan Tangkahan yang dapat direplikasi atau dievaluasi pada wilayah lain, dan dapat menjadi tolak ukur bagi konsistensi kawasan Tangkahan secara jangka panjang (dengan grafik pertumbuhan yang meningkat) atau dapat terjadi situasi *decline* dan atau *fait accomply* secara sosial budaya ekonomi, diantaranya adalah : (a) Konsistensi sosial, terjaganya konsistensi sosial akan sangat dipengaruhi oleh harapan sosial terhadap perkembangan kawasan ekowisata Tangkahan. Pembentukan Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) telah ditempatkan secara posisi untuk menjaga harapan penduduk dari dua wilayah desa tersebut. Maju atau mundurnya kelembagaan LPT akan sangat menentukan stabilitas sosial, kelembagaan LPT bersama pemerintah dua wilayah desa adalah sebagai penjaga harapan sosial dan peñata sistem sosial yang menjamin konsistensi kawasan Tangkahan secara jangka panjang. Oleh karena itu, sepanjang otoritas, integrasi dan regulasi masih tetap dijaga dan dikendalikan keseimbangannya oleh LPT dan pemerintah dua wilayah desa, sepanjang penduduk/masyarakat di wilayah dua desa tersebut masih memiliki harapan dan cita-cita sosial dan memiliki ketergantungan kepada kawasan hutan maka kawasan Tangkahan akan tetap konsisten keberadaannya; (b) Konsistensi budaya, terjaganya konsistensi budaya akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai *Daliken Sitelu* yang diapresiasikan ke dalam sifat *er-endi enta* yang tertulis di dalam *Surat Ukat*. Sifat *er-endi enta* ini memiliki pengertian resiprokal (berbalas), dimana setiap orang tidak diperkenankan hanya memberi atau hanya meminta. Begitu juga dengan ungkapan *"keri gia lau pola e, gelah i sangketken kitangna"* ungkapan ini secara literal berarti walau air nira habis diminum, tidak masalah, asal tempat air itu disimpan kembali pada tempatnya. Ungkapan ini menjelaskan karakter masyarakat dimana menempatkan cara atau etika adalah sangat penting. Sehingga dengan nilai – nilai tersebut akan memberi isyarat bahwa sepanjang pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk bersama mengelola kawasan hutan, maka masyarakat akan memberikan nilai dan sikap esensialnya dengan melindungi hutan tersebut. Begitu pula terhadap cara dan perlakuan yang diberikan dalam mengelola masyarakat akan memberi pengaruh terhadap konsistensi kawasan secara jangka panjang atau keruntuhan kawasan tersebut (titik balik) akibat cara yang tidak tepat; (c) Konsistensi ekonomi, terjaganya konsistensi ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh faktor pemerataan ekonomi bukan pada faktor pertumbuhan ekonomi. Sehingga skenario ekonomi harus diarahkan secara horizontal bukan ke arah vertikal, walaupun dinamika ekonomi berjalan lambat ke arah horizontal akan lebih diterima komunitas daripada berjalan cepat ke arah vertikal. Hal ini sangat memberi pengaruh terhadap profesionalisme usaha ekonomi, tetapi secara jangka panjang akan memberikan fondasi yang kuat di bidang perekonomian lokal. Sehingga ekonomi kolektif akan menjadi pilihan strategi melalui konsep "kewirausahaan bisnis kolektif konsevasi" yang berbasis pada Badan Usaha Milik Lembaga (untuk LPT) dan Badan Usaha Milik Desa (untuk pemerintah dua wilayah desa). Integrasi antara BUML dan BUMDes tersebut akan melahirkan sebuah *holding company* yang sangat kuat, dimana penguasaan dan pengusahaan jasa lingkungan dan wisata alam dari kawasan taman nasional akan dikelola dalam prinsip satu pintu atau satu atap begitu juga dengan potensi sumberdaya dan alat produksi di luar kawasan hutan TNGL. *Holding company* ini akan berfungsi sebagai inkubator

bisnis lokal yang akan melahirkan generasi – generasi swasta lokal. Sepanjang sistem dan infrastruktur ekonomi lokal mampu menguasai dan mendominasi untuk pengusahaan potensi sumberdaya dan alat produksi, maka akan menjadi jaminan keamanan bagi berbagai usaha dan bisnis masyarakat pendatang dan investasi asing di Tangkahan. Menjadi persoalan tersendiri, ketika sumber – sumber ekonomi telah dikelola oleh pihak luar: ketika lembaga non pemerintah (NGO/LSM) telah menghasilkan uang dari kampung mereka, ketika pengusaha asing telah menghasilkan uang dengan berinvestasi di kampung mereka dan ketika lembaga pemerintah diketahui mengambil keuntungan dari mereka. Hal tersebut bukan saja didorong oleh faktor "acen, cian dan cengkurak" tetapi oleh rumus ekonomi kolektif dimana pertumbuhan faktor Y (vertikal) lebih cepat dibanding pertumbuhan faktor X (horizontal), sehingga akan memicu perebutan ruang dan alat produksi dengan berbagai cara dan strategi. Regulasi ekonomi lokal dalam bentuk Peraturan Desa, kebijakan/peraturan lembaga, konsensus, Kerjasama Operasional (KSO), dan lain-lain akan sangat dibutuhkan untuk dilakukan secara konsisten.

Saiful Bahri menguraikan bahwa pengembangan kawasan ekowisata Tangkahan adalah berbasis pada sistem dan infrastruktur kebijakan dan perencanaan yang bersifat strategis, dimana sistem dan infrastruktur kebijakan dan perencanaan tersebut akan bertumpu pada GBHPK. GBHPK adalah Garis-Garis Besar Haluan Perencanaan Kawasan, yang merupakan sebuah pedoman pokok atau manifesto dan atau cetak biru yang berisikan tentang arah tujuan dan cara-cara yang perlu dipedomani oleh seluruh pihak dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kawasan ekowisata Tangkahan. GBHPK yang secara hakekatnya adalah sebuah pola umum pembangunan kawasan ekowisata Tangkahan merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, utuh, terarah terpadu dan berlangsung secara terus menerus. Garis-Garis Besar Haluan Perencanaan Kawasan (GBHPK) secara sistematika dilaksanakan berdasarkan pada arah dan strategi sebagai berikut :

I. Rencana Pengembangan Kawasan Jangka Panjang (RPKJP) ; RPKJP disusun dan diarahkan sebagai pedoman umum pembangunan kawasan ekowisata Tangkahan untuk masa waktu 18 (delapan belas) tahun, yang meliputi 6 (enam) masa RPKJM (RPK) dan tersusun secara berkesinambungan dalam 18 (delapan belas) tahapan RPKJPd (RKT).
II. Rencana Pengembangan Kawasan Jangka Menengah (RPKJM) ; RPKJM merupakan turunan daripada RPKJP, disusun dan diarahkan sebagai pedoman teknis pembangunan kawasan ekowisata Tangkahan untuk masa waktu 3 (tiga) tahun. RPKJM dalam pelaksanaan selanjutnya disebut sebagai Rencana Pengembangan Kawasan (RPK).
III. Rencana Pengembangan Kawasan Jangka Pendek (RPKJPd) RPKJPd merupakan turunan daripada RPKJM (RPK) sebagai tahapan pencapaian dalam setiap tahun yang selanjutnya disebut RKT (Rencana Kerja Tahunan).

Garis-Garis Besar Haluan Perencanaan Kawasan (GBHPK) - pengelolaan kawasan ekowisata Tangkahan disusun dan ditetapkan dalam beberapa tahapan pencapaian Rencana Pengembangan Kawasan Jangka Panjang (RPKJP) sebagai berikut :

RPKJP ke - I (2000 - 2018) ; Pengembangan industri Pariwisata
RPKJP ke - II (2018 - 2036) ; Pengembangan industri Bioteknologi
RPKJP ke - III (2036 - 2054) ; Pengembangan Eco Industrial Park

Oleh karenanya, pelaksanaan GBHPK (tahun 2000 s/d 2054) yang dilakukan melalui tahapan RPKJP, RPKJM dan RPKJPD dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik sedini mungkin dan pengembangannya harus dilakukan secara holistik. Program ini akan berhasil dilaksanakan di kawasan ekowisata Tangkahan pada saat kesadaran masyarakat sudah mulai tampak dalam upaya penghargaan terhadap keberadaan potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dan kawasan TN Gunung Leuser yang merupakan *based property* telah aman dan lestari sebagai jaminan keberadaan seluruh komoditas bioekonominya secara jangka panjang.

Dalam RPKJP ke-III ini, di tahun 2054 kawasan Tangkahan diprediksi akan berkembang dan ditetapkan sebagai suatu kawasan Eco Industrial Park. Dimana kawasan Tangkahan akan menjadi "tuan rumah" bagi investasi dan atau bagi penanaman modal nasional/internasional bagi bisnis dan perdagangan bioekonomi yang bertaraf global. Strategi ini akan "menghipnotis" pembangunan wilayah ekonomi di sekitar kawasan hutan dalam satu kesatuan wilayah yang saling berikat dan saling melengkapi.

Pencapaian strategi ini dalam RPKJP ke-III di tahun 2054, bukan hanya mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya ekonomi hutan tetapi akan serta merta membangun pola industri yang kuat di wilayah desa dan daerah di berbagai sektor unggulan. Inilah yang menjadi cita-cita dan tujuan jangka panjang dari pengembangan wilayah Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang akan dicapai melalui tahapan-tahapan GBHPK.

Berikut tabel ringkasan Garis– Garis Besar Haluan Perencanaan Kawasan -RPKJP ke I (2000-2018) :

Tahapan GBHPK RPKJP KE-I	Periode	Sasaran Pembangunan	Output terhadap Tahapan GBHPK
RPK – I	2000 – 2003	Pengembangan Sumberdaya	Keterpaduan Taman Nasional dengan Masyarakat
RKT – I	2000 – 2001	Pemantapan kawasan TNGL	▪ Penegakan hukum ▪ Penggalangan sosial budaya
RKT- II	2001 – 2002	Pembangunan pranata sosial	▪ Pengorganisasian massa ▪ Pengembangan lembaga
RKT- III	2002 – 2003	Pengintegrasian sumberdaya	▪ Integrasi hak teneurial ▪ Platform *common property*
RPK – II	2003 – 2006	Pengembangan Ekowisata	Ekowisata dan Partisipasi Masyarakat
RKT – I	2003 – 2004	Pengembangan dasar ekowisata	▪ Pengembangan sumberdaya ▪ Kolektivitas manajemen
RKT- II	2004 – 2005	Penguatan sistem pengelolaan dan pelayanan ekowisata	▪ Pengembangan produk wisata unggulan ▪ Sistematisasi pengelolaan & pelayanan kelembagaan
RKT- III	2005 – 2006	Promosi dan pemantapan pasar	▪ Pengembangan model pemasaran satu pintu ▪ Pengelolaan pasar global
RPK – III	2006 – 2009	Pembangunan Pertanian	Manajemen Pertanian Lestari
RKT – I	2006 – 2007	Modifikasi pertanian subsisten	▪ Intensifikasi sumberdaya ▪ Desain ekonomi pertanian
RKT- II	2007 – 2008	Sistem pertanian ekosistem	▪ Integrasi pola pertanian ke dalam pranata ekosistem
RKT- III	2008 – 2009	Kolektivitas ekosistem pertanian	▪ Diversifikasi komoditas ▪ Manajemen satu atap ▪ Sistem pasar bersama
RPK – IV	2009 – 2012	Pengembangan HHBK	Manajemen HHBK
RKT – I	2009 – 2010	Penataan sistem pengelolaan dan pengembangan HHBK	▪ Model pengelolaan HHBK ▪ Manegemen HHBK satu pintu
RKT- II	2010 – 2011	Pengelolaan potensi HHBK	▪ Management komoditas ▪ Manegement modal & pasar
RKT- III	2011 – 2012	Budidaya HHBK sebagai komoditas pertanian ekosistem	▪ Intensifikasi komoditas ▪ Ekstensifikasi komoditas
RPK – V	2012 – 2015	Pengembangan Kewirausahaan	Manajemen Bisnis Konservasi
RKT – I	2012 – 2013	Penataan sistem ekonomi lokal	▪ Pengembangan permodalan ▪ Kerjasama pembiayaan
RKT- II	2013 – 2014	Integrasi wilayah ekonomi	▪ Optimalisasi ekonomi hutan ▪ Optimalisasi ekonomi desa
RKT- III	2014 – 2015	Pengelolaan bisnis konservasi	▪ Badan usaha kolektif ▪ Kewirausahaan swasta lokal
RPK – VI	2015 – 2018	Pembangunan Eko-Industri	Manajemen Kluster Konservasi
RKT – I	2015 – 2016	Kolaborasi pembangunan wilayah	▪ Integrasi holding primer ▪ Integrasi holding sekunder
RKT- II	2016 – 2017	Re-desain pembangunan wilayah	▪ Regulasi & proteksi ▪ Infrastruktur ▪ Investasi/ penanaman modal ▪ Globalisasi pasar komoditas
RKT- III	2017 – 2018	Industrialisasi ekologis	▪ Manajemen Ekowisata bertaraf global ▪ Managemen pola pertanian terpadu ramah lingkungan ▪ Managemen potensi ekonomi hutan yang berkelanjutan

Air terjun di sungai Tangkahan *sumber foto : YOSL-OIC*

Saiful Bahri menyakini bahwa sampai saat ini yang paling diuntungkan dari perkembangan dan pengembangan Tangkahan dari aspek sosial dan budaya adalah seluruh masyarakat di wilayah dua desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari aspek ekonomi saat ini puncak piramida penguasaan dan pengusahaan alat produksi masih dikuasai oleh masyarakat pendatang/komunitas asing kemudian diikuti oleh masyarakat desa Namo Sialang dan masyarakat desa Sei Serdang. Apabila skenario ekonomi lokal (kewirausahaan bisnis kolektif konsevasi) dilaksanakan berdasarkan GBHPK maka diprediksi akan terjadi perubahan dimana masyarakat lokal melalui *holding company*-nya akan berada di puncak piramida ekonomi tersebut secara konsisten dan terus menerus. Walaupun ketika sektor ekonomi berhasil dikuasai secara penuh, diindikasikan akan memberikan dampak yang negatif di sektor sosial dan budaya serta memberikan tingkat keterancaman tersendiri terhadap kelestarian kawasan konservasi secara jangka panjang. Sehingga dibutuhkan system dan infrastruktur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang kuat dan sistematis oleh seluruh pihak.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Tangkahan telah menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah dua desa tersebut dari aspek pemberdayaan masyarakat desa dan aspek konservasi kawasan taman nasional, walaupun dari implementasinya belum mampu menjangkau luasan wilayah yag sangat luas dan sebaran penduduk yag cukup besar dari dua wilayah desa tersebut jika dianalisis terhadap perspektif keadilan dan kesejahteraan yang juga masih bersifat ambigu dan relatif dari berbagai sudut pandang. Persoalan mendasar di dua wilayah desa tersebut adalah kedaulatan atas ruang sosial dan budaya serta penguasaan alat produksi yang dapat diusahakan secara mandiri untuk kesejahteraan jangka panjang.

Saiful Bahri juga memberikan pendapatnya bahwa selain pihak BB TNGL, seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat di kedua wilayah tersebut perlu tetap mendukung Tangkahan, dalam hubungannya dengan (1). Sistem otoritas, (2). Integrasi kolektif di bidang sosial, budaya dan ekonomi, dan (3). Proteksi terhadap regulasi. Tiga aspek tersebut akan dijabarkan ke dalam bentuk kebijakan dan perencanaan yang terpadu dan integral sehingga semua pihak mengetahui tujuan sasaran yag dicapai secara jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan kuantitas dan kualitas energi yang sama.

Konsistensi BBTNGL terhadap pengembangan kawasan Tangkahan adalah masih bersifat fluktuatif berdasarkan kebijakan para pengambil keputusan di internal BBTNGL, sehingga kebijakan dan perencanaan yang terpadu dan integral sangat dibutuhkan untuk mengisi manajemen kolaborasi di antara kedua belah pihak tersebut. Dalam arti kebijakan dan perencanaan untuk pelaksanaan pengembangan kawasan, tidak akan tergantung pada orang perseorangan atau personal aktif yang mendukung tetapi lebih pada sistem itu sendiri. Ini menjadi evaluasi penting untuk dianalisis.

BB TNGL secara optimal telah memberikan dan melakukan dukungan terhadap pengembangan kawasan Tangkahan hingga saat ini. Sehingga evaluasi terhadap manajemen kolaborasi tersebut penting untuk dilakukan dalam jangka waktu dekat untuk lebih mengintegrasikan kedua belah pihak dalam sistem perencanaan dan kebijakan yang terintegrasi.

MoU antara LPT dan BB TNGL yang ditanda tangani pada tahun 2006 adalah untuk masa waktu 2006-2011, dan pada akhir tahun 2011 telah dilakukan perpanjangan MoU/PK untuk masa waktu 2011-2016. Mekanisme evaluasi telah dilakukan, hanya saja belum sama-sama diimplementasikan secara optimal. MoU atau Perjanjian Kerjasama (PK) yang ditandatangani selama ini adalah produk hukum yang bersifat sosial budaya. Terbitnya PP 36 tahun 2010 tentang Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah produk hukum yang bersifat ekonomi. Pilihannya memilih satu opsi dengan konsekuensinya dan atau mengintegrasikan kedua opsi tersebut atau kita juga akan kehilangan kedua-duanya dari opsi tersebut. Efektifitasnya adalah pengintegrasian, dimana IPPA yang akan dikelola harus berbasis pada wilayah-wilayah yang telah dilakukan manajemen kolaborasi dengan masyarakat di wilayah desa tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat ruang usaha dan ruang kontrol dari masing-masing pihak, alternatif lainnya adalah LPT berkolaborasi dengan BUMN/BUMD atau koperasi Kementerian Kehutanan (BB TNGL) atau berbagai alternatif lainnya dengan prinsip MoU tersebut bukan dicabut, tetapi lebih banyak direplikasikan kepada wilayah-wilayah lain disepanjang kawasan konservasi, kawasan hutan lindung maupun hutan produksi di wilayah Sumatera Utara dan nasional dalam visi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Nurdin Razak
Akademisi dan Praktisi Ekowisata
Universitas Airlangga

Nurdin Razak adalah aktivis lingkungan yang beberapa tahun konsisten menikmati keindahan TN Baluran. Koleksi foto-fotonya sangat menarik untuk kita nikmati bersama bahwa ternyata Baluran bukan hanya banteng dan savana. Ia sempat mengunjungi Tangkahan ketika mengadakan *excursion* setelah acara Pameran Wisata Alam di Medan. Pendapatnya menarik untuk kita simak. Ia menyatakan sekilas hanya mengetahui beberapa kegiatan ekowisata disana dengan pelibatan masyarakat yang sebelumnya berkecimpung di kegiatan *illegal logging*.

Nurdin Razak menyatakan bahwa ekowisata dilakukan di Tangkahan dapat dikategorikan sebagai ekowisata, hanya saja perlu kita perlu ketahui ekowisata sebenarnya lebih bermakna filosofi, namun dalam hal ini, dapat dijadikan alat pendongkrak ekonomi khususnya masyarakat lokal untuk lebih menghargai potensi lingkungan sekitar. Indikator yang dapat dilihat sebagai capaian kegiatan ekowisata adalah respon wisatawan baik tertulis maupun lisan terkait pelayanan, materi interpretasi, keselamatan dan kenyamanan dan variasi aktifitas ekowisata yang dinamis dengan tetap memegang prinsip ekowisata. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mengatur distribusi tugas dan hasil (ekonomi) terkait dengan kemampuan masing masing staf di Tangkahan dengan tetap memberikan pelayanan maksimal terhadap wisatawan.

Sebagai praktisi dan akademisi yang mendalami ekowisata di Jawa Timur, Nurdin Razak cukup terkesan dengan kondisi Tangkahan saat pertama kali kesana. Ia menyarankan beberapa hal, yaitu : (1) Balai Besar TN Gunung Leuser tidak boleh berhenti memberikan peluang-peluang usaha pengembangan ekowista di masyarakat sebagai luasan aktifitas ekowisata, sehingga tidak terkesan eksklusif di kelompok masyarakat tertentu. (2) Lembaga Pariwisata Tangkahan terus memberikan akses sertifikasi dan penjaminan mutu untuk menguatkan kompetensi pelayanan ekowisata di internasional (3) Dinas Pariwisata Kab.Langkat sebaiknya membuat jaringan kegiatan pariwisata dengan stakeholder di Kabupaten Langkat.

Elephant trekking di Tangkahan

sumber foto :YOSL-OIC

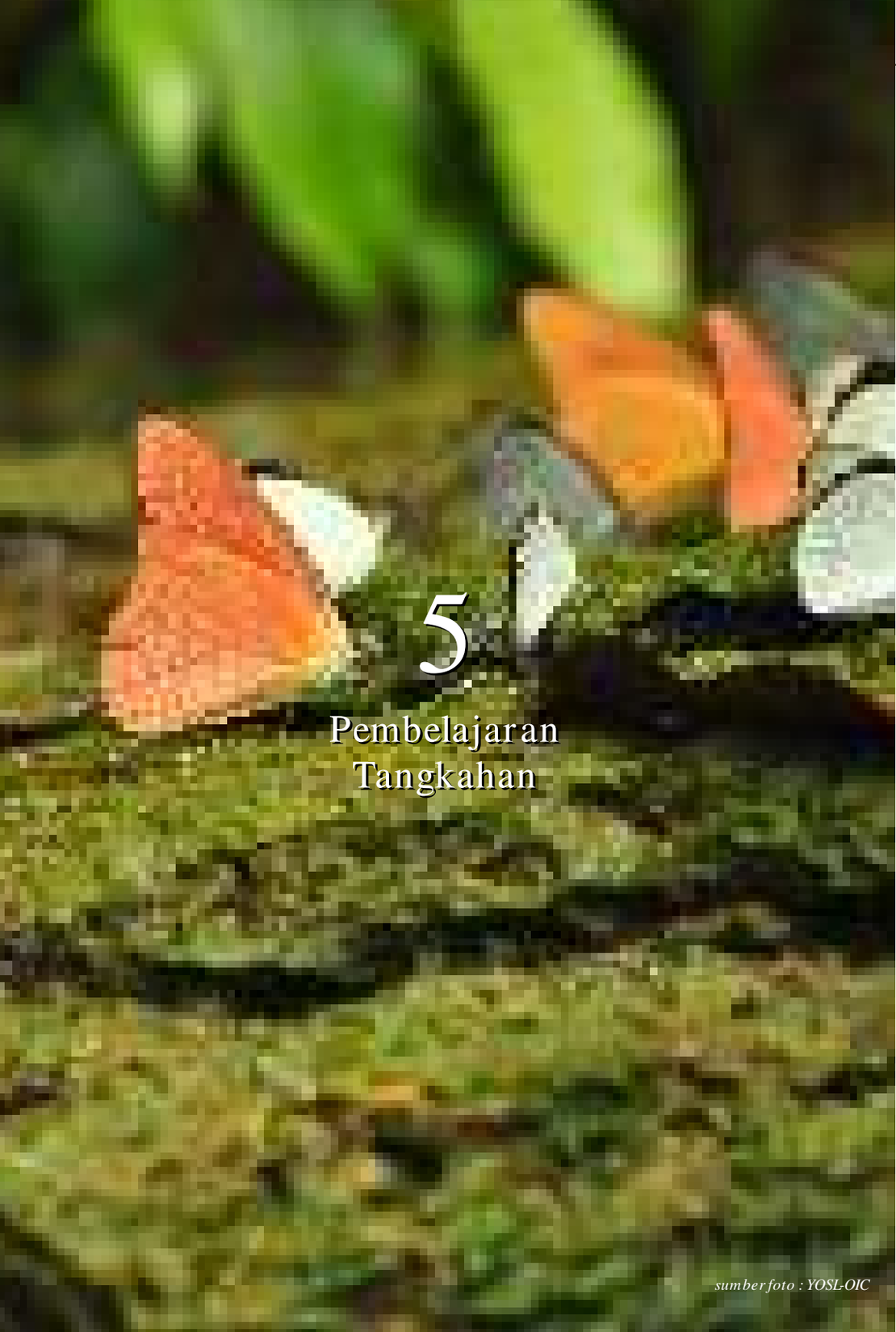

5
Pembelajaran Tangkahan

sumber foto : YOSL-OIC

Selama hampir 13 tahun proses kerjasama para pihak di Tangkahan, telah memberikan banyak pelajaran. Khususnya tentang bagaimana pola-pola membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara pengelola taman nasional dengan masyarakatnya. Bagaimana pengelolaan taman nasional di Indonesia sebaiknya dilakukan. Berbagai pengalaman penegakan hukum ternyata tidak cukup dan tidak menjawab persoalan-persoalan subtansial di masyarakat, seperti terbatasnya lahan, kemiskinan, pertambahan penduduk, dengan berbagai varian penyebab lainnya yang saling tali temali, semakin kompleks dan dinamis. Dokumentasi dari pengalaman lapangan seperti di Tangkahan ini justru menjadi semakin penting, sehingga pembelajaranya dapat disebarluaskan dan diadopsi oleh siapapun yang peduli akan kelestarian hutan di satu sisi dan bagaimana peran dan pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pinggir hutan di sisi lainnya. Laksana dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan memang sebaiknya tidak perlu dilakukan. Kelestarian hutan akhirnya harus bisa menjawab persoalan-persoalan riil di tingkat masyarakat. Pembelajaran dari Tangkahan, selama hampir 13 tahun, antara lain sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

5.1. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi terus menjadi perdebatan panjang di level akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pengamat lingkungan, praktisi konservasi, mahasiswa, dan sebagainya. Pemahaman tentang masyarakat yang memerlukan pendekatan multidisipliner, khususnya ilmu-ilmu sosial humaniora, menyebabkan sebagian besar birokrat pengelola taman nansional kurang tertarik. Apalagi masyarakat bukanlah entitas yang homogen, sebagaimana diuraikan oleh Sunjaya merujuk pendapat para pakar. Hal inipun dibuktikan dengan rinci dan komprehensif oleh Saiful Bahri. Sejarah Tangkahan penuh dengan dinamika dan konflik-konflik. Skala konflik yang meningkat disebabkan oleh semakin sempitnya lahan untuk hidup. Terjepit di antara perkebunan sawit dan hutan TNGL. Bahkan situasi ini sudah terjadi sejak lama.

Sejak kelahiran 55 kawasan konservasi yang pertama tahun 1912 yang dimotori oleh Perhimpunan Perlindungan Alam Hindia Belanda, yang dipimpin oleh Dr. S.H.Koorders, kriterianya memang lebih berorientasi pada perlindungan alam, estetika, habitat hidupan liar, dan gejala alam.

Hanya satu kawasan konservasi yang ditetapkan selain nilai-nilai keragaman hayatinya juga untuk melindungi suku-suku asli yang hidup di dalamnya. Kawasan konservasi tersebut adalah Cagar Alam Lorentz.

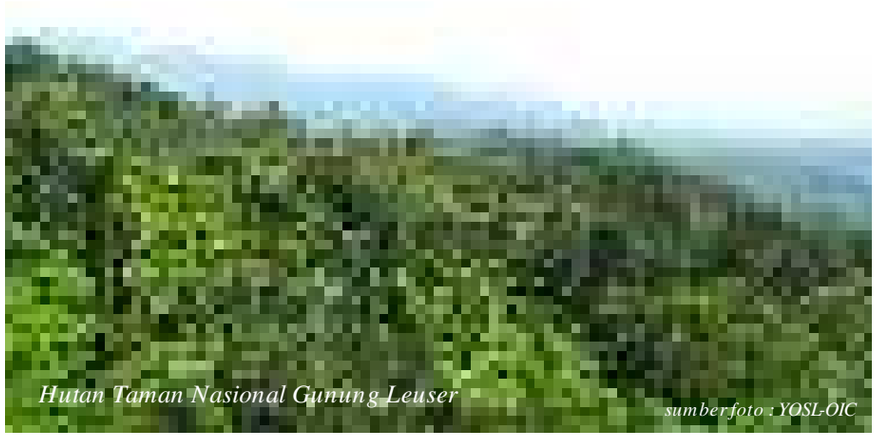

Hutan Taman Nasional Gunung Leuser *sumber foto : YOSL-OIC*

Walupun pada era 1980an, John McKinnon telah menambahkan kriteria sosial-ekonomi dalam pengusulan kawasan konservasi, sebagaimana bisa dipelajari dalam 8 seri dokumen National Conservation Plan (NCP), dalam praktiknya, orientasi pengelolaan yang terlalu berat ke aspek flora, fauna, gejala alam, serta sering diabaikannya peran masyarakat khususnya aspek kultural, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, menjadi bahan kritikan kelompok ahli-ahli atau praktisi ilmu sosial humaniora. Dimana peran dan posisi masyarakat dalam perlindungan keragaman hayati, yang seringkali atas nama dan untuk memenuhi target atau komitmen Indonesia terhadap "kesepakatan global". Dalam kesepakatan ini, setiap negara diminta menyisihkan minimal 10% dari sumberdaya alamnya untuk dialokasikan sebagai kawasan yang dilindungi. Akhirnya pada praktik kelola kawasan konservasi, muncul benturan atau sengaja dibenturkan pada pilihan untuk perlindungan keragaman hayati, melindungi habitat satwa liar di satu kutub dan kepentingan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, utamanya yang hidupnya masih sangat bergantung pada sumberdaya hutan itu. Pilih antara mengurus orangutan atau orang beneran (manusia) menjadi perdebatan atau sinisme di antara kelompok yang pro masyarakat. Perdebatan yang tidak berkesudahan dan hanya terjebak dalam wilayah diskursus, wacana, tanpa masing-masing pihak mampu membuktikan kebenarannya. Mereka tidak mengujinya di lapangan. Tangkahan, semoga mampu memberikan jawaban atas perdebatan tersebut.

5.2. Perubahan Paradigma dan Kebijakan

Dalam kongres Taman Nasional Sedunia ke V pada tahun 2004 di kota Durban, Afrika Selatan, peran kawasan-kawasan konservasi, termasuk taman nasional, telah berubah (tepatnya) dirubah dan telah menjadi kesepakatan bersama secara global. Peranan masyarakat (hukum) adat, masyarakat setempat, sangat besar dan strategis, untuk mendapatkan manfaat dari kawasan konservasi. Mereka juga diberikan peluang yang cukup besar dalam membantu pengelolaan kawasan konservasi. Peranan swasta, generasi muda, juga menjadi perhatian serius dan mengemuka dalam *Durban Accord* tersebut. Pengelolaan kawasan konservasi juga harus dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, peranan lembaga-lembaga konservasi global dalam membantu menginvestasikan pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi secara global.

Dukungan pendanaan, diperlukan sumber pendanaan sekitar US $ 25 milyar untuk membangun dan memelihara sistem pengelolaan kawasan konservasi global, khususnya bantuan pendanaan untuk negara-negara berkembang, antar organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan (LSM), dan keterlibatan sektor swasta. Sayang sekali, dokumen kesepakatan global seperti ini kurang disebarluaskan ke para pihak.

Memperhatikan perubahan paradigma yang cukup signifikan dalam kongres itu, yang tercantum dalam *Durban Accord*, maka *Durban Accord* perlu kita pertimbangkan dalam penyusunan zonasi sebagai alat manajemen taman nasional di Indonesia; perubahan pola pengelolaan kawasan konservasi, khususnya dalam kaitannya dengan posisi dan peran masyarakat.

Di tingkat nasional, terbit Permenhut Nomor P.19/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Permenhut ini memberikan peluang para pihak untuk membantu pengelolaan kawasan konservasi, termasuk masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2006, terbit Permenhut Nomor P.56 tentang Zonasi Taman Nasional. Konsultasi publik disyaratkan dalam penyusunan zonasi dan zonasi mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat. Proses partisipasi dalam penyusunan zonasi ini suatu langkah sangat maju dimana ruang dialog dibuka seluas-luasnya.

Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2008, terbit Permenhut No.41 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan KSA dan KPA yang mensyaratkan pula suatu konsultasi publik, dalam penyusunannya. Aturan main sudah ditetapkan, tinggal pelaksanaannya, apakah mempunyai niat yang tulus untuk melaksanakannya dan menghindarkan diri dari jebakan formalitas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri tentang perubahan paradigma dalam penyusunan berbagai produk kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat setempat.

Keberanian seorang Kepala Balai (Besar) Taman Nasional, untuk melakukan perubahan, khususnya dalam proses penyusunan kebijakan di tingkat lokal, menjadi faktor penentu apakah di tataran akar rumput akan terjadi perubahan. Dengan telah tersedianya aturan main tentang konsultasi publik, ternyata tidak serta merta terjadi perubahan di tingkat lapangan. Partisipasi memerlukan banyak energi, waktu, dan tenaga, serta biaya. Berbagai kesalahpahaman, konflik, beda pendapat harus difasilitasi untuk dicarikan titik temu. Keterbukaan pihak pemerintah (dalam hal BB TN Gunung Leuser adalah Kepala Balai Besar) dalam membuka ruang dialog dan diskusi dengan para pihak kunci ini sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Terutama, untuk evaluasi program-program prioritas, seperti Ekowisata Tangkahan, Restorasi Sei Serdang, rehabilitasi dan strategi penjagaan dan pengelolaan Besitang. Di samping itu, masih banyak agenda panjang di wilayah Aceh, untuk segera difasilitasi dan dicarikan solusi-solusi yang realistis dan menguntungkan semua pihak, termasuk bagi kepentingan pelestarian Leuser.

Hutan TNGL di Besitang - Langkat

sumber foto : YOSL-OIC

Pola kerjasama yang dikembangkan di Tangkahan, antara lain melalui MoU Kerjasama LPT dengan Balai TN Gunung Leuser (2006), dan berbagai pendekatan dan konsistensi dukungan keterpaduan kegiatan dari Balai TN Gunung Leuser ditujukan untuk mendukung pengembangan Ekowisata Tangkahan ke depan. Kerjasama ini perlu segera dievaluasi dan dijadikan sebagai fondasi pengembangan Tangkahan. Apakah melalui skema kerjasama atau kolaborasi atau didorong menuju pola perizinan, seperti Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA).

Kerjasama Indonesia-Korea Selatan

Pernyataan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) di Harian Kompas (24 November 2012, Halaman 24) sangat menarik untuk kita simak. Berita berjudul :"Kemenhut Meniru Korea" Dirjen PHKA menyatakan : ".....Kami mulai pendekatan baru menghadapi perambahan karena penertiban atau penggusuran tak berhasil. Caranya mengajak masyarakat sekitar hutan turut menjaga hutan" Kerjasama yang disebut sebagai "Sister Park" ini dilakukan di TN Gunung Gede Pangrango dengan TN Jirisan; TN Dadohaehaesang dengan calon mitra TN Laut, yaitu TN Karimun Jawa, TN Kep.Seribu, TN Bunaken, atau TN Takabonerate.

Berita ini tentu cukup memberikan angin segar bagi Kepala UPT yang menghadapi berbagai persoalan perambahan. Penegakan hukum tidak selalu menjadi solusi. Memang, dalam penyelesaian banyak persoalan di kawasan konservasi Indonesia, tidak ada *"Solusi Tunggal"*. Tidak ada *"Single Solution"* untuk masalah-masalah yang terjadi di dalam kawasan konservasi. Nuansa kerakyatan dan kebhinekaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, semestinya diakomodasi dalam proses-proses mulai sejak identifikasi masalah/potensi, sampai ke tingkat perencanaan partisipatif, pelaksanaan kegiatan dengan sejauh mungkin melibatkan berbagai komponen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan evaluasi bersama. Apabila paradigma baru ini, yang sejalan dengan berbagai konvensi global, bisa dijalankan secara konsisten oleh pengelola taman nasional, maka dukungan masyarakat akan semakin meningkat, seiring dengan tingkat kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar mereka hidup dan mencari penghidupan.

5.3. Pembelajaran Tangkahan

Mengapa dikatakan sebagai anomali dalam konteks ekowisata? Tangkahan didisain pada awal mulanya, karena kesadaran masyarakat dan para tokoh di desa Sei Serdang dan Namo Sialang, akan dampak kerusakan hutan Leuser yang berbatasan dengan desa mereka. Kepindahan Wak Yoen, tokoh pertama dan paling senior di Bukit Lawang itu menemukan Tangkahan pada tahun 1997. Tidak ada seorangpun yang tertarik mengembangkan Tangkahan sebagai salah satu destinasi (eko) wisata alam pada saat itu. Masa itu diwarnai dengan semakin merebaknya *illegal logging,* termasuk di wilayah Tangkahan, dan bahkan telah berlangsung dalam tempo yang lama. Nalurinya sebagai pecinta alamlah yang penulis kira mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Melakukan suatu tindakan nyata untuk segera mencegah kerusakan hutan. Penggalangan demonstrasi ke Medan dengan sasaran pengelola Leuser, waktu itu, yang dikepalai oleh seorang Adi Susmianto. Demonstrasi justru disambut oleh Adi Susmianto dengan ajakan untuk bekerjasama mengamankan hutan, di wilayah desanya masing-masing. Ajakan ini akhirnya menjadi titik awal perjuangan Tangkahan sebagai kawasan yang bisa dinikmati keindahannya sekaligus diharapkan mampu menggerakkan ekonomi setempat. Spirit mencintai hutan sangat kental dan dijiwai dengan sepenuhnya oleh Wak Yoen. Bahkan ketika diskusi penulis dengannya pada 28 Maret 2013 di ecolodge yang dikelolanya di depan Sei Buluh. Wak Yoen tidak pernah melarang pemuda-pemuda desa yang melakukan aktivitas *illegal* dengan menebang kayu atau menyetrum ikan di sungai. Ia secara bertahap mengajak mereka bicara dan berteman dan bicara dari hati ke hati, sambil minum kopi di lepau dan bersendagurau. Ketika Wak Yoen harus tinggal di Inggris (2000-2004), ia bekerja di sana dan sebagian hasil tabungannya dikirimkan ke Tangkahan untuk berbagai upaya kegiatan pemuda dan untuk membangun Tangkahan yang ia impikan. Ialah yang mendirikan persatuan guide pertama kali di Sumatera di Bukit Lawang. Impian Wak Yoen banyak diterjemahkan oleh tokoh muda. Salah satunya yang paling kompeten menulis dan membuat perencanaan itu adalah Saiful Bahri.

Berbagai komentar yang dimintai penulis, pada umumnya menyatakan bahwa hutan Leuser di Tangkahan aman. Tidak ada lagi suara *chainsaw* yang meraung-raung membelah kesenyapan hutan purba itu. Pernyataan Wahdi Azmi, yang lama mendukung Tangkahan dengan inisiatif *elephant trekking*-nya, jelas menyebutkan keberhasilan pola Tangkahan, bukan hanya dari ekowisatanya. Telah tumbuh kesadaran pada generasi tua dan muda di sana, akan kepentingan menjaga hutan Leuser. Untuk mereka saat ini. Untuk generasi mendatang. Kepala Desa Sei Serdang, Pak Ganin Sembiring, ketika berbagi pengalaman dengan penulis, juga menyatakan bahwa Tangkahan banyak memberikan manfaat, yang dirasakan oleh masyarakat desa yang dipimpinnya. Namun demikian, kepala desa ini tidak menyadari bahwa pola Tangkahan, pola hubungan masyarakat-hutan Leuser yang harmonis ini, menjadi percontohan yang sangat penting. Di desa-desa tetangganya di Besitang, konflik masyarakat dengan taman nasional tidak pernah dapat diselesaikan. Eks pengungsi Aceh masih berada di dalam kawasan Besitang. Laksana dua kutub yang berseberangan: Tangkahan wilayah adem ayem sedangkan Besitang daerah panas penuh sengketa, yang berkepenjangan tanpa ujung sejak 1999, dan bahkan jauh sebelum kedatangan pengungsi asal Aceh tersebut. Di Besitang, 4.000 ha kawasan taman nasional berubah menjadi sawit. Di Tangkahan, LPT diminta menjaga 17.000 ha hutan yang berbatasan dengan Desa Namo Sialang dan Sei Serdang, terus dijaga sampai saat ini.

Elephant trekking di daerah wisata Tangkahan *sumber foto : YOSL-OIC*

Maka, Tangkahan bukan sekedar wilayah yang moncer karena ekowisatanya. Ia suatu wilayah dimana telah berlangsung pembelajaran secara terus menerus, tentang hubungan masyarakat dengan taman nasional. Kalau dibandingkan dengan luas TN Gunung Leuser yang hampir 1 juta Ha, wilayah Tangkahan yang diamankan seluas 17.000 ha itu, tentulah bukan luasan yang cukup signifikan. Namun demikian, Tangkahan telah menunjukkan kepada kita, bagaimana apabila pemerintah mampu dan mau *(memiliki goodwill)* untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama menjaga taman nasional, maka hal itu dapat terjadi. Paradigma pemerintah harus berubah atau dipaksa untuk dirubah. Lebih banyak mendengarkan aspirasi, melihat langsung ke lapangan, dan mencari peluang dimana pemerintah bisa duduk bersama-sama dengan masyarakat dan komponen lainnya, membangun kesepakatan dan visi bersama.

5.4. Kepemimpinan Kolektif

Persoalan lingkungan semakin kompleks dengan dinamika perubahannya yang tidak menentu dan sulit diprediksi. Yang pasti adalah kecenderungan kerusakan yang semakin meningkat. Ketika setiap negara diminta untuk menyisihkan 10% dari luas wilayahnya untuk ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi, maka pemerintah Indonesia (Kementerian Kehutanan) mulai menyusun suatu rencana penunjukan/penetapan kawasan-kawasan tersebut.

Dalam perjalanan waktu, sejak era 1980an sampai saat ini atau selama hampir 23 tahun, telah terjadi banyak perubahan, baik dari aspek geopolitik, sosial, ekonomi, budaya, yang menyebabkan berubahnya pola-pola hubungan masyarakat-hutan; masyarakat-taman nasional. Ketika pemerintah telah menunjuk/menetapkan 27,2 juta ha kawasan konservasi, maka muncul persoalan kapasitas pengelolaan. Kawasan konservasi sebagai *common pool resources* (CPR) ternyata tidak akan pernah mampu dikelola oleh pemerintah. Terlalu luas dan terlalu mahal untuk dapat melakukan pengelolaan secara soliter. Maka, keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi, sangat ditentukan oleh kerja kolektif dari berbagai komponen, yaitu pemerintah-masyarakat sipil-swasta, dan bahkan melebar pada komitmen masyarakat global. Masyarakat internasional, yang telah mensepakati suatu konvensi dunia, tentang kawasan-kawasan yang dilindungi di seluruh negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi yang manfaatnya berskala lokal sampai dengan di tingkat global, memerlukan suatu *leadership* atau kepemimpinan kolektif atau bersama, secara terpadu dan saling bersinergi. Tangkahan memberikan kita pelajaran yang sangat berharga tentang peran *local leader*. Pemimpin lokal yang menunjukkan komitmennya yang konsisten tanpa henti, tanpa pamrih, sebagaimana ditunjukkan oleh Wak Yoen, Pak Okor, Ruth dan beberapa tokoh muda Tangkahan, yang sampai saat ini masih terus menjaga Tangkahan. *Local leader* ini adalah mereka yang berperan sebagai pemimpin informal dan tinggal di pinggir hutan, sehingga ia setiap saat dapat melakukan berbagai tindakan dan contoh laku bagaimana bersikap menjaga hutan. Di Tangkahan, tidak diperlukan investasi milyaran untuk menjaga hutan. Tidak seperti di Besitang, yang telah menghabiskan milyaran rupiah untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan persoalan perambahan, yang sejak tahun 2000 tidak pernah bisa tuntas. Penegakan hukum menemui jalan buntu.

Wak Yoen dan Tangkahan
"Di sini karena SDM-nya sudah mengerti maka mereka akan berhenti sendiri kalau merusak lingkungan.... dan saya tidak pernah melarang mereka yang menyetrum ikan di sungai dll... sekarang justru mereka pada mancing...tidak ada yang menyetrum...karena malu sendiri. Tingkat kepedulian masyarakat di sini juga sudah besar... apalagi untuk lingkungan dan hutan...mereka malu jika sampai menebangi pohon. Jadi jika kita ingin menikmati hasil dari Tangkahan ya kita harus berbuat. Saya kurang bisa menerima jika ada yang menyalahkan... karena yang menyalahkan itu yang tidak pernah berbuat. Konservasi itu dari hati... dan menurut saya tidak ada itu konservasi... Tapi konservasi kalau tidak dilakukan... macam ada yang kurang di hati ini. Banyak orang dapat gelar dari Tangkahan meski mereka tidak pernah ke Tangkahan.... Dan yang membuat saya kecewa adalah jika ada yang menyebut Tangkahan berhasil... Itu saya dulu menerapkan bagaimana cara belajar lapar... cara bekerja dan berpikir.... Contoh sekarang...dengan adanya LSM yang penuh fasilitas dan dananya besar justru membuat mereka kurang dalam pembentukan mental karena orientasinya proyek."

Keberhasilan upaya restorasi di Sei Serdang, yang semula areal perambahan sawit, menunjukkan fakta bahwa kehadiran Kepala Resort dan stafnya yang tinggal di lapangan dan sikap mereka dalam berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya, menjadi faktor penentu keberhasilan restorasi tersebut. Dukungan yang konsisten dari UNESCO dengan jajaran stafnya, menjadi faktor tambahan yang juga menentukan keberhasilan di Sei Serdang itu (Wiratno, 2013). Maka, penulis menyakini bahwa *collective leadership* yang mendorong *collective action* menjadi salah satu kunci keberhasilan kelola kawasan Taman Nasional Leuser. Kapasitas kepemimpinan inilah yang seharusnya dapat direplikasi di ratusan desa yang mengepung TN Gunung Leuser, di wilayah Sumatera Utara maupun di Aceh. Upaya replikasi Tangkahan pernah dilakukan di Sei Lepan, namun tidak berlanjut. Disain besar replikasi Tangkahan sebaiknya juga menjadi agenda BBTNGL ke depan, yang tentu perlu didorong oleh Ditjen PHKA dan para pihak lainnya. *Durban Accord*, sebagai hasil dari kesepakatan pada Kongres Taman Nasional Sedunia ke V di Durban, Afrika Selatan, 2004, menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi sangat ditentukan pada upaya bersama pihak pemerintah, swasta, masyarakat setempat, masyarakat tradisional, organisasi sukarelawan, dan berbagai pihak lain, serta sebagai tempat untuk mempertemukan bersama-sama kepentingan alam, budaya dan spiritual.

5.6. Langkah-langkah ke Depan

Mempertimbangkan sebagian besar pendapat para pelaku di Tangkahan, para pendukung dan pengamat ekowisata, serta merujuk berbagai perkembangan di tingkat global, di tataran nasional, dan di tingkat Balai Besar TN Gunung Leuser, langkah-langkah yang masih perlu dilakukan antara lain adalah :

1. Di tingkat nasional, Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi (PHKA) beserta jajarannya perlu segera memfasilitasi proses pembelajaran keberhasilan Tangkahan untuk di-*scaling up*, diangkat ke tingkat nasional. Hal ini penting, agar pengelola taman-taman nasional dan kawasan konservasi lainnya di seluruh Indonesia, mau belajar dan mengambil pelajaran dari Tangkahan. Setelah 13 tahun, Tangkahan membuktikan bahwa apabila pemerintah mengambil posisi dan peran yang tepat, maka dukungan masyarakat dalam turut serta secara aktif dan konsisten, menjaga hutan, dapat dilakukan, dan bukan hanya mitos. Pembelajaran ini dapat dilakukan bersama-sama dengan model penguatan masyarakat, seperti di CA Gunung Simpang, Cianjur, Jawa Barat. Pembelajaran CA Gunung Simpang, yang dijaga oleh masyarakat, dengan membentuk "pasukan" Raksa Bumi dapat dibaca dalam buku yang menceritakan tentang proses tersebut, yang berjudul: "Saatnya Kami Berdaulat" Sebuah Cuplikan Pengalaman Masyarakat Gunung Simpang untuk Membangun Kembali Perannya dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. Buku yang ditulis oleh Ridwan Soleh, Pupung Nurwatha, Idah Faridah, dan Rasman Nuralam ini diterbitkan oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Bina Hutan Lindung, Ditjen PHKA, pada tahun 2010. Buku dapat diunduh di :

www.konservasiwiratno.blogspot.com

2. Di tingkat Balai Besar TN Gunung Leuser, upaya-upaya yang sebaiknya terus dilakukan dan tingkatkan antara lain bagaimana mensinergikan berbagai kegiatan dan investasi yang dibiayai oleh BBTNGL, untuk mendukung Tangkahan saat ini. Pembangunan instalasi air untuk mendukung kegiatan di sekitar *Information Center* dan Kantor Resort Tangkahan serta kebutuhan air untuk beberapa warung makan, sangat ditunggu masyarakat. Pemberdayaan *guide* yang dibekali dengan informasi tentang TN Gunung Leuser secara keseluruhan dan kapasitas praktis lainnya, seperti pengenalan jenis pohon, fauna (khususnya burung), anggrek, jamur, manfaat ekosistem hutan tropis, dan sebagainya juga masih perlu terus menerus disegarkan. Skema IPPA sebagai pengganti pola kerjasama atau kolaborasi, perlu dipikirkan

kembali, mengingat sejarah Tangkahan, bukan hanya ditujukan untuk pengembangan ekowisata. Staf kunci di BBTNGL sebaiknya memahami sejarah Tangkahan dan peran pentingnya dalam membantu menjaga hutan Leuser, khususnya di areal seluas 17.000 ha yang dikerjasamakan tersebut. Kehadiran staf Resort di Tangkahan mutlak diperlukan, untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang timbul di lapangan. Saat ini, ada kesan bahwa Tangkahan tidak begitu diperhatikan atau didampingi, sementara berbagai perkembangan di Tangkahan masih memerlukan pendampingan BBTNGL. Penguatan pola pendampingan di tingkat Seksi Wilayah dan Resort menjadi sangat penting untuk segera dibahas bersama-sama dengan LPT dan dengan mitra lainnya. Besarnya dana yang masuk ke BBTNGL dalam bentuk karcis masuk, sebaiknya jangan menjadi prioritas utama di Tangkahan. Kalaupun diperlukan, maka harus dibangun paket-paket wisata minat khusus, seperti yang sudah ada yaitu *elephant trekking,* untuk ditingkatkan kualitas dan profit sharing-nya, secara terbuka dan fair. BBTNGL juga perlu menyusun agenda riset terapan maupun riset murni di Tangkahan, sehingga hasil riset tersebut dapat dijadikan masukan untuk revisi kebijakan atau revisi kegiatan. Peningkatan eselonisasi dari Balai (Eselon III) menjadi Balai Besar (Eselon IIb) pada akhir tahun 2007 di TN Gunung Leuser, sebenarnya memberikan peluang yang besar, untuk peningkatan pelayanan. Saat ini terdapat Kantor Bidang Wilayah di Stabat, yang diharapkan tingkat dan kualitas komunikasi dua arah, termasuk di Tangkahan, semakin meningkat. Beberapa agenda internal BBTNGL, terkait dengan pengembangan Tangkahan, menurut Ujang Whisnu Barata, adalah: (a) Pengaturan kembali *(re-arrangement)* kegiatan kemitraan di Tangkahan sehingga terjadi reposisi peran para mitra dalam bentuk sinergitas kegiatan dapat ditata ulang secara lebih jelas, (b) Agenda pertemuan rutin dengan mitra terkait terutama LPT, untuk membahas isu dan ide-ide terbaru pengembangan kawasan Tangkahan, (c) Pembinaan internal personil lapangan di tingkat resort maupun seksi agar lebih aktif terlibat dalam pendampingan aktifitas ekowisata di lapangan, (d) Promosi, data, dan informasi mengenai Tangkahan yang terakses *on-line,* dan (e) Penyegaran/pelatihan guide dan interpreter lokal. Nurdin Razak, seorang praktisi dan akademisi yang mendalami ekowisata, memberikan masukan agar BB TN Gunung Leuser tidak boleh berhenti memberikan peluang-peluang usaha kembangan ekowisata di masyarakat sebagai luasan aktifitas ekowisata, sehingga tidak terkesan eksklusif di kelompok masyarakat tertentu.

Lembaga Pariwisata Tangkahan terus memberikan akses sertifikasi dan penjaminan mutu untuk menguatkan kompetensi pelayanan ekowisata di internasional, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat sebaiknya membuat jaringan kegiatan pariwisata dengan *stakeholder* di Kabupaten Langkat. Nurdin Razak juga memberikan pendapat tentang pentingnya dilakukan survey tentang kepuasan pengunjung khususnya wisatawan dari mancanegara.

3. Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Langkat perlu duduk bersama dengan BBTNGL dan LPT khususnya dalam pembahasan *profit sharing* dari meledaknya wisatawan di Tangkahan. Pada saat ini, Pemkab Langkat tidak mendapatkan pembagian yang memadai sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena kondisi inilah mungkin Pemkab Langkat belum dapat mengalokasikan program dukungan, seperti perbaikan jalan menuju Tangkahan, yang telah lama ditunggu oleh masyarakat. Listrik masuk Tangkahan baru tiga bulan yang lalu, sedangkan di Desa Sei Serdang, aliran listrik telah masuk sejak tahun 2002. Hal ini mencerminkan belum dilihatnya Tangkahan sebagaiprioritas pembangunan khususnya untuk daerah tujuan wisata.

4. PTPN II perlu diajak berdialog, khususnya yang terkait dengan pengembangan Tangkahan, sebagaimana yang diusulkan oleh Saiful Bahri (Tangkahan 10-20 tahun mendatang). Beberapa pelaku wisata di Tangkahan menyampaikan keinginan dan ide yang sama. *Redesign* Tangkahan, memerlukan ruang yang lebih luas dan PTPN II dapat diajak berbagi ruang dengan pola kerjasama kemitraan yang konkrit dan jelas. Dialog multipihak ini, tentu perlu difasilitasi oleh BBTNGL, tidak cukup hanya oleh LPT, karena hal ini merupakan kepentingan bersama.

5. Pengembangan paket-paket ekowisata sebaiknya tidak hanya untuk wilayah Tangkahan. Sebagaimana telah diupayakan paket Tangkahan-Bukit Lawang, maka ada baiknya apa yang diusulkan oleh Ujang Wishnu Barata, perlunya didorong paket baru ke areal restorasi Sei Serdang. Sehingga wisatawan manca negara dapat diberi kesempatan untuk memahami persoalan kerusakan Leuser, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BBTNGL bersama para pihak, untuk melakukan restorasi dan mempelajari bagaimana hasilnya.

6. Paket *elephant trekking* Tangkahan Bukit Lawang maupun trekking pendek perlu segera dibahas secara intensif dengan BBTNGL, terkait dengan ketersediaan gajah dan hal-hal yang menyangkut pembagian keuntungan yang dikaitkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dimana pihak Ditjen PHKA selalu mendorong agar BBTNGL meningkatkan perolehannya.

7. Program Tangkahan berjangka panjang (sampai dengan 2054) sebagaimana disampaikan oleh Saiful Bahri, perlu dikomunikasikan secara kontinyu dan mendetil khususnya difokuskan pada program berjangka 5 tahun dan tahunan, di BBTNGL. Dengan demikian diharapkan dapat dirancang usulan kegiatan-kegiatan di pihak taman nasional yang mendukung kebutuhan-kebutuhan mendesak dan prioritas di Tangkahan. Tanpa komunikasi dan dialog yang dikawal dengan baik, berbagai ide dan gagasan yang bagus di tingkat lapangan, tidak dapat diakomodir oleh BBTNGL karena tidak dimasukkan ke dalam anggarannya. Bidang Wilayah di Stabat mempunyai peran penting dalam menyambungkan komunikasi antara Tangkahan dengan Kantor BBTNGL di Medan.

Kongres LPT di Tangkahan *sumber foto : YOSL-OIC*

8. Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) perlu terus meningkatkan kapasitasnya di berbagai bidang termasuk kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang modern, dengan aturan-aturan pengelolaan keuangan yang disepakati bersama. LPT perlu meningkatkan status hukum kelembagaannya, termasuk membentuk badan-badan usaha milik lembaga (BUMD) sebagaimana digagas oleh Saiful Bahri. BUMD inilah cikal bakal lembaga lokal yang akan menggerakkan roda ekonomi lokal berbasiskan potensi sumberdaya alam dan modal sosial yang telah mereka miliki, untuk membangun kemandirian dan mulai mendorong kemampuannya untuk mampu menguasai sumberdaya di sekitarnya. Bersama para pelaku wisata, BBTNGL dan masyarakat, LPT juga harus terus mengembangkan tata kelola pariwisata Tangkahan, hingga tercipta sistem pengelolaan yang menjadi harapan semua pihak. Sistem pengelolaan yang dimaksud tentunya untuk menjamin kegiatan-kegiatan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program pengembangan pariwisata Tangkahan. Dengan kata lain penulis berharap LPT tidak terjebak pada pembangunan pariwisata yang mengedepankan sisi komersial semata. Proses penguatan ini sebaiknya didampingi oleh BBTNGL dan para pihak yang peduli terhadap proses penguatan lembaga-lembaga lokal dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam yang berpegang pada prinsip-prinsip kelestarian.

9. Lembaga-lembaga dari luar yang bermaksud membantu Tangkahan dalam berbagai bentuknya, sebaiknya membangun tradisi untuk duduk bersama, sebelum menyusun rencana-rencana. Apabila perencanaan dibuat sepihak, dikhawatirkan pada akhirnya nanti tidak begitu bermanfaat atau bahkan tidak diperlukan oleh Tangkahan. *Bottom-up planning* yang memaksa para pihak untuk menempuh jalur partisipasi dan pelibatan para pihak di tingkat lapangan, menjadi salah satu nilai-nilai dasar pembangunan Tangkahan ke depan.

10. Dokumentasi secara sistematis tentang proses pembelajaran di Tangkahan yang dilakukan secara terus menerus sebaiknya terus dijaga momentumnya, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan, baik di bidang fisik, sosial, ekonomi mikro, budaya, aspirasi, pemahaman, dan pemikiran tentang Tangkahan ke depan.

11. Banyak riset yang dilakukan yang menjadikan Tangkahan hanya sebagai obyek penelitian semata-mata. *Participatory Action Research* (PAR) perlu diujicobakan di Tangkahan, dengan harapan masyarakat semakin paham akan pentingnya keterlibatan mereka bahkan dalam hal riset-riset yang seolah-olah saat ini hanya menjadi milik kaum berpendidikan di perguruan tinggi. Mereka mampu melakukan riset-riset terapan dengan dukungan fasilitator dan peneliti, yang hasilnya untuk mendorong dan memperbaiki berbagai program Tangkahan.

12. Tangkahan yang "meledak" dan mendunia telah terbukti saat ini. Mesin pencarian Google memberikan hasil pencarian sebanyak 10.400 temuan terkait Ekowisata Tangkahan, hanya dalam 0,22 detik. Semakin banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara, meningkat 214% dari tahun 2010 dibandingkan tahun 2012, memberikan implikasi yang serius apabila tidak segera dilakukan upaya-upaya yang sistematis dalam pengelolaan pengunjung. Demikian pula dengan membludaknya kunjungan wisatawan lokal yang berjumlah ribuan dalam 1 hari, akan berdampak penurunan kenyamanan, kebisingan, sampah, dan efek-efek kurang baik lainnya. Pengembangan wisata pantai merupakan ide yang tepat untuk memecah konsentrasi kunjungan di Sungai Bulu dan sekitarnya. Namun demikian, pemantauan terhadap dampak kunjungan ini harus terus dilakukan, dan dikaji hasilnya secara serius. Wak Yoen mengingatkan kita berkali-kali bahwa Tangkahan tidak akan "terjerumus" seperti Bukit Lawang, menjadi *mass tourism*. Banyak wisatawan manca negara mengatakan ingin kembali ke Tangkahan dan melihat Tangkahan seperti saat ini. Kesunyian hutan purba Tangkahan itulah yang dicari-cari mereka yang datang beribu kilometer jaraknya. Wisata keheningan, wisata spiritual, menjadi trend baru dan Tangkahan menyuguhkan sajian spesial itu : "Suara Alam", "Suara Keheningan".

DAFTAR PUSTAKA

Eman J.Embu dan R Mirsel (Editor)., 2004. Gugat!.Darah Petani Kopi Manggarai. Penerbit Ledalero.Seminari Tinggi Ledalero Maumere 86152.

Ridwan, dkk., 2010. Saatnya Berdaulat. Buku ini dibuat oleh Yayasan Pribumi Alam Lestari, dan diterbitkan oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan..

Suharto Djojosudharmo, dkk., (2006). Stasiun Riset Ketambe. Booklet diterbitkan oleh Balai TN Gunung Leuser.

Sunjaya., 2013. Desa Dalam Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional dalam Wiratno (2013) Tersesat di Jalan yang Benar. Seribu Hari Mengelola Leuser. Diterbitkan oleh UNESCO-Jakarta Office.

Wiratno, Daru Indriyo, Ahmad Syarifudin, Ani Kartikasari. 2004. Berkaca Di Cermin Retak, Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional, The Gibbon Foundation - Departemen Kehutanan - Forest Press - PILI - NGO Movement, Edisi Kedua (Edisi Revisi).

Wiratno dan P Yudistira., 2011. Laporan Perjalanan ke Belanda dalam rangka Penelusuran Dokumen Kawasan Konservasi dan Peran Dr.S.H.Koorders dalam Mendorong Lahirnya Gerakan Konservasi Alam di Masa Hindia Belanda Periode 1909-1921.

Wiratno., 2013. Tersesat di Jalan yang Benar. Seribu Hari Mengelola Leuser. Diterbitkan oleh UNESCO-Jakarta Office.

Wiratno., 2011-2013. Kumpulan Makalah, Artikel, dan Kajian Konservasi Alam (2010-2013) di www.konservasiwiratno.blogspot.com.

Yudistira, P., 2012. Sang Pelopor. Peranan Dr.S.H.Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan.